



**PERATURAN BUPATI NO. 17
TAHUN 2022**

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023-2026**

BAPPEDALITBANG KAB. HULU SUNGAI UTARA



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- d. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatandan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah atau disingkat RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun setiap tahun sekali.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman Penjabat (Pj) Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
 - b. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rancangan strategis;
 - c. pedoman bagi daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026; dan
 - e. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Sistematika RPD disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Pendahuluan; |
| BAB II | : Gambaran Umum; |
| BAB III | : Gambaran Keuangan Daerah; |
| BAB IV | : Permasalahan dan Isu-isu Strategis; |
| BAB V | : Tujuan dan Sasaran; |
| BAB VI | : Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas; |
| BAB VII | : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; |

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 BAB IX : Penutup.

Pasal 4

RPD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di Daerah

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPD dengan RPJPD;
- c. konsistensi antara RKPD dengan RPD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten dalam jangka waktu berlakunya RPD.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila dalam waktu perodesasi RPD ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau adanya post mayor yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan substansi RPD, maka dapat dilakukan perubahan RPD yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati, adapun mekanisme Perubahan RPD tidak menggunakan mekanisme mutatis mutandis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 8 Juni 2022

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 8 Juni 2022

**PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 17.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II. GAMBARAN UMUM.....	II-1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-24
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-38
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-96
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-18
3.3. Kerangka Pendanaan dan Penerimaan	III-23
3.4. Pendapatan Daerah	III-27
3.5. Belanja Daerah	III-28
3.6. Pembiayaan Daerah	III-31
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1. Permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-3
BAB V. TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1. Tujuan	V-2
5.2. Sasaran	V-9

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM	
PRIORITAS	VI-1
6.1. Strategi Pembangunan.....	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan	VI-22
6.3. Program Prioritas Pembangunan.....	VI-34
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN	
PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah	VII-1
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	
DAERAH.....	VIII-1
BAB IX. PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-1
Tabel 2.2.	Jumlah Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	II-8
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016..	II-21
Tabel 2.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-22
Tabel 2.5.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016.....	II-23
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016.....	II-24
Tabel 2.7.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	II-28
Tabel 2.8.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	II-29
Tabel 2.9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Rill) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2012-2016.....	II-30
Tabel 2.10.	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kab.Hulu Sungai Utara Tahun 2011-2016.....	II-31
Tabel 2.11.	Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2012-2016.....	II-32
Tabel 2.12.	Pendapatan Perkapita Kab. HSU Tahun 2012-2016.....	II-33
Tabel 2.13.	Perbandingan Indeks Gini Kab. HSU dan Prov. Kalsel.....	II-34
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2011-2016.....	II-38
Tabel 2.15.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2015.....	II-44
Tabel 2.16.	Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-50
Tabel 2.17.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-57
Tabel 2.18.	Jumlah Guru, Jumlah Murid dan Rasio Guru dan Murid Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2017.....	II-58
Tabel 2.19.	Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2016.....	II-62

Tabel 2.20.	Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2012-2016.....	II-63
Tabel 2.21.	Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-70
Tabel 2.22.	Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016	II-70
Tabel 2.23.	Panjang Jalan Kabupaten Yang Dapat Dilalui Roda 4 (Empat).....	II-71
Tabel 2.24.	Jumlah dan Jenis Jembatan.....	II-71
Tabel 2.25.	Panjang Jaringan Irigasi.....	II-72
Tabel 2.26.	Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-73
Tabel 2.27.	Luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-74
Tabel 2.28.	Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten HSU.....	II-77
Tabel 2.29.	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB.....	II-77
Tabel 2.30.	Luasan RTH Publik di Kab. HSU.....	II-78
Tabel 2.31.	Persentase Rumah Tangga Milik dan Backlog Kepemilikan Rumah.....	II-78
Tabel 2.32.	Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2012-2016.....	II-80
Tabel 2.33.	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan Kab. HSU.....	II-81
Tabel 2.34.	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Kab. HSU.....	II-81
Tabel 2.35.	Jumlah Sambungan Rumah Pelanggan PDAM.....	II-82
Tabel 2.36.	Cakupan Pengguna Air Bersih Non PDAM.....	II-83
Tabel 2.37.	Capaian akses penduduk terhadap air bersih/air minum.....	II-83
Tabel 2.38.	Capaian Sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-84
Tabel 2.39.	Capaian Sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-84
Tabel 2.40.	Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2012 – 2016.....	II-85
Tabel 2.41.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU.....	II-86
Tabel 2.42.	Jumlah Pencari Kerja dan Status Penempatannya di Kab. HSU.....	II-88
Tabel 2.43.	Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	II-89
Tabel 2.44.	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	II-90

Tabel 2.45.	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	II-90
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2012-2016.....	II-91
Tabel 2.47.	Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-93
Tabel 2.48.	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-93
Tabel 2.49.	Volume Sampah Yang Dapat Diangkut.....	II-93
Tabel 2.50.	Titik Banjir dan penanganannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-50
Tabel 2.51.	Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2016.....	II-96
Tabel 2.52.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-96
Tabel 2.53.	Jumlah dan Rasio Akseptor KB Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-97
Tabel 2.54.	Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum.....	II-98
Tabel 2.55.	Trayek Angkutan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016.....	II-98
Tabel 2.56.	Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-99
Tabel 2.57.	Moda Transportasi Darat dan Sungai di Kab. HSU Tahun 2017.....	II-100
Tabel 2.58.	Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU.....	II-101
Tabel 2.59.	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif.....	II-102
Tabel 2.60.	Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki) yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2012-2016.....	II-102
Tabel 2.61.	Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2012-2016.....	II-103
Tabel 2.62.	Perkembangan Izin Prinsip di Kab.HSU Tahun 2013-2017..	II-103
Tabel 2.63.	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupater Hulu Sungai Utara.....	II-104
Tabel 2.64.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi di Kabupaten HSU.....	II-105
Tabel 2.65.	Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-106
Tabel 2.66.	Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kab. HSU.....	II-106
Tabel 2.67.	Perkembangan Pariwisata Di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	II-108

Tabel 2.68.	Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik Tahun 2012-2016.....	II-108
Tabel 2.69.	Jumlah Luas Panen Komoditas Pertanian Tahun 2013 – 2017 (Ha).....	II-109
Tabel 2.70.	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2017– 2017 (Ton).....	II-110
Tabel 2.71.	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2013 – 2016 (Ekor)	II-111
Tabel 2.72.	Produksi Ternak Tahun 2013–2016.....	II-112
Tabel 2.73.	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2012-2016.....	II-113
Tabel 2.74.	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Th. 2012–2016.....	II-114
Tabel 2.75.	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kab. HSU.....	II-115
Tabel 2.76.	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU.....	II-116
Tabel 2.77.	Jumlah Unit Usaha Formal Non Formal Menurut Kelompok Industri Tahun 2015.....	II-116
Tabel 2.78.	Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.Hsu Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010).....	II-119
Tabel 2.79.	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Di Kab. HSU.....	II-120
Tabel 2.80.	Rasio Ketergantungan Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	II-122
Tabel 2.81.	Analisis Capaian Jaringan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-123
Tabel 2.82.	Pelayanan Air Bersih Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-128
Tabel 2.83.	Kapasitas PLTD Panangkalaan.....	II-129
Tabel 2.84.	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-129
Tabel 2.85.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017.....	II-130
Tabel 3.1.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016(Rupiah).....	III-3
Tabel 3.2.	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016(Ribuan Rupiah).....	III-5
Tabel 3.3.	Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016(Ribuan Rupiah).....	III-7

Tabel 3.4.	Capaian Pendapatan Asli Daerah Kab. HSU Tahun 2012-2016.....	III-8
Tabel 3.5.	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-10
Tabel 3.6.	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-11
Tabel 3.7.	Belanja Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012 – 2016.....	III-13
Tabel 3.8.	Belanja Tidak Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012-2016.....	III-14
Tabel 3.9.	Belanja Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012-2016.....	III-15
Tabel 3.10.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kab. HSU Tahun Anggaran 2012-2016.....	III-17
Tabel 3.11.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012-2016.....	III-18
Tabel 3.12.	Proporsi Belanja Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012-2016 (%).....	III-19
Tabel 3.13.	Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012- 2016..	III-20
Tabel 3.14.	Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012-2016.....	III-27
Tabel 3.15.	Hasil Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012-2016.....	III-28
Tabel 3.16.	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016 (Jutaan Rupiah).....	III-30
Tabel 3.17.	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016 (Jutaan Rupiah).....	III-31
Tabel 3.18.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	III-32
Tabel 3.19.	SILPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	III-33
Tabel 3.20.	Persentase SILPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016 (Rupiah).....	III-34
Tabel 3.21.	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016 (Ribuan Rupiah).....	III-34
Tabel 3.22.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2014-2016 (Rp).....	III-35
Tabel 3.23.	Kerangka Pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2018-2022.....	III-37

Tabel 3.24.	Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2018-2022.....	III-40
Tabel 3.25.	Proyeksi/Perkiraan Kapasitas Riil Tahun Anggaran 2018-2022.....	III-43
Tabel 4.1.	Identifikasi Isu-isu Strategis.....	IV-35
Tabel 5.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.....	V-16
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kab. Hulu Sungai Utara.....	VI-38
Tabel 7.2.	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kab. HSU	VII-36
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017– 2022.....	VIII-1
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017–2022.....	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-5
Gambar 2.1.	Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-2
Gambar 2.2.	Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-3
Gambar 2.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014.....	II-9
Gambar 2.4.	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-12
Gambar 2.5.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-13
Gambar 2.6.	Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-14
Gambar 2.7.	Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017.....	II-22
Gambar 2.8.	Piramida Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016.....	II-25
Gambar 2.9.	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 -2017.....	II-35
Gambar 2.10.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2017.....	II-36
Gambar 2.11.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2012 – 2016.....	II-37
Gambar 2.12.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012– 2016.....	II-39
Gambar 2.13.	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	II-40
Gambar 2.14.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-41
Gambar 2.15.	Persentase Balita dengan gizi kurang dan buruk menurut BB/U Tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-42
Gambar 2.16.	Pencapaian cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2012 – 2016.....	II-43
Gambar 2.17.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat.....	II-47

Gambar 2.18.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat.....	II-48
Gambar 2.19.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	II-49
Gambar 2.20.	Persentase Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kab. HSU.....	II-50
Gambar 2.21.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI.....	II-51
Gambar 2.22.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTP/Sederajat.....	II-52
Gambar 2.23.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTA/Sederajat.....	II-53
Gambar 2.24.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat.....	II-54
Gambar 2.25.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat.....	II-54
Gambar 2.26.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat.....	II-55
Gambar 2.27.	Angka Putus Sekolah (%) Berdasar Kelompok Umur..	II-56
Gambar 2.28.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. HSU Tahun 2012-2017.....	II-59
Gambar 2.29.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kab. HSU.....	II-60
Gambar 2.30.	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kab. HSU...	II-61
Gambar 2.31.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2013 – 2017.....	II-64
Gambar 2.32.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2013 – 2017.....	II-65
Gambar 2.33.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013 -2017.....	II-65
Gambar 2.34.	Cakupan kunjungan bayi tahun 2013 -2017.....	II-66
Gambar 2.35.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Tahun 2013 -2017..	II-67
Gambar 2.36.	Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU Tahun 2013 – 2017.....	II-68
Gambar 2.37.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU Tahun 2013-2017.....	II-68

Gambar 2.38.	Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU Tahun 2013-2017.....	II-69
Gambar 2.39.	Diagram Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-70
Gambar 2.40.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2013-2017.....	II-95
Gambar 2.41.	Indeks Kriminalitas Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-121
Gambar 4.1	Pola Hubungan antara Permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Program Kegiatan.....	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan terdiri dari 3 (tiga) macam perencanaan berdasarkan masa lamanya perencanaan dari aspek waktu. Yang pertama adalah “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah” atau disingkat dengan RPJPD dengan masa perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun. Yang kedua adalah “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” (RPJMD) dengan masa perencanaan selama 5 (lima) tahun, dan yang ketiga adalah “Rencana Kerja Pemerintah Daerah” (RKPD) yang merupakan rencana tahunan daerah. Ketiga jenis perencanaan pembangunan daerah ini saling terkait dan terhubung. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari rencana yang termuat dalam RPJMD, sedangkan dokumen RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari RPJPD.

Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022 adalah acuan bagi penyusunan RKPD sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Sementara itu untuk menyusun RKPD tahun 2023 terkendala dengan ketiadaan dokumen RPJMD yang memuat perencanaan tahun 2023. Hal ini terjadi karena dokumen RPJMD sejalan dengan masa bakti kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mengingat masa bhakti kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan berakhir di bulan Oktober tahun 2022 ini maka dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022 ini juga berakhir periode tahunannya. Seyogyanya pasca pelantikan kepala daerah berikutnya baru dokumen RPJMD ini disusun dengan mengacu kepada visi dan misi kepala daerah yang baru.

Kekosongan dokumen RPJMD di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan daerah lainnya tidak terlepas dari pengaruh amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan demikian bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 maka akan terjadi kekosongan kepala daerah hingga dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilu kepala daerah tahun 2024. Jadi kepala daerah yang mengisi masa-masa transisi pemilihan kepala daerah baru ini akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi masing-masing daerah. Dalam hal ini untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara akan ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan nantinya.

Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah ini bagi daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, maka oleh Kementerian Dalam Negeri diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022”.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri ini diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang salah satunya adalah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

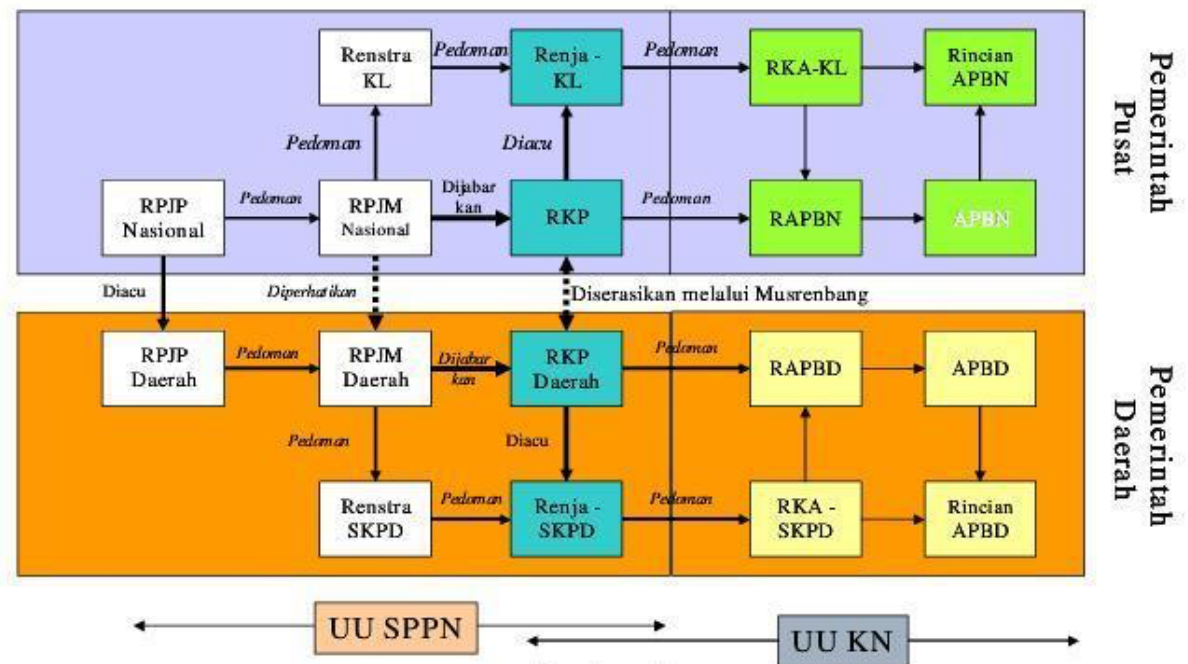
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 disusun sebagai pengganti dokumen RPJMD yang karena adanya kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang sehingga belum dapat disusun. Oleh karenanya peranan RPD Tahun 2023 – 2026 ini berfungsi layaknya dokumen RPJMD. Oleh karenanya kaitan dokumen RPD ini terhadap dokumen perencanaan lainnya serupa dengan dokumen RPJMD. Dengan demikian dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 ini juga merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Skema pola hubungan antara RPJMD dengan RPJMN termasuk pola penganggarannya sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1.

Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 dimaksudkan guna memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik sektor pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama untuk terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan serta pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun perencanaan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.
2. Menjabarkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 yang akan dicapai melalui serangkaian strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah periode tahun 2023 - 2026.
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 4 (empat) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian penyusunan dan penyelenggaraan forum konsultasi publik serta fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, dan perencanaan penganggaran Tahun 2023 - 2026.
5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan baik Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini memuat tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah;
- Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan;
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah. Bab ini memuat tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah;
- Bab V Tujuan dan Sasaran. Bab ini menyajikan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 – 2026;
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi;
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan;
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab ini menetapkan berbagai indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- Bab IX Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km². Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 196,78 km² atau 22,04% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 18,47 km² atau 2,07% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	147,55	16,53	-	16
2.	Babirik	71,93	8,06	-	23
3.	Sungai Pandan	61,10	6,84	-	33
4.	Amuntai Selatan	156,97	17,58	-	30
5.	Amuntai Tengah	84,72	9,49	5	24
6.	Banjang	109,56	12,27	-	20
7.	Amuntai Utara	37,84	4,24	-	26
8.	Haur Gading	37,97	4,25	-	18
9.	Sungai Tabukan	18,47	2,07	-	17
10	Paminggir	196,78	22,04	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2022

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 22,04%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 2,07%.

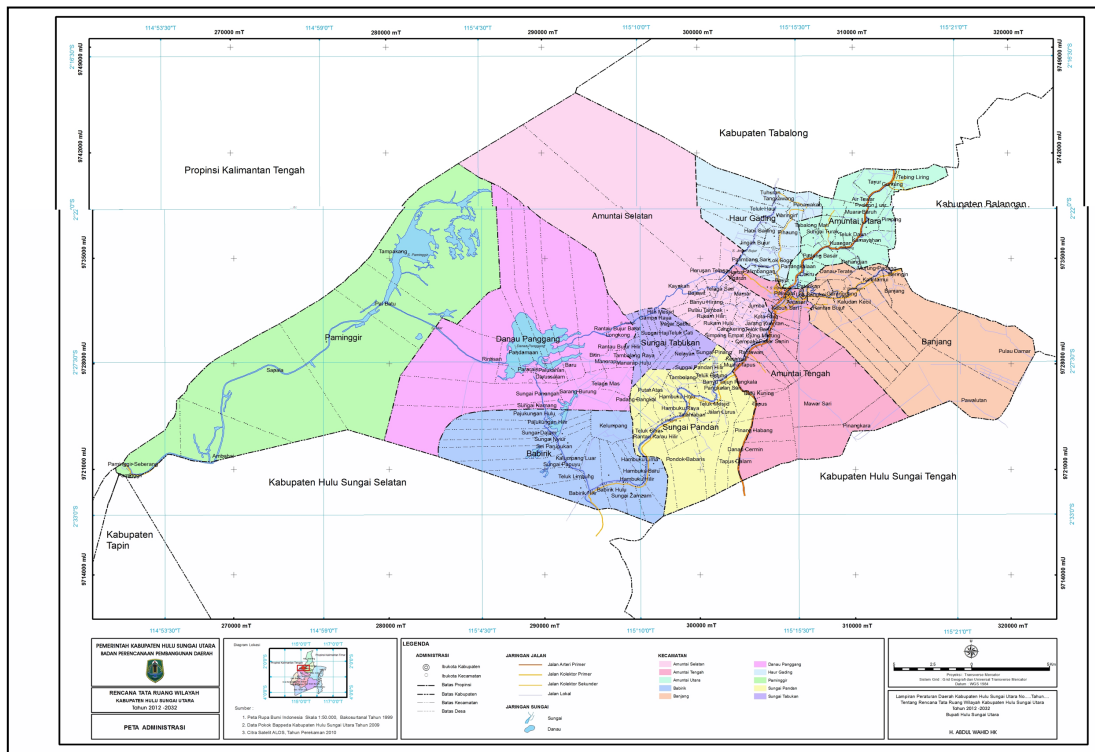
b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km² atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada gambar 2.1 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032.



Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara

c. Tofografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut (*dome*) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa *levee* dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol glei-humus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol glei-humus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha

(0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjar. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

d. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjar, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang

menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah :

- 1) Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit $\pm 350 \text{ m}^3/\text{detik}$ merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit $\pm 250 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $\pm 300 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- 2) Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (T_c) debit limpasan air hujan menuju titik *outlet* DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
- 3) Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba, bahan baku air bersih dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada $115^0 17'$ BT dan $02^0 17'$ LS sampai $115^0 26'$ LS dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar $11,43 \text{ km}^2$ dengan luas areal rawa di sekitar

Danau Panggang sebesar 57,02 km². Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa 0,2 – 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5 m – 1,5 m.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Sepanjang tahun 2016, kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami 219 kali hari hujan dengan jumlah curah hujan mencapai 4.300,8 mm. Rata-rata hari hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 18,25 hari dalam sebulan.

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai utara adalah 358,4 mm perbulan. Bulan dengan jumlah hari hujan paling sedikit adalah Bulan Agustus yang hanya 5 hari hujan. Bulan yang paling sering hujan adalah Bulan Desember yang mencapai 27 hari hujan. Untuk curah hujan terbesar ada pada Bulan Pebruari yang mencapai 659,5 mm. Jumlah curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

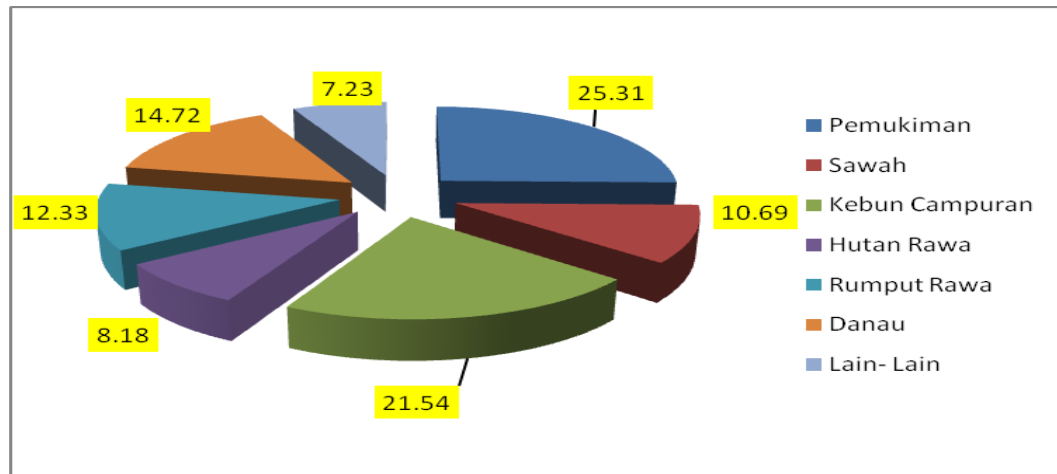
Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh)
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)					Hari Hujan (hh)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	239,53	256,7	187,7	390,5	279,5	14	16	15	28	22
Februari	209,75	310,8	118,5	409,7	659,5	13	15	11	26	22
Maret	305,48	176,7	308,1	293,3	610	17	13	17	23	19
April	290,82	298,6	227,1	428,9	441,5	18	14	16	19	20
Mei	113,25	232,9	151,5	133,90	294	7	13	13	12	17
Juni	106,48	68,4	134,2	130,9	279,5	8	8	9	17	13
Juli	63,58	179,6	57,6	30,9	214	7	13	5	10	16
Agustus	13,58	56,6	53,4	15,6	95	4	8	5	7	5
September	41,45	55	34,4	10	214	5	6	3	2	18
Oktober	96,6	80,7	44	40,00	214	17	8	6	6	18
November	163,16	206,5	185,2	240	587,5	18	13	12	21	22
Desember	355,28	300,8	279,2	278,8	412,3	25	15	18	23	27
Rata – rata	166,58	185	148,4	200,21	358,4	13	12	11	16	18,25

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka, Tahun 2013-2017

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa hutan rawa, disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah gambar penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 2.2.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014

Berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan

tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

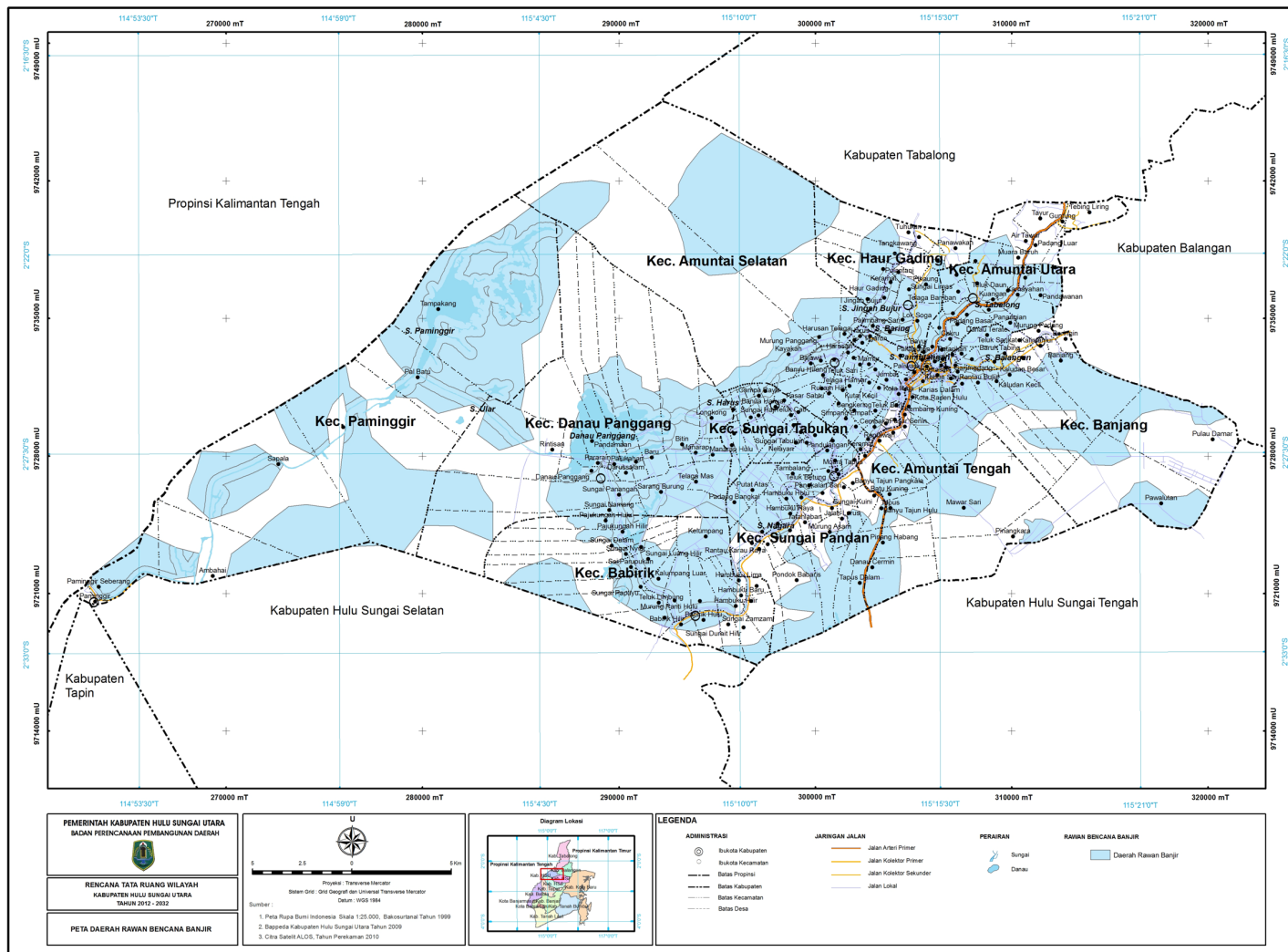
Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan Mesjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami' Besar di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjarang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

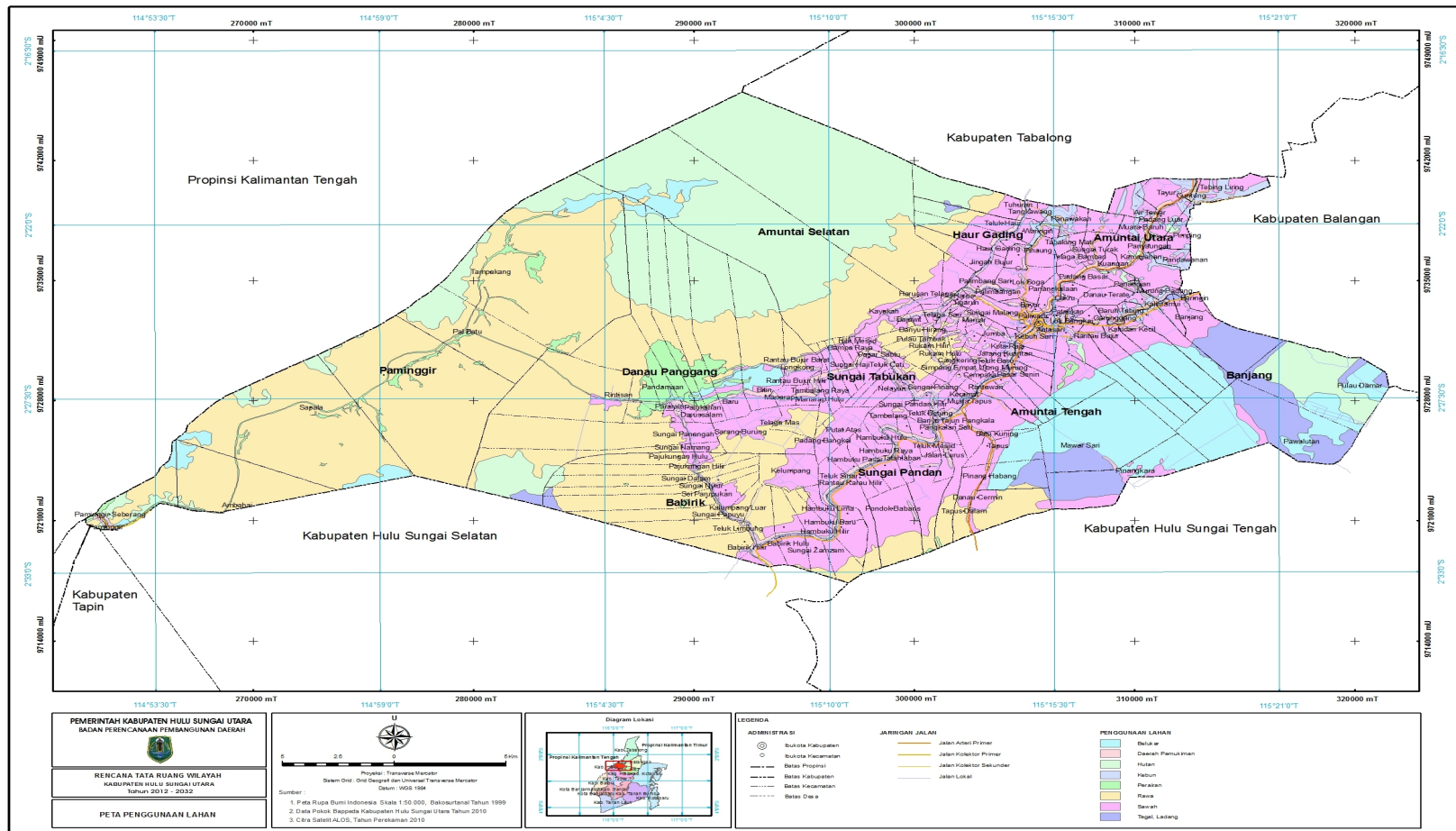
Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat. Secara rinci kawasan budidaya akan diuraikan pada potensi pengembangan wilayah (Sub Bab 2.1.2).

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

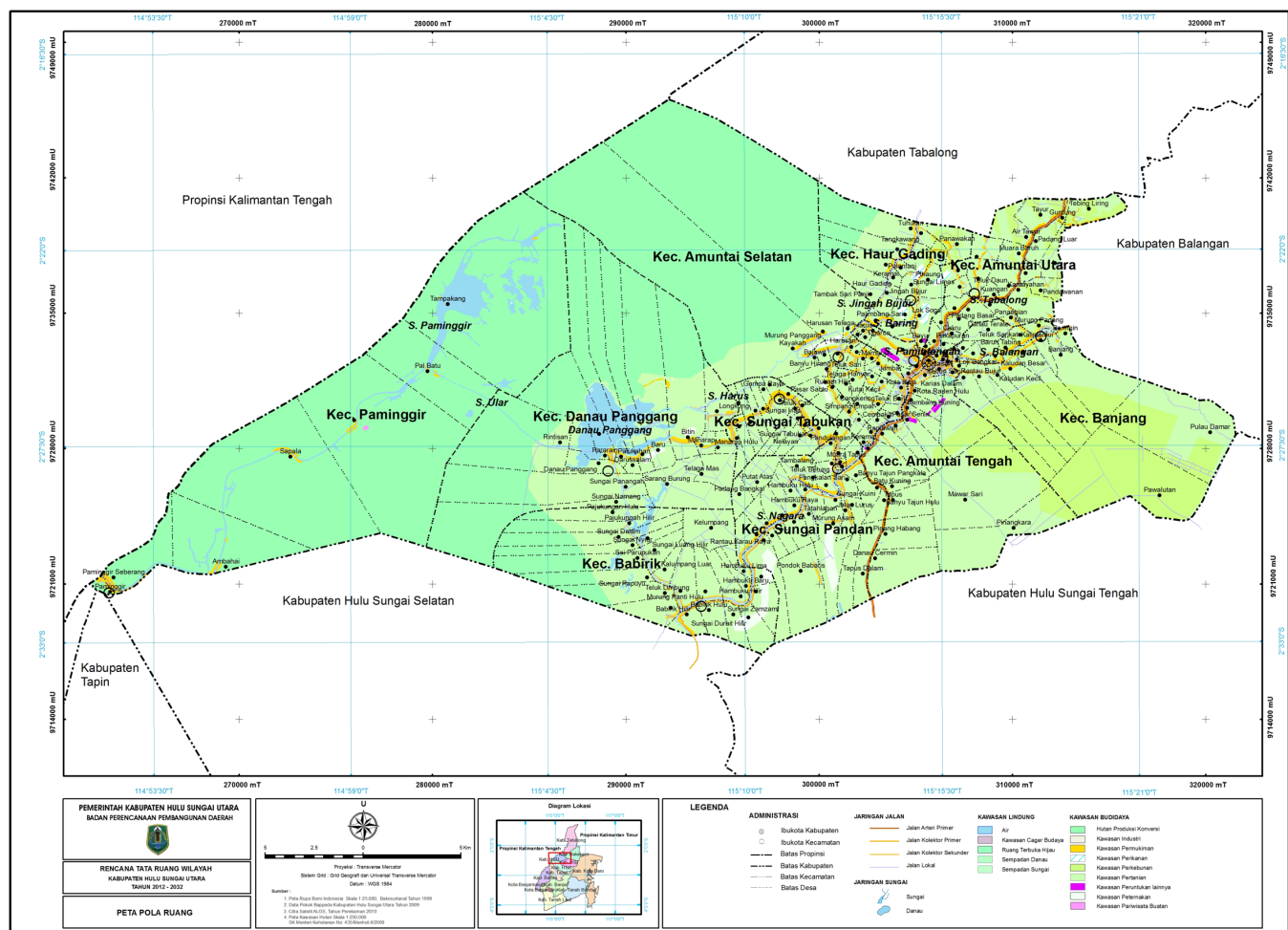


Gambar 2.3. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 2.5. Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun terus-menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan produksi yang dapat di konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh sebab itu, kawasan ini dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan melihat peluang berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan Amuntai Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 5.298 ha, Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan Sungai Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan Kecamatan Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 ha terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 ha dan Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 553 ha.

Optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak. Lokasinya tersebar di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunana rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi kawasan perkebunan kelapa

sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjang dan kecamatan Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutong, yang dinilai sesuai untuk dikembangkan di lahan rawa.

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang dan pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat perbibitan ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan; pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan sentra produksi telur dan pembesaran Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kecamatan kecuali paminggir.

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus (*Channa striata*), toman (*Channa micropeltes*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*) dan betok (*Anabas testudineus*).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana pengembangan daerah

reservaat perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha.

Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dan tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai – sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian provinsi berupa sentra industri Amuntai yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang di alokasikan seluas kurang lebih 33 ha. Kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan di Desa Banyu Hiran (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai seluas kurang lebih 8 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, dan kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 ha, serta Kawasan industri rumah tangga kerajinan Mebel

Alumunium di Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan seluas kurang lebih 5 ha

Untuk pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi peninggalan sejarah yang layak untuk dikembangkan, disamping kemungkinan pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya. Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan obyek – obyek wisata yang ada serta pemanfaatan rawa sebagai potensi obyek pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata pada RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan seluas kurang lebih 10 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya (kawasan Candi Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan pariwisata buatan yang direncanakan adalah (a) pengembangan kawasan peruntukan pariwisata provinsi berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang; (b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 ha; dan (c) wisata belanja kerajinan rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu perlu pengembangan jalur wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong di sebelah utara serta dua sungai lainnya yaitu Sungai Pamintangan dan Sungai Negara. Dengan adanya sungai besar yang mengelilingi dan elevasi kawasan yang tidak terlalu tinggi (sebagian besar kelerengannya 0 - 2%), maka wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar berpotensi banjir.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas

kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

2.1.4. Kondisi Demografi

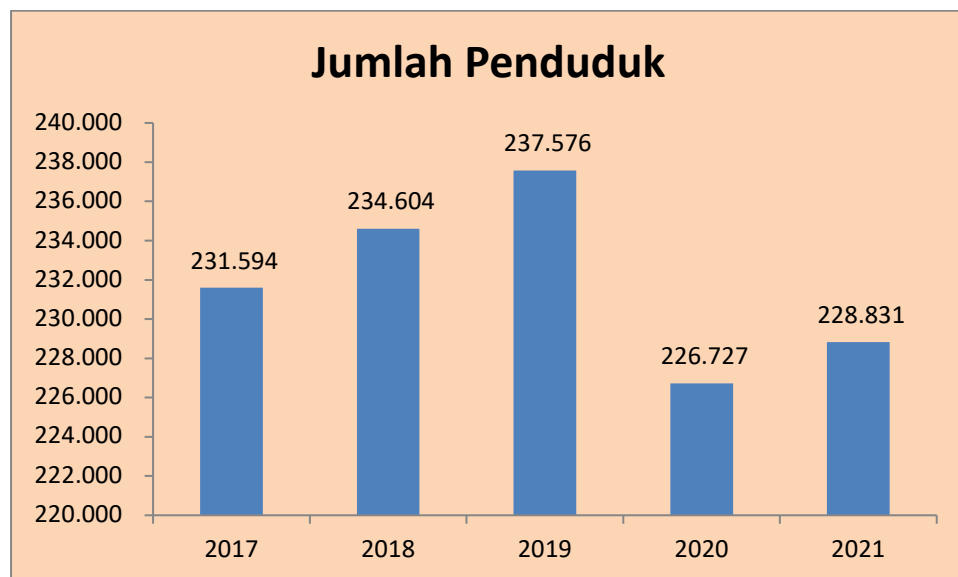
Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 sebanyak 228.831 jiwa dengan proporsi laki-laki 49,91% dan perempuan 50,09% dengan persebaran masing-masing kecamatan seperti pada tabel dibawah. Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu kecamatan Amuntai Tengah dan yang paling sedikit di kecamatan Paminggir.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Danau Panggang	10.400	10.234	20.634	101.62
2	Paminggir	4.072	4.002	8.074	101.75
3	B a b i r i k	9.851	9.737	19.588	101.17
4	Sungai Pandan	13.801	14.051	27.852	98.22
5	Sungai Tabukan	7.478	7.474	14.952	100,05
6	Amuntai Selatan	15.378	15.201	30.579	101.16
7	Amuntai Tengah	25.343	25.601	50.944	98,99
8	B a n j a n g	9.596	9.386	18.982	102.23
9	Amuntai Utara	10.118	10.475	20.593	96,59
10	Haur Gading	8.174	8.459	16.633	96.63
	Jumlah	114.211	114.620	228.831	99.71

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2022

Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara 2017 – 2021

Gambar 2.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi dari tahun 2017-2019 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2020 dan kembali bertambah pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dilaksanakan sensus penduduk, sehingga jumlah penduduk yang terdata merupakan jumlah riil di lapangan, sedangkan pada empat tahun sebelumnya jumlah penduduk didasarkan pada perkiraan secara statistik. Adapun untuk Laju Pertumbuhan penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara dapat terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020 ke 2021)
1	Danau Panggang	20.634	0,44
2	Paminggir	8.074	0,69
3	B a b i r i k	19.588	0,72
4	Sungai Pandan	27.852	0,58
5	Sungai Tabukan	14.952	0,63
6	Amuntai Selatan	30.579	1,06
7	Amuntai Tengah	50.944	0,50
8	B a n j a n g	18.982	1,16
9	Amuntai Utara	20.593	0,30
10	Haur Gading	16.633	1,16
	Hulu Sungai Utara	228.831	0,70

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2022

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memperlihatkan bahwa terdapat empat kecamatan yang angka laju pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Kecamatan Babirik, Amuntai Selatan, Banjang dan haurgading. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjang dan haurgading, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Amuntai Utara.

Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 sebesar 256 jiwa/km², dimana kecamatan terpadat adalah Kecamatan Amuntai Tengah dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Paminggir seperti pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	LUAS (km2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN RATA-RATA
1	Danau Panggang	16	147,55	20.634	140
2	Paminggir	7	196,78	8.074	41
3	B a b i r i k	23	71,93	19.588	272
4	Sungai Pandan	33	61,10	27.852	456
5	Sungai Tabukan	17	18,47	14.952	810
6	Amuntai Selatan	30	156,97	30.579	195
7	Amuntai Tengah	24	84,72	50.944	601
8	B a n j a n g	20	109,56	18.982	173
9	Amuntai Utara	26	37,84	20.593	544
10	Haur Gading	18	37,97	16.633	438
	Jumlah	219	892.70	228.831	256

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	10.466	9.908	20.374
5-9	10.822	10.372	21.194
10-14	9.872	9.393	19.265
15-19	10.055	9.467	19.522
20-24	9.970	9.017	18.987
25-29	9.879	8.944	18.823
30-34	9.446	9.087	18.533
35-39	8.328	8.274	16.602
40-44	7.836	7.968	15.804
45-49	7.210	7.629	14.839
50-54	6.217	6.665	12.882
55-59	5.215	5.780	10.995
60-64	3.906	4.642	8.548
65-69	2.809	3.501	6.310
70-74	1.274	2.126	3.400
75 +	906	1.847	2.753
Jumlah	114.211	114.620	228.831

Dilihat dari struktur penduduk, Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum digolongkan ke dalam golongan “penduduk muda”. Hal ini dapat dilihat dimana jumlah penduduk pada umur 0- 39 jumlahnya cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6.

2.2

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditinjau dari sisi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum ditinjau dari kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi didasarkan atas indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, gini ratio, dan laju inflasi.

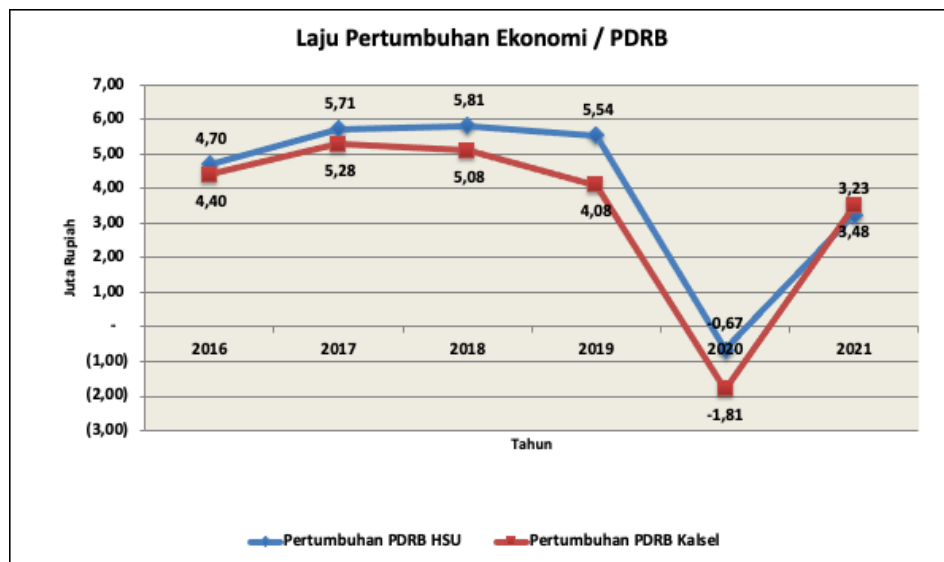
a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan kebijakan yang menyebabkan meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga

dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung menurut harga tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan saat ini adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Dengan demikian, PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan konstan. Berikut data pertumbuhan ekonomi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 10 Tahun terakhir.



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2011 – 2021

Gambar 2.7.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 – 2021

Dari tabel di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama enam tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terlihat meningkat dari tahun 2016-2018 dan mengalami perlambatan pada tahun 2019. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.67%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua Kab/Kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021 perekonomian kembali tumbuh hingga menjadi 3,23. Secara keseluruhan tren ini hampir sama dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kebijakan ke depan pada tahun 2023 perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di sektor primer, sekunder maupun tersier, berikut nilai tambahnya dan pemerataannya. Program-program yang bersentuhan untuk peningkatan produksi dan nilai tambah produk perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.

b. Pendapatan PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita didefinisikan sebagai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan perkapita sebesar 11,68%.

Tabel 2.7.
Pendapatan Perkapita Kab. HSU Tahun 2013-2020

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)
2013	12.700.270
2014	14.154.930
2015	15.810.730
2016	16.916.800
2017	18.093.640
2018	19.496.020
2019	20.797.810
2020	20.648.740

Sumber : BPS HSU Tahun 2021

Dari tabel terlihat peningkatan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2020 karena kondisi pandemic Covid 19. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang perekonomian berjalan dengan baik walaupun pada kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu. Konsistensi ini perlu dijaga terus agar selalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya berkisar antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna, dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014 berada pada ketimpangan rendah, karena nilainya kurang dari 0,3. Selanjutnya terjadi kenaikan tahun 2015 dengan nilai 0,36 dan pada tahun 2019 dengan nilai 0,319 (ketimpangan sedang). Untuk itu perlu penajaman program/kegiatan yang tepat sasaran kepada masyarakat HSU yang masuk pada tingkat kesejahteraan 30 persen terendah. Langkah-langkah strategis harus segera diambil agar pembangunan merata pada setiap masyarakat dengan program/kegiatan benar-benar *pro poor* dan pro terhadap pemerataan pembangunan.

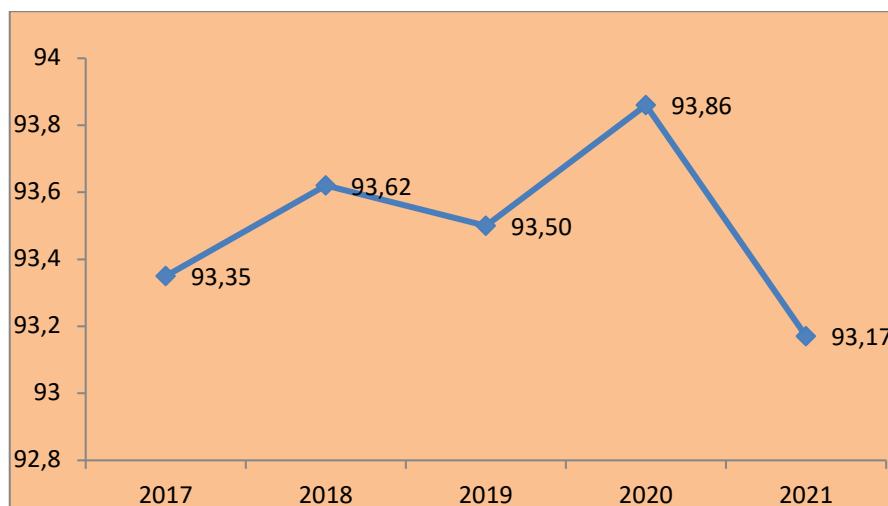
Tabel 2.8.
Perbandingan Indeks Gini Kab. HSU dan Prov. Kalsel

TAHUN	HSU	KALSEL
2012	0,29	0,38
2013	0,24	0,34
2014	0,26	0,33
2015	0,36	0,35
2016	0,32	0,35
2017	0,309	0,347
2018	0,325	0,344
2019	0,325	0,334
2020	0,319	0,332

Catatan : Angka Gini Rasio $< 0,3$ berarti ketimpangan rendah
 Angka Gini Rasio $0,3 \leq G \leq 0,5$ berarti ketimpangan sedang
 Angka Gini Rasio $> 0,5$ berarti ketimpangan tinggi

d. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

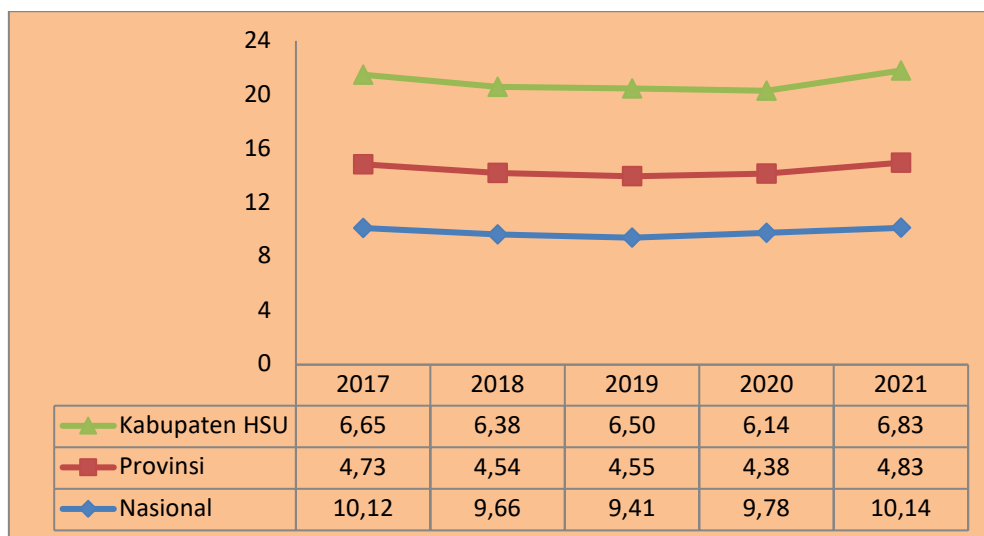
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.



Sumber : BPS 2017-2021, diolah

Gambar 2.8.
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 -2021

Persentase Penduduk miskin dan Grafik Persentase penduduk diatas garis kemiskinan selalu berhubungan satu sama lainnya, yaitu saling mempengaruhi. Jika Persentase penduduk miskin trennya menurun maka tren persentase penduduk diatas garis kemiskinan grafiknya naik dan sebaliknya jika tren persentase penduduk miskin naik maka grafik persentase penduduk diatas garis kemiskinan menurun, atau bisa juga dikatakan saling berbanding terbalik antara penduduk miskin dan penduduk diatas garis kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017 sampai tahun 2021 secara umum berfluktuasi. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

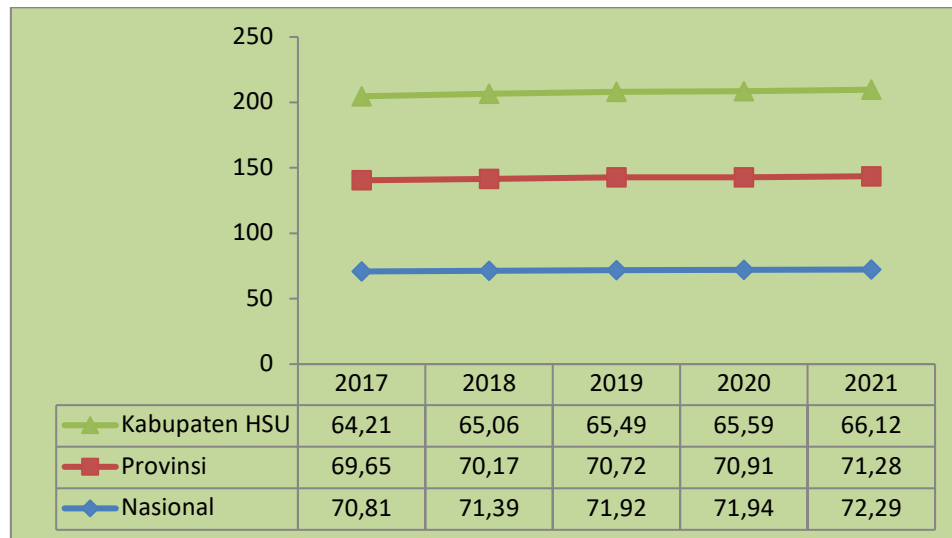
Gambar 2.9.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan yang sama. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Nasional mengalami kenaikan.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami

perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.10.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan, dimana pada periode tersebut IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat sebesar 1,91%. Kemajuan pembangunan manusia di tiga Kabupaten tersebut di dorong terutama oleh dimensi Pendidikan

Tabel 2.11.

Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (000)	IPM
2017	62,94	12,82	7,19	9.100	64,21
2018	63,24	12,83	7,36	9.567	65,06
2019	63,58	12,88	7,37	9,772	65,49
2020	63,83	12,91	7,53	9.527	65,59
2021	64,10	12,92	7,75	9,644	66,12

Sumber : BPS HSU, 2022

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

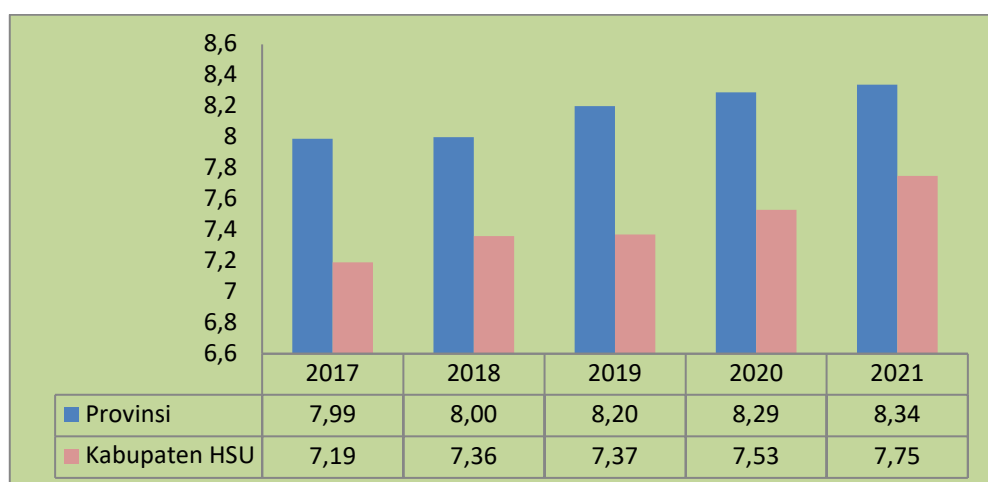
Pada Fokus Kesejahteraan Sosial ini diukur dan dianalisis sejumlah indikator yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

a. Rata-rata lama sekolah (*Average Years School*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar berikut :



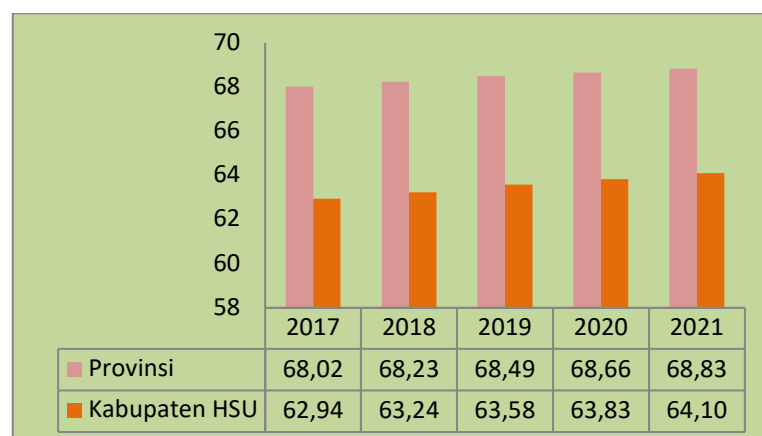
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.11.
Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariasi. Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Angka rata-rata lama sekolah 7,75 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8.

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada gambar berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

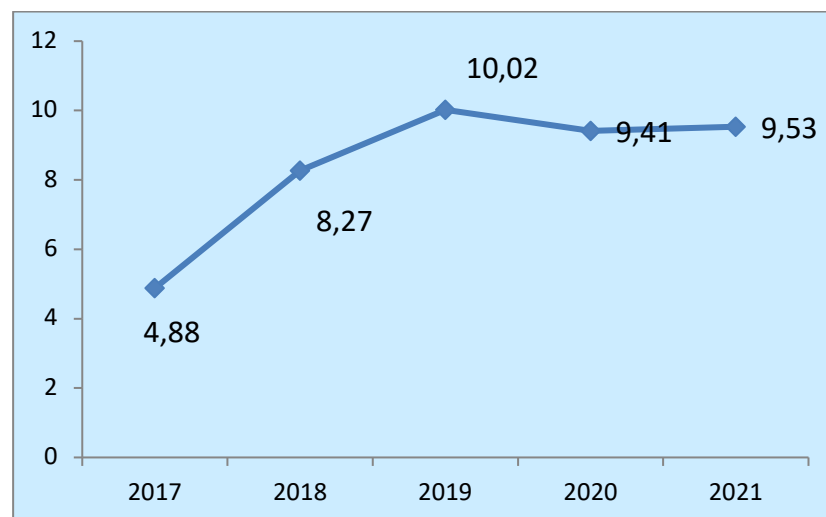
Gambar 2.12.
Angka Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

c. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Prevalensi gizi buruk adalah gabungan dari balita kurus dan sangat kurus. Berikut prevalensi gizi buruk (BB/U) untuk tahun 2017 -2021 pada anak balita.



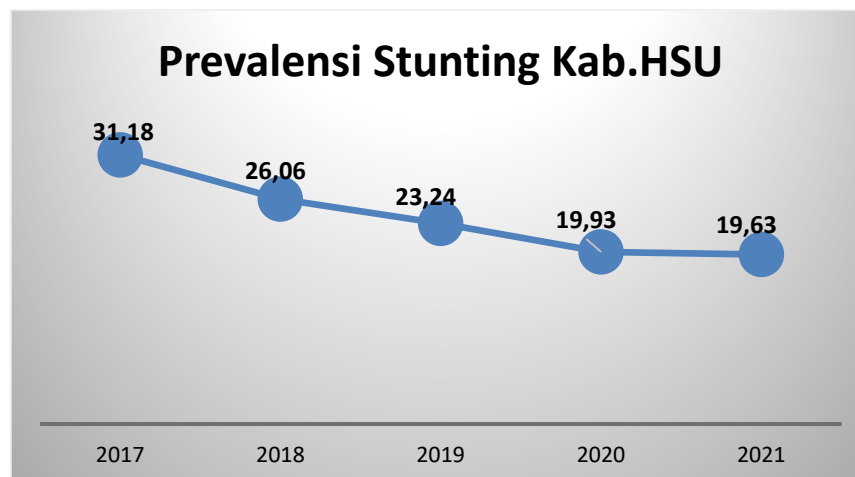
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.13.
Prevalensi Gizi Buruk menurut BB/U di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan pengukuran gizi balita dari hasil penimbangan menurut BB/U hingga akhir tahun 2021 balita yang kurus dan sangat kurus sebesar 9,53%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi gizi anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum begitu membaik, oleh karena itu perlu upaya keras untuk penurunan indikator ini dengan melibatkan lintas sektor terkait.

d. Prevalensi Balita Pendek dan sangat pendek (Stunting)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.



Gambar 2.14.
Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Kab. HSU

Berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir (2017-2021) prevalensi Balita Stunting cenderung mengalami penurunan. Tren

penurunan prevalensi stunting di Kabupaten HSU didukung oleh berbagai kebijakan dan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait. Intervensi spesifik merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran kesehatan, sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektor atau konvergensi melalui kelembagaan aksi terintegrasi konvergensi percepatan penurunan stunting (KP2S).

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Yang Bekerja

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Dari tabel tersebut terlihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar (0,2 %) dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2.10.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2020

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
1	TPT	2.72	3.37	3.14	4,11	3,91	3,48	4,49
2	TPAK	73.29	75.05	70.98	71,58	69,97	68,43	70,08
3	Persentase Penduduk Yang Bekerja	97,28	96,63	96,86	95,99	96,09	96,52	95,51

Sumber: BPS Kab. HSU

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan

seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, Tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi, dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2013-2020, dimana tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan sebesar (1,65 %). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja dan mencari kerja cukup tinggi dan masih ada penduduk pada usia kerja yang tidak bekerja.

f. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun jenis opini BPK antara lain :

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
3. Tidak wajar (*Adversed opinion*)
4. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Pada tahun 2017 sampai 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP), yaitu opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,

pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan :

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi

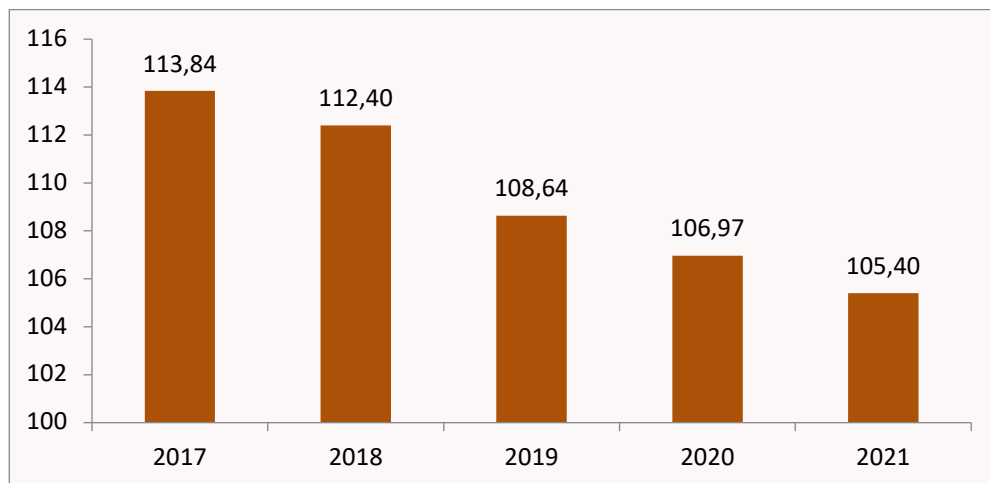
Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

▪ Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2021

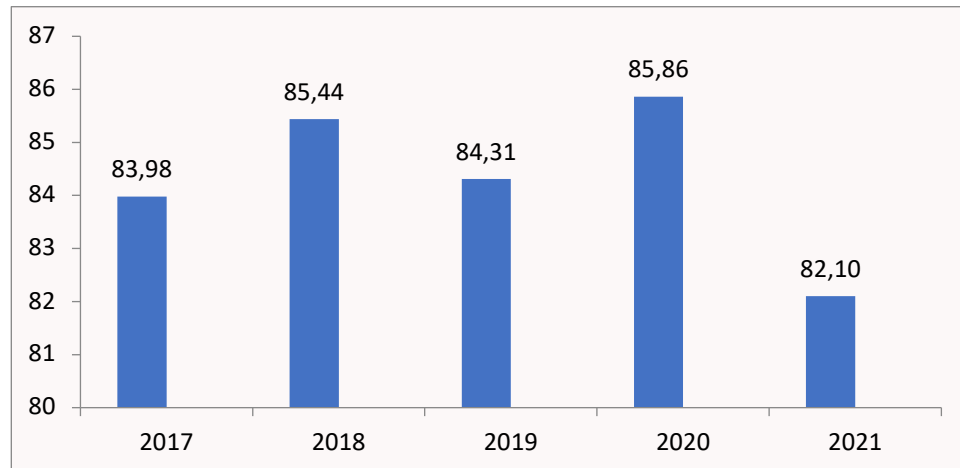
Gambar 2.15.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat

Ke depannya diharapkan APK mendekati atau sama dengan APM sehingga dikatakan ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100

persen dapat diduga penyebabnya adalah banyaknya anak usia SD yang sekolah tidak sesuai umurnya (terlalu muda/tua).

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat (13 – 15 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



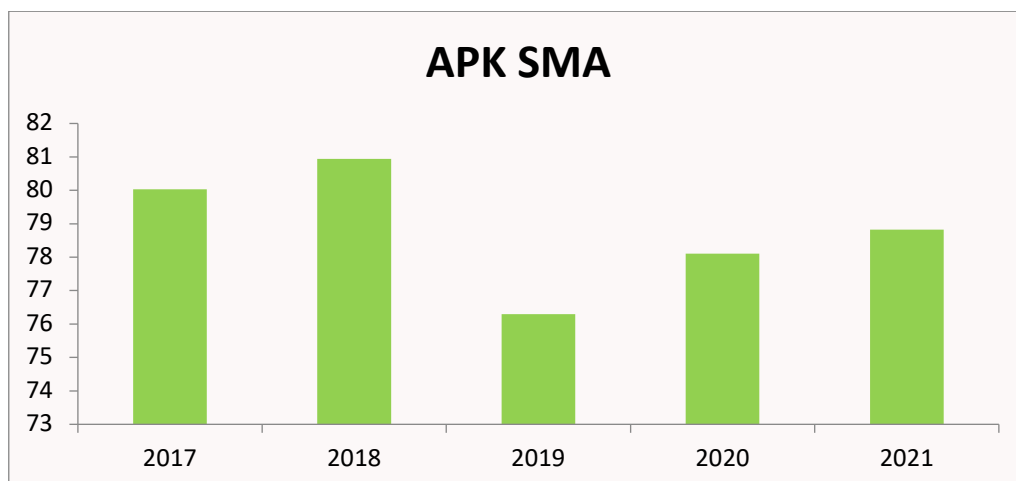
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2021

Gambar 2.16.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/ Sederajat

Angka partisipasi Kasar tingkat SLTP dari tahun ke tahun berfluktuatif. Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi penurunan APK. Hal ini terjadi dikarenakan aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 2.17.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara

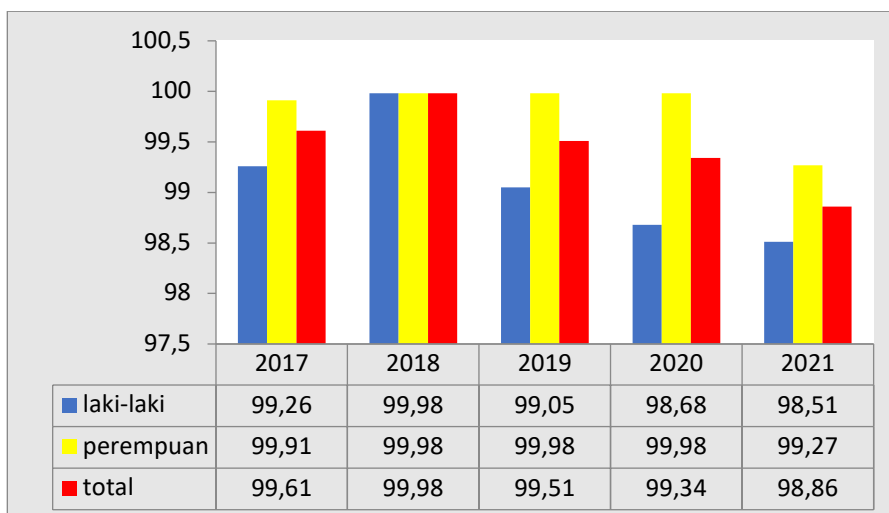
Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu fluktuatif. Permasalahannya juga hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu aksesibilitas menuju ke sekolah yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, atau faktor ekonomi keluarga.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017–2022 dapat dilihat pada Gambar berikut :

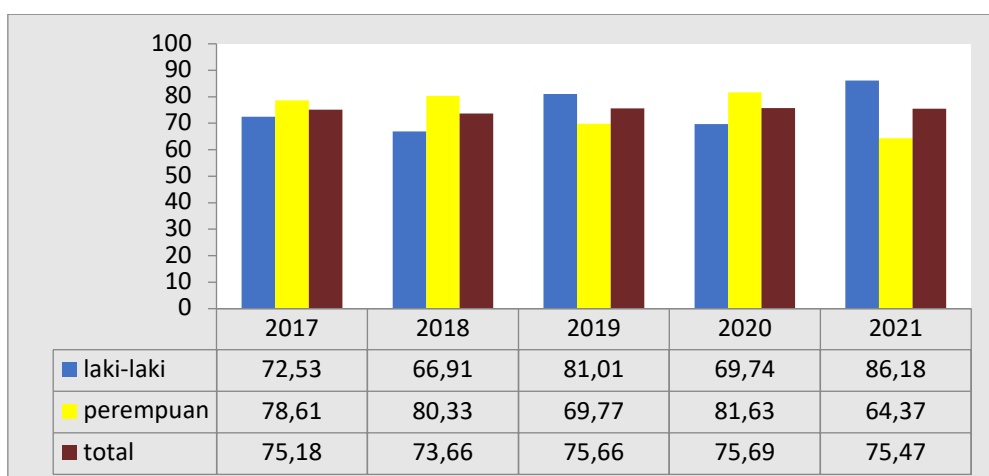


Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Secara garis besar selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 APM SD/MI terjadi fluktuasi. Jika dilihat berdasar jenis kelamin diketahui APM SD/ sederajat Perempuan terus mengalami dibandingkan dengan angka partisipasi murni dari peserta didik laki-laki.

▪ Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

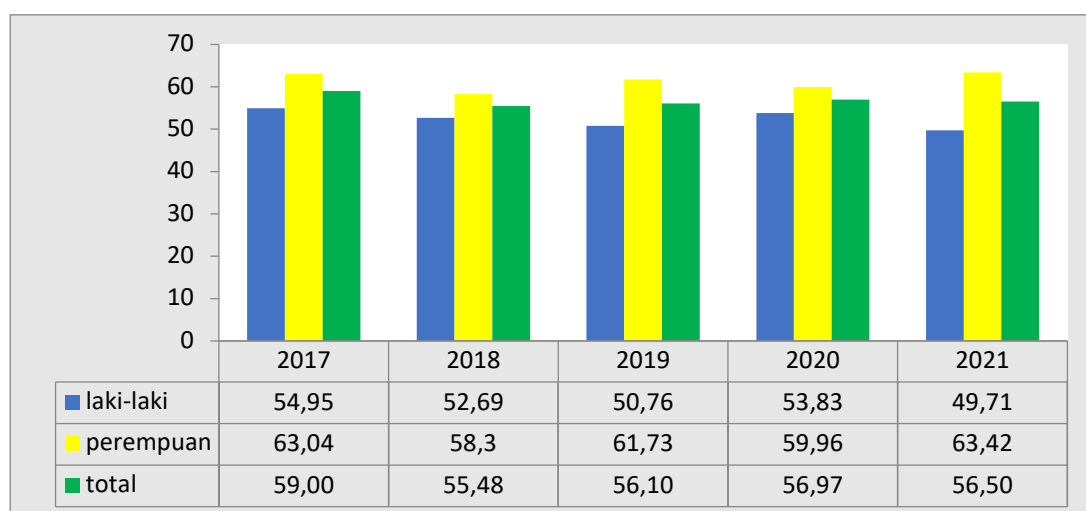
Gambar 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/ Sederajat

Dari gambar diatas diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat cenderung mengalami penurunan walaupun jika dilihat dalam periode lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,29%.

Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat dari Tahun 2017 ada perbedaan pencapaian yang signifikan antara anak laki-laki dengan anak Perempuan, dimana semula minat belajar pada anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki tetapi pada tahun 2021 partisipasi murni anak laki-laki lebih tinggi.

▪ Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Dari gambar dibawah diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Secara umum jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan Angka Partisipasi Murni untuk SMA/MA/ sederajat untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,50%.



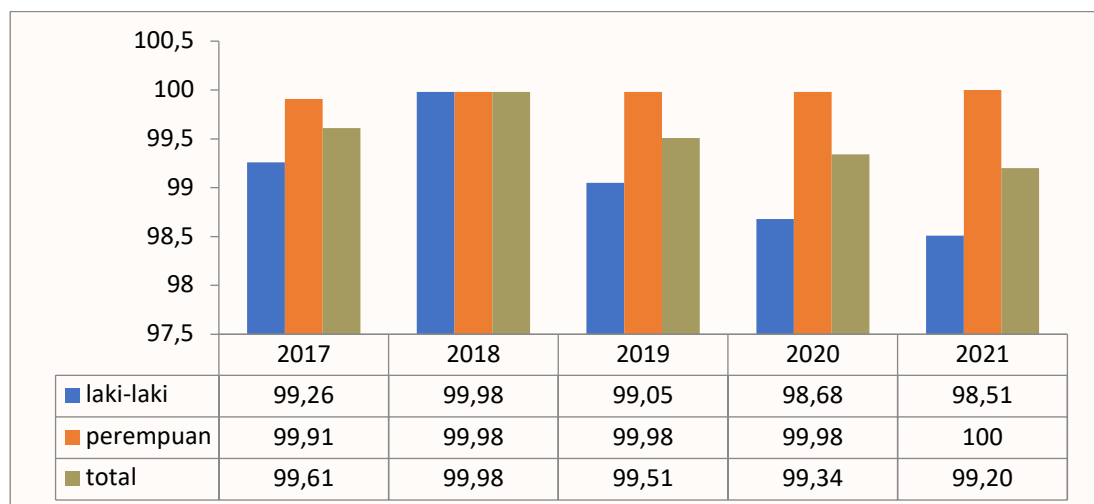
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.20.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat

Rendahnya APM SLTA/ sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih kurangnya jumlah sekolah tingkat SLTA/ sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama. APS SD/ sederajat (7–12 Tahun) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2021 partisipasi sekolah anak perempuan sudah mencapai 100% hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

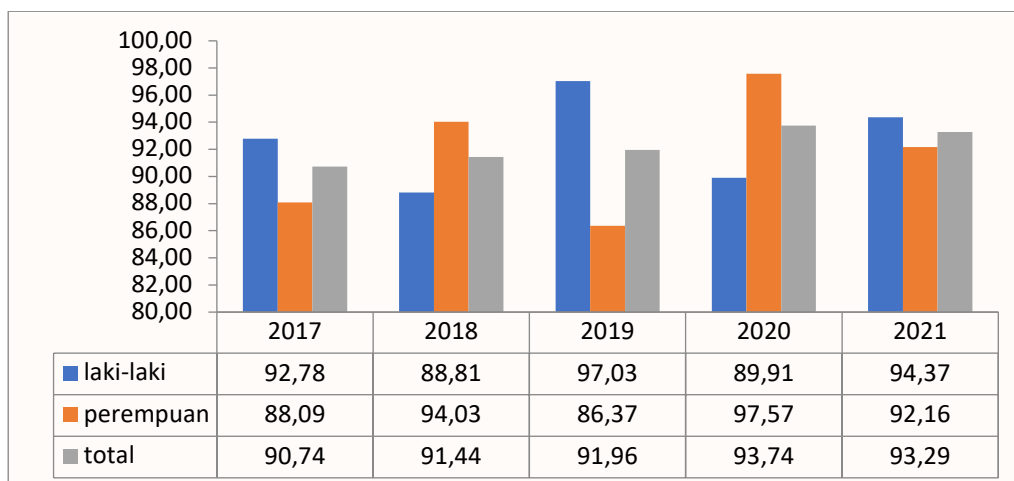


Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Gambar 2.21.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/ Sederajat

▪ Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)

APS SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 –2022 dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk APS tingkat SMP/MTs terjadi fluktuasi dimana jika dilihat secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 2,55%

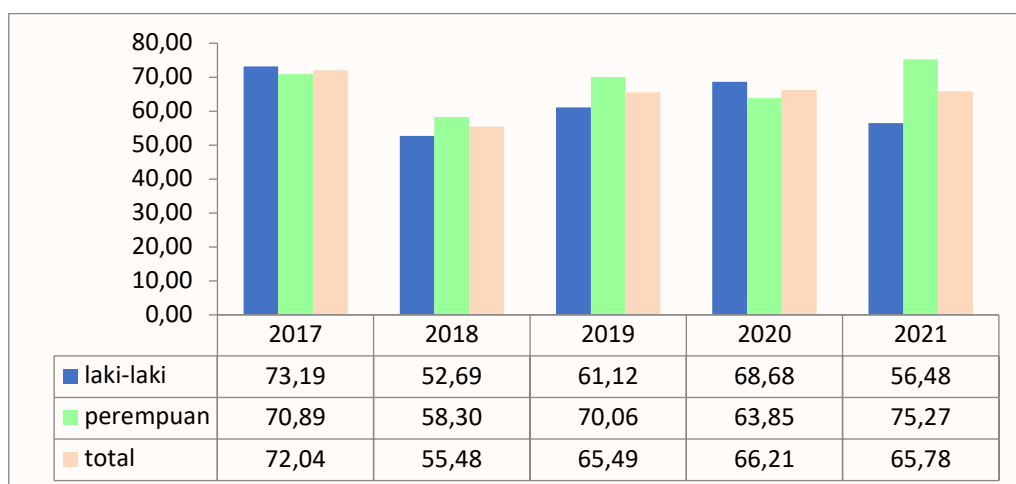


Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 2.22.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat

▪ Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Gambar 2.23.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah

sampai dengan SMA/MA/SMK masih sebesar 34,22 %. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indeks pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variabel untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula .

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK masih sebesar 34,22 %. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indeks pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variabel untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula.

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.11.
Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid , Sekolah Tahun 2017 – 2021

Tahun	Sekolah (unit)	Murid (orang)	Guru (orang)	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio Sekolah terhadap Jumlah Murid
Tingkat Sekolah Dasar					
2017	265	24.947	2.970	1190,52	106,23
2018	265	24.967	2.928	1172,75	106,14
2019	267	24.692	2.945	1192,69	108,13
2020	267	24.269	2.882	1187,52	110,02
2021					
Tingkat Sekolah Menengah Pertama					
2017	62	10.254	935	911,84	60,46
2018	61	10.773	1.016	943,10	56,62
2019	65	10.408	1.033	992,51	62,45
2020	65	10.300	954	926,21	63,11
2021					
Tingkat Sekolah Menengah Atas					
2017	31	8.781	862	981,66	35,30
2018	31	9.225	862	934,42	33,60
2019	32	9.545	761	797,28	33,53
2020	34	9.643	770	798,51	35,26
2021					

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara, 2022

Berdasarkan tabel terlihat bahwa rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sedangkan jumlah gedung sekolah tidak terjadi peningkatan/tetap namun di tahun 2018 rasio ketersediaan gedung mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah SD/MI .

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs dari tahun 2017-2021 terjadi fluktuasi dikarenakan peningkatan/penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs. Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK terjadi penurunan, hal ini terjadi karena

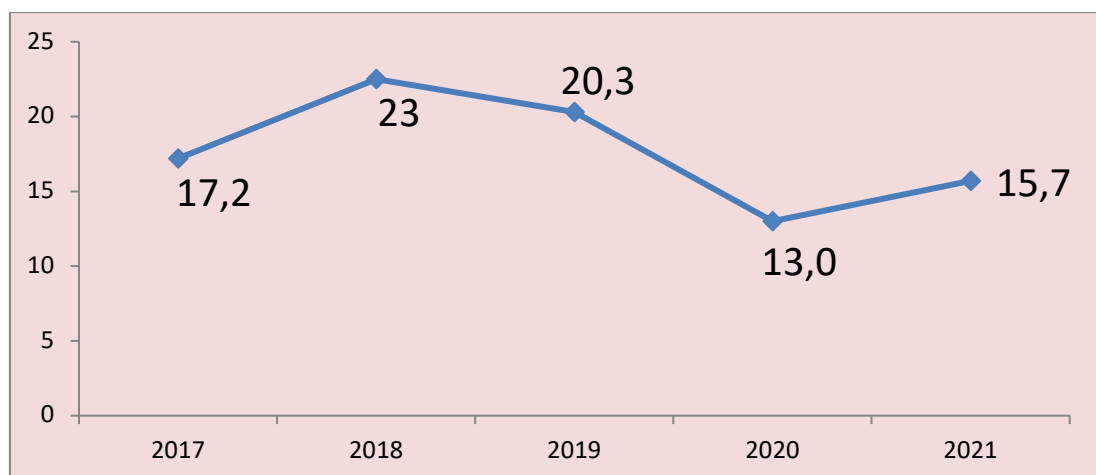
jumlah sekolah tetap sedangkan jumlah penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan.

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada table di atas.

b. Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Dari Gambar 2.20, diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2017 sampai 2021 berfluktuasi dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan. Dari Gambar diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2017 sampai Nopember 2021 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.

Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan, agar dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yaitu dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.12.
Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017–2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
3	Jumlah Pustu	30	30	29	30	30
4	Jumlah Poskesdes	120	125	128	136	135
5	Jumlah Polindes	3	4	2	2	2
6	Jumlah Posyandu	254	258	329	329	317
7	Jumlah Penduduk	231.594	234.604	237.573	226.727	228.831
8	Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk	0,0086	0,0085	0,0084	0,0088	0,0087
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,20	0,18	0,18	2,01	0,19
10	Rasio Poskesdes terhadap penduduk	0,52	0,53	0,54	0,59	0,59
11	Rasio Polindes terhadap penduduk	0,0129	0,017	0,0084	0,0088	0,0087
12	Rasio Posyandu thd Balita	11,82	15,01	19,66	21,58	21,43

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017-2021 berjumlah 2 (dua) buah dimana 1 (satu) buah rumah sakit merupakan rumah sakit milik pemerintah yang nantinya diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan lintas daerah dan 1 (satu) buah rumah sakit milik swasta. Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2017–2021 sebanyak 13 buah yang terdiri dari 2 (dua) buah Puskesmas Rawat Inap yang terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Sungai Pandan serta 9 (buah) Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2017-2021 cenderung tetap namun fungsi polindes ditingkatkan menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 120 buah tahun 2017 menjadi 135 buah tahun 2021. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki Poskesdes.

Tenaga Kesehatan

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

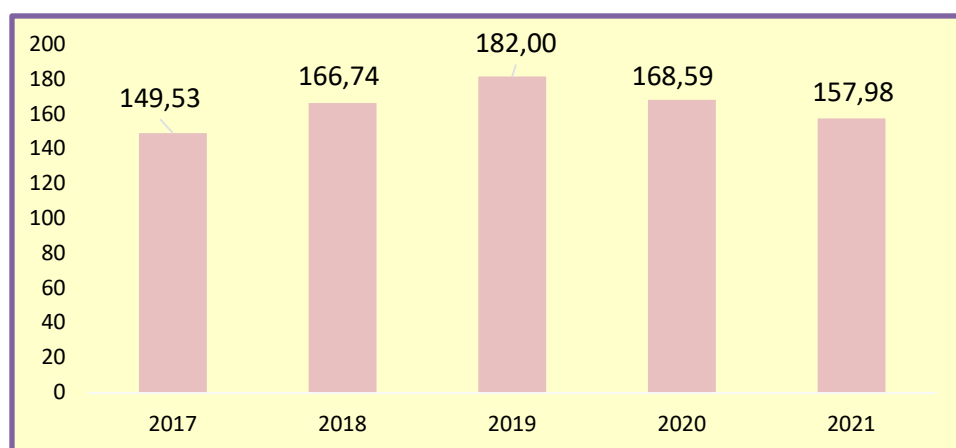
Tabel 2.13.
Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	28	19	30	37	37
2	Jumlah Tenaga Medis	33	42	49	61	69
3	Jumlah Tenaga Paramedis	535	515	591	613	585
4	Jumlah Penduduk	231.594	234.604	237.573	226.727	228.831
5	Rasio Dokter persatuan Penduduk	0,121	0,81	0,126	0,163	0,161
6	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	0,14	0,18	0,21	0,26	0,30
7	Rasio Tenaga Paramedis Persatuan Penduduk	2,31	2,22	2,49	2,70	2,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tahun 2021 dicapai realisasi 157,98%, Artinya penanganan komplikasi obstetri sudah dilaksanakan dengan baik, tapi harus diwaspadai karena tingginya kasus komplikasi akan lebih rentan terjadinya kematian. Sehingga diharapkan deteksi secara dini bisa dilaksanakan dan ditangani sehingga tidak terjadi kasus komplikasi. Untuk pencapaian hasil cakupan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2022

Gambar 2.25.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017 - 2021

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Di beberapa Puskesmas masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung. Capaian yang di bawah target ini juga dipengaruhi oleh sasaran baru dari Pusdatin yang angkanya cukup tinggi dibandingkan sebelumnya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara Bidan dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan, program Jampersal Daerah, pemantapan Puskesmas PONED dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas. Ke depannya pertolongan persalinan bukan hanya ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten tapi juga dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Poskesdes, Klinik Bersalin/ Rumah Bidan dan RS.

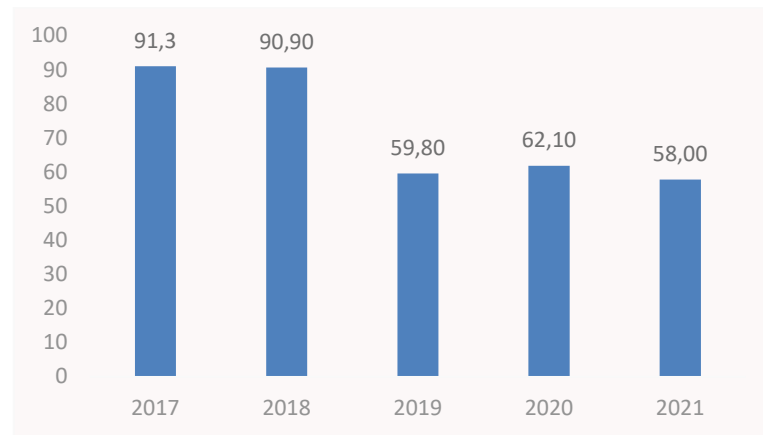


Gambar 2.26.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Tahun 2021 terjadi penurunan UCI sebesar 58%, dari tahun 2017 (91,30), Desa UCI yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata di Desa/Kelurahan. Diperlukan optimalisasi promosi kesehatan, masih adanya sebagian kecil reaksi penolakan di masyarakat terhadap imunisasi,

pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum optimal di beberapa Puskesmas dan pelebagaan PWS serta adanya kendala pandemi Covid19.



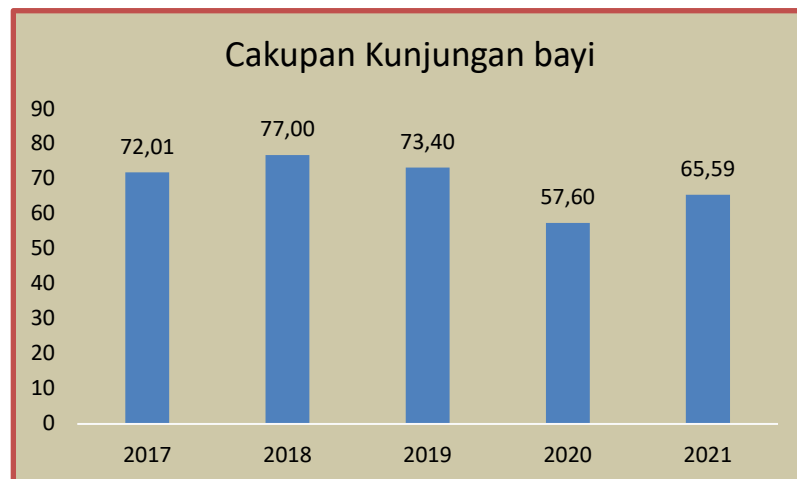
Gambar 2.27.
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan jaringannya serta di RSUD Pambalah Batung Amuntai merupakan pelayanan rujukan ke Provinsi, kerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum Banjarmasin serta RSUD Anshari Saleh Banjarmasin dengan tempat tidur kelas III. Setiap Peserta rujukan yang terdaftar akan dilayani, setiap tahunnya 100% pasien rujukan terlayani.

Cakupan kunjungan bayi

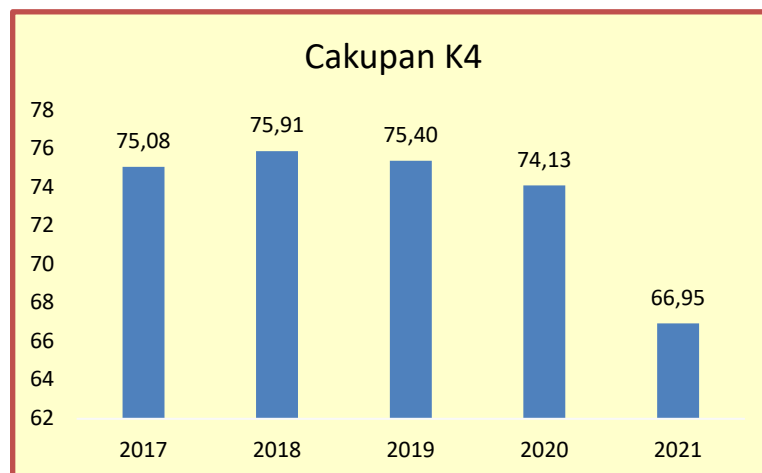
Kunjungan bayi pada tahun 2021 sebesar 65,59%, terjadi penurunan dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 72%. Kendala pelaksanaan kunjungan bayi adalah pada pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) yang harus dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. Oleh sebab itu Seksi Kesehatan Keluarga masih terus melaksanakan Pelatihan DDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining DDTK. Masa Pandemi juga berpengaruh banyak ibu-ibu yang takut membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Adapun cakupan kunjungan bayi Tahun 2017-2021, sebagai berikut :



Gambar 2.28.
Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

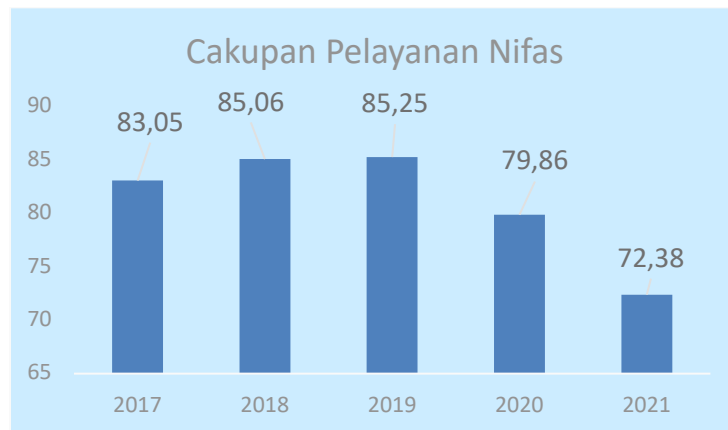
Tahun 2021 capaian K4 sebesar 66,95%,. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya penurunan, antara lain K1 yang non murni, ibu hamil tidak rutin memeriksakan diri ke petugas kesehatan dan bidan desa yang tidak melakukan kunjungan rumah bagi ibu yang tidak datang untuk memeriksakan kehamilannya sehingga kriteria untuk kunjungan K4 tidak terpenuhi. Beberapa ibu hamil juga belum sempat dilaporkan sebagai kunjungan K4 karena pada saat memasuki Trimaster III memilih pergi untuk melahirkan ke tempat orang tuanya di luar daerah Amuntai.



Gambar 2.29
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan Pelayanan Nifas

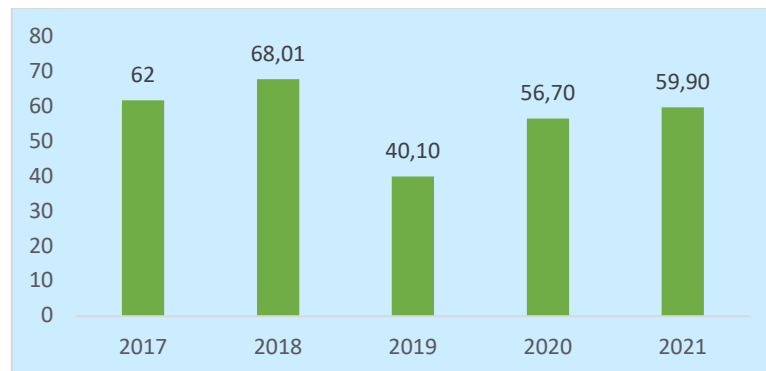
Cakupan pelayanan nifas tahun 2021 adalah sebesar 72,38%. Seperti kegiatan lainnya, penurunan hasil capaian ini juga dipengaruhi oleh sasaran baru dari Pusdatin. Pencapaian cakupan pelayanan nifas Tahun 2017 – 2021 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.30.
Cakupan Pelayanan Nifas Kab. HSU

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

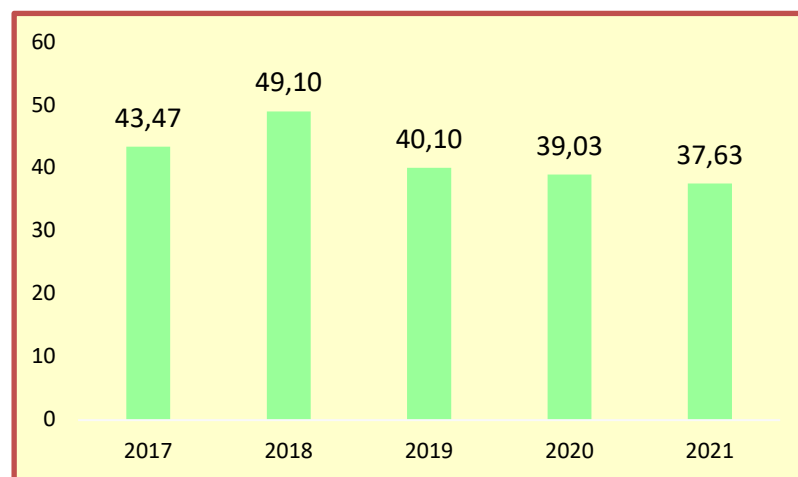
Capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2021 ini adalah 59,90 %. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari) dimana pada periode ini adalah paling rentan bagi bayi untuk menyempurnakan penyesuaian fisiologis. Sebenarnya penanganan kasus ini sudah tertangani 100%, namun memang jumlah kasus dilapangan sedikit. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.31.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kab. HSU

Cakupan pelayanan anak balita

Pada Tahun 2021 cakupan pelayanan balita sebesar 37,63 % turun dari capaian tahun tahun sebelumnya dan masih belum mencapai target yang ada. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam hal pemeriksaan dan penimbangan setelah bayi 9 bulan dan sudah selesai imunisasi campak dianggap oleh orang tua sudah tidak perlu lagi datang ke sarana kesehatan, akibatnya syarat 8 kali kunjungan balita dalam setahun untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembangnya juga menjadi tidak tercapai. Seperti kita ketahui bersama bahwa lima tahun pertama kehidupan pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak.



Gambar 2.32
Cakupan pelayanan anak balita Kab. HSU

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana terdiri dari jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, air bersih dan sanitasi serta penataan ruang.

Jalan

Untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain diperlukan peningkatan pembangunan jalan. Adapun panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sepanjang 391,541 km, tidak ada peningkatan status jalan maupun pembangunan jalan.

Tabel 2.14.
Panjang Jalan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	STATUS JALAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	KABUPATEN	328,82	328,82	328,82	328,82	328,82
2	PROVINSI	34,268	34,268	34,268	34,268	34,268
3	NEGARA	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45
	Jumlah	391,541	391,541	391,541	391,541	391,541

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat perkembangan panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara stagnan, tidak ada penambahan ataupun perubahan status. Adapun kondisi jaringan jalan yang baik dan rusak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.15.
Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	KONDISI JALAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Baik	149,44	136,25	150,37	155,47	168,597
2	Sedang	18,03	22,05	20,84	44,55	90,389
3	Rusak	54,38	45,79	42,01	21,89	15,737
4	Rusak Berat	106,97	124,73	115,60	106,91	54,200
	Total Panjang Jalan	328,82	328,82	328,82	328,82	328,823

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Gambar 2.39
Diagram Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada tabel berikut memperlihatkan panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui roda 4 (empat) atau persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam). Persentase jalan dalam kondisi baik paling rendah pada

tahun 2018 hal ini disebabkan banjir yang melanda jalan kabupaten sehingga banyak mengakibatkan jalan menjadi rusak.

Tabel. 2.16.
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

STATUS JALAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan Kabupaten Kondisi Baik	129,129	149,44	149,44	150,37	155,47	168,497
Panjang Jalan Kabupaten	328,823	328,82	328,82	328,82	328,823	328,823
Persentase	39,27	45,45	45,45	45,73	47,28	51,24

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Persentase jalan dalam kondisi baik paling rendah pada tahun 2016 hal ini disebabkan banjir yang melanda jalan kabupaten sehingga banyak mengakibatkan jalan menjadi rusak.

Jembatan

Jembatan sebagai penghubung antar daerah sangat penting, apalagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelilingi oleh aliran sungai, baik sungai kecil maupun besar. Jumlah total jembatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya selalu mengalami penambahan, baik itu jenis jembatan ulin bentang panjang, jembatan baja atau besi bentang panjang maupun jenis jembatan beton/box curved seperti tabel berikut.

Tabel 2.17.
Jumlah dan Jenis Jembatan

NO	JENIS JEMBATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ulin Bentang Panjang	184	185	185	184	185	185
2.	Baja/Besi Bentang Panjang	21	21	21	24	24	24
3.	Beton/Box Curved	142	142	147	151	152	152
	Total	347	348	353	359	361	361

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Jaringan Irigasi.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sepanjang 438,859 m. Perkembangan panjang jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Panjang Jaringan Irigasi

NO	JARINGAN IRIGASI	PANJANG JARINGAN (meter)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jaringan Primer	196.906	196.906	201.340	206.340	206.340	206.340
2	Jaringan Sekunder	222.119	222.119	227.519	232.519	232.519	232.519
	Jumlah	419.025	419.025	428.859	438.859	438.859	438.859

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

1. Daerah Irigasi/Rawa Pemerintah : 6.000 Ha
2. Daerah Irigasi/Rawa Provinsi : 6.350 Ha
3. Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten : 12.781 Ha (tersebar di Kab)

Tabel berikut menunjukkan luasan daerah irigasi rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.19.
Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
Kewenangan Pusat		6.000
Polder Alabio	<u>Sungai Pandan</u> /Hambuku Hulu,Hambuku Pasar,Hambuku Raya,Hambuku Tengah,Padang Bangkal,Pandulangan,Putat Atas/Tatau,Tambalang,Tambalang Kecil,Tambalang Tengah,Teluk Betung,Teluk Sinar; <u>Sungai Tabukan</u> /Banua Hanyar,Galagah,Galagah Hulu,Nelayan,Sungai Haji,Sungai Tabukan,Teluk Cati; <u>Babirik</u> /Hambuku Baru,Hambuku Hilir,Hambuku Lima,Kalumpang Dalam,Kalumpang Luar,Murung Panti Hilir,Murung Panti Hulu,Sungai Luang Hilir,Sungai Luang Hulu; <u>Danau Panggang</u> /Sarang Burung,Telaga Mas	6.000
Kewenangan Provinsi		6.350
Polder Kaludan	<u>Banjang</u> /Kaludan Kecil,Karias Dalam,Kaludan Besar,Sungai Bahadangan,Rantau Bujur,Pawalutan, Pulau Damar; <u>Amuntai Tengah</u> /Pasar Senin,Sungai Karias,Antasari,Kambang Kuning,Kota Raden	1.440
Polder Bakar	<u>Babirik</u> /Durait Hulu,Durait Tengah,Durait Hilir,Babirik Hulu,Babirk Hilir,Sungai Zam-Zam; <u>Sungai Pandan</u> /Banyu Tajun Dalam,Banyu Tajun Hilir,Banyu Tajun Hulu,Banyu Tajun Pangkalan,Jalan lurus, Murung Asam,Pangkalan Sari,Pondok Babaris,Rantau Karau Hilir,Rantau Karau Hulu,Rantau Karau Raya,Rantau Karau Tengah,Tatah Laban, Teluk Mesjid,Tapus Dalam	1.560
Rawa Pinang Habang	<u>Amuntai Tengah</u> /Danau Cermin,Pinang Habang,Datu Kuning,Rantawan,Muara Tapus,Tapus	1.200
Polder Pakacangan	<u>Amuntai Utara</u> /Pakacangan,Cakru, Murung Karangan,Padang Besar Hilir,Padang Besar Hulu; <u>Banjang</u> /Danau Terate,Patarikan,Teluk Buluh	1.100
Polder Muara Bayur	<u>Amuntai Utara</u> /Panangkalaan, Panangkalaan Hulu,Pamintangan,Pakapuran,Tabalong Mati,Telaga Bamban; <u>Haur Gading</u> /Sungai Limas, Bayur,Lok Suga	1.050
Kabupaten	Tersebar	12.781
	TOTAL	25.131

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Total seluruh daerah irigasi rawa potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai seluas 25.131 Ha, berdasarkan data Daerah Irigasi Rawa (DIR) ini menggambarkan potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Sedangkan luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 12.781 Ha dapat dilihat pada tabel berikut. Daerah

Irigasi Rawa terluas berada di DIR. Polder Padang Gusti di Kecamatan Haur Gading yaitu seluas 471 Ha dan luas DIR yang paling kecil terdapat di DIR Lok Bangkai Kecamatan Banjang yaitu seluas 3 Ha.

Tabel 2.20.
Luas Daerah Irigasi Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
1	Polder Padang Gusti	<u>Haur Gading</u> /Palimbangan Sari,Palimbangan Gusti,Palimbangan,Jingah Bujur,Haur Gading	471
2	Baru	<u>Danau Panggang</u> /Baru	150
3	Bajawit	<u>Amuntai Selatan</u> /Bajawit	350
4	Beringin	<u>Banjang</u> /Beringin	246
5	Bitin	<u>Danau Panggang</u> /Bitin	177
6	Danau Panggang	<u>Danau Panggang</u> /Danau Panggang	102
7	Darussalam	<u>Danau Panggang</u> /Darussalam	69
8	Kayakah	<u>Amuntai Selatan</u> /Kayakah	400
9	Longkong	<u>Danau Panggang</u> /Longkong	280
10	Manarap	<u>Danau Panggang</u> /Manarap, Manarap Hulu	346
11	Mawar Sari	<u>Amuntai Tengah</u> /Mawar Sari	275
12	Murung Kupang	<u>Babirik</u> /Murung Kupang	150
13	Pajukungan	<u>Babirik</u> /Pajukungan Hilir,Pajukungan Hulu	246
14	Palukahan	<u>Danau Panggang</u> /Palukahan	118
15	Panawakan	<u>Haur Gading</u> /Panawakan	115
16	Pandamaan	<u>Danau Panggang</u> / Pandaman	88
17	Pararain	<u>Danau Panggang</u> / Pararain	95
18	Pihaung	<u>Haur Gading</u> /Pihaung	201
19	Pinang Kara	<u>Amuntai Tengah</u> /Pinang Kara	250
20	Pulantani	<u>Haur Gading</u> / Pulantani	152
21	Sei. Dalam	<u>Babirik</u> /Sungai Dalam	120
22	Sei. Namang	<u>Danau Panggang</u> / Sungai Namang	175
23	Sei. Nyiur	<u>Babirik</u> /Sungai Nyiur	180
24	Sei. Panangah	<u>Danau Panggang</u> /Sungai Panangah	125
25	Sei. Papuyu	<u>Babirik</u> /Sungai Papuyu	75
26	Sei. Parupukan	<u>Babirik</u> /Papurukan	80
27	Tambak Sari Panji	<u>Haur Gading</u> / Tambak Sari Panji	360
28	Teluk Limbung	<u>Babirik</u> /Teluk Limbung	175
29	Teluk Mesjid	<u>Danau Panggang</u> /Teluk Mesjid	150
30	Tampakang	<u>Paminggir</u> /Tampakang	285

NO	DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
31	Bararawa	<u>Paminggir</u> /Bararawa	225
32	Paminggir	<u>Paminggir</u> /Paminggir	125
33	Murung Panggang	<u>Amuntai Selatan</u> /Murung Panggang	105
34	Babirik	<u>Babirik</u> /Babirik Hulu,Babirik Hilir,	300
35	Rintisan	<u>Danau Panggang</u> /Rintisan	25
36	Keramat	<u>Haur Gading</u> /Keramat	20
37	Sungai Binuang	<u>Haur Gading</u> /Sungai Binuang	23
38	Tangkawang	<u>Haur Gading</u> /Tangkawang	28
39	Teluk Haur	<u>Haur Gading</u> /Teluk Haur	50
40	Tuhuran	<u>Haur Gading</u> /Tuhuran	30
41	Waringin	<u>Haur Gading</u> /Waringin	27
42	Sungai Kuini	<u>Sungai Pandan</u> /Sungai Kuini	113
43	Keramat	<u>Amuntai Selatan</u> /Keramat	20
44	Murung Sari	<u>Amuntai Selatan</u> /Murung Sari	30
45	Padang Tanggul	<u>Amuntai Selatan</u> /Padang Tanggul	49
46	Pulau Tambak	<u>Amuntai Selatan</u> /Pulau Tambak	35
47	Simpang Tiga	<u>Amuntai Selatan</u> /Simpang Tiga	35
48	Teluk Telaga	<u>Amuntai Selatan</u> /Telaga Hanyar, Telaga Sari, Teluk Sari	30
49	Telaga Silaba	<u>Amuntai Selatan</u> /Telaga Silaba	21
50	Teluk Paring	<u>Amuntai Selatan</u> /Teluk Paring	25
51	Ujung Murung	<u>Amuntai Selatan</u> /Ujung Murung	15
52	Ambahai	<u>Paminggir</u> /Ambahai	40
53	Pal Batu	<u>Paminggir</u> /Pal Batu	30
54	Sapala	<u>Paminggir</u> /Sapala	35
55	Paminggir Seberang	<u>Paminggir</u> /Paminggir Seberang	10
56	Banjang	<u>Banjang</u> /Banjang	310
57	Baruh Tabing	<u>Banjang</u> /Baruh Tabing	200
58	Garunggang	<u>Banjang</u> /Garunggang	212
59	Kalintamui	<u>Banjang</u> /Kalintamui	130
60	Lok Bangkai	<u>Banjang</u> /Lok Bangkai	3
61	Murung Padang	<u>Banjang</u> /Murung Padang	315
62	Palanjudan Sari	<u>Banjang</u> /Palanjudan Sari	32
63	Pandulangan	<u>Banjang</u> /Pandulangan	250
64	Teluk Sarikat	<u>Banjang</u> /Teluk Sarikat	205
65	Gampa Raya	<u>Sungai Tabukan</u> /Gampa Raya	50
66	Hilir Mesjid	<u>Sungai Tabukan</u> /Hilir Mesjid	30
67	Pasar Sabtu	<u>Sungai Tabukan</u> /Pasar Sabtu	25

NO	DAERAH RAWA	KECAMATAN/DESA	LUAS POTENSIAL (Ha)
68	Pematang Benteng	<u>Sungai Tabukan</u> /Pematang Benteng,Pematang Benteng Hilir	40
69	Rantau Bujur	<u>Sungai Tabukan</u> /Rantau Bujur Darat,Rantau Bujur Hilir,Rantau Bujur Hulu,Rantau Bujur Tengah	100
70	Tambalang Raya	<u>Sungai Tabukan</u> /Tambalang Raya	20
71	Air Tawar	<u>Amuntai Utara</u> /Air Tawar	20
72	Guntung	<u>Amuntai Utara</u> /Guntung	300
73	Kamayahan	<u>Amuntai Utara</u> /Kamayahan	200
74	Kuangan	<u>Amuntai Utara</u> /Kuangan	275
75	Muara Baruh	<u>Amuntai Utara</u> /Muara Baruh	200
76	Padang Luar	<u>Amuntai Utara</u> /Padang Luar	215
77	Panangian	<u>Amuntai Utara</u> /Panangian	235
78	Pandawanan	<u>Amuntai Utara</u> /Pandawanan	150
79	Panyaungan	<u>Amuntai Utara</u> /Panyaungan	130
80	Pimping	<u>Amuntai Utara</u> /Pimping	100
81	Sungai Turak	<u>Amuntai Utara</u> /Sungai Turak,Sungai Turak Dalam	300
82	Tayur	<u>Amuntai Utara</u> /Tayur	200
83	Tabing Lereng	<u>Amuntai Utara</u> /Tabing Lereng	325
84	Teluk Daun	<u>Amuntai Utara</u> /Teluk Daun	150
85	Sungai Baring	<u>Amuntai Tengah</u> /Sungai Baring	200
86	Tangga Ulin	<u>Amuntai Tengah</u> /Tangga Ulin Hulu,Tangga Ulin Hilir	42
87	Kebun Sari	<u>Amuntai Tengah</u> /Kebun Sari	40
88	Kandang Halang	<u>Amuntai Tengah</u> /Kandang Halang	200
89	Harus	<u>Amuntai Tengah</u> /Harus, Harusan	105
90	Sungai Malang	<u>Amuntai Tengah</u> /Sungai Malang	20
		JUMLAH	12.781

Sumber : Dinas PUPRP 2022

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang. Penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dengan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Hulu Sungai Utara sebagai arahan pengembangan wilayah kabupaten dalam

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yakni tahun 2012–2032. Sebagai kegiatan perencanaan tata ruang yang lebih detail yang dilakukan secara tepat agar dapat menjadi dasar perencanaan perkotaan atau kawasan yang akan ditetapkan menjadi perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) mulai disusun setelah ditetapkannya RTRW Kab. Hulu Sungai Utara, proses penyusunan yang panjang dan kebutuhan data dasar skala detail yang harus dipenuhi pemerintah daerah menyebabkan perencanaan rencana rinci tata ruang belum semuanya dapat ditetapkan kepala daerah. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa masih sedikit kebijakan dalam perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.21.
Capaian Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Dokumen	2012	2013	2014	2015	2016 - 2017	2018	2019 - 2020	STATUS	Keterangan
1	RTRW	1 buah							PERDA No 12 TH 2012	
2	RDTR Kota Amuntai	1 buah							Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
3	RDTRK/Kec. Sungai Pandan		1 buah						Belum Perda	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
4	RTBL Kec. Amuntai Tengah		1 buah						Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000
5	RTBL Kerajinan Tikar Purun Kec. Haur Gading				1 buah				PERBUP No.4 Th 2015	
6	RTBL Bantaran Sungai Negara						1 buah		Belum Perbup	Terkendala Peta Dasar Skala Minimal 1:5.000

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2022

Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang

penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk Rasio RTH Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada peningkatan yaitu sebesar 0,30.

Tabel 2.22.
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

No.	Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas RTH	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692
	RASIO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah tidak layak huni kalau tidak ditangani akan menjadi masalah sosial, sehingga Pemerintah telah membuat Program Bedah Rumah dalam bentuk memberikan bantuan rehabilitasi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Rumah Tidak Layak Huni di kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 sebanyak 1.967 unit dan hal ini berkurang sebanyak 207 unit dari 2.174 unit di Tahun 2020 dengan pengurangan hanya mencapai 0,11% di Kecamatan Sungai Pandan paling besar yaitu mencapai 0,44% hal ini dikarenakan data dan persyaratan teknis lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan serta lewat verifikasi lapangan, data terbanyak berada di Kecamatan Banjarang sebanyak 329 unit dan paling sedikit di Kecamatan Paminggir yakni sebanyak 42 unit.

Tabel 2.23.
Rumah Tidak Layak Huni (HSU) 2017-2021

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Amuntai Tengah	481	413	184	166	151
2.	Amuntai Selatan	477	210	250	205	160
3.	Amuntai Utara	263	263	205	205	205
4.	Banjang	366	366	224	364	329
5.	Babirik	419	419	364	189	189
6.	Danau Panggang	282	282	257	257	257
7.	Haur Gading	273	225	164	164	164
8.	Paminggir	52	52	42	42	42
9.	Sungai Pandan	753	753	591	368	256
10.	Sungai Tabukan	255	255	214	214	214
	JUMLAH (unit)	3.621	3.238	2.495	2.174	1.967

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

Tabel 2.24.
Capaian Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 - 2021

NO	KECAMATAN	2020	2021	Persentase
1.	Amuntai Tengah	166	151	0,10
2.	Amuntai Selatan	205	160	0,28
3.	Amuntai Utara	205	205	-
4.	Banjang	364	329	0,11
5.	Babirik	189	189	-
6.	Danau Panggang	257	257	-
7.	Haur Gading	164	164	-
8.	Paminggir	42	42	-
9.	Sungai Pandan	368	256	0,44
10.	Sungai Tabukan	214	214	-
	JUMLAH (unit)	2.174	1.967	0,11

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh yang teridentifikasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada awal tahun 2021 seluas 98,63 Ha, selanjutnya terjadi pengurangan sebesar 7,12 Ha, sehingga di akhir tahun 2021 tinggal 91,51 Ha.

Tabel 2.25.
Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan Kab. HSU

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Permukiman Kumuh (ha)	123,94	123,39	151,13	94,37	98,63
Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani (ha)	0,55	74,62	101,89	9,95	7,12
Persentase	0,44	60,47	67,42	10,54	7,22

Sumber : Dinas Perkim LH, 2022

Penanganan atau pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di atas, pengurangan terbesar terjadi di tahun 2019 mencapai 67,42 % atau 101,89 Ha sehingga sisa 49,24 Ha, namun pada awal tahun 2020 dilakukan perhitungan dan deliniasi kembali didapat luasan kumuh sebesar 94,37 Ha sesuai dengan SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/92/KUM/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan pada awal Tahun 2021 dilakukan kembali perhitungan dan deliniasi didapat luas kumuh seluas 98,63 Ha dengan pengurangan seluas 7,12 Ha sehingga sisa luas kumuh tahun 2021 seluas 91,51 Ha.

Air Bersih

Pelayanan Air Bersih melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini mencapai 51,79% dengan jumlah Sambungan Rumah sebanyak 31.305 SR. Untuk cakupan pelayanan air minum PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Jumlah Cakupan Layanan PDAM Tahun 2021

N O	UNIT INSTALASI PENGOLAHAN AIR	JUMLAH PENDUD UK (JIWA)	JUMLAH SAMBU NGAN	DATA SAMBUNGAN				JUMLAH YANG TERLAYANI	
	(WTP/KECAMATAN)			AKTIF	NON AKTIF	DOMES TIK	NON DOMES TIK	JIWA	UNIT (%)
1	BNAMUNTAL, IPA TANGKAWANG, IPA MUARA BARUH, IPA TELAGA SILABA, IPA JARANG KUANTAN (Kecamatan : Amuntai Utara, Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Haur Gading dan Banjang)	98.488	22.116	21.407	709	18.243	3.164	72.972	74
2	IKK ALABIO (Kecamatan : Sungai Pandan dan Amuntai Selatan)	12675	2.230	2.160	70	1.912	248	7.648	60
3	IKK BANJANG (Kecamatan : Amuntai Utara dan Banjang)	9961	1.136	1.081	55	962	119	3.848	39
4	IKK RANTAU BUJUR (Kecamatan : Sungai Tabukan dan Danau Panggang)	12751	1.014	962	52	849	113	3.396	27
5	IKK DANAUPANGGANG (Kecamatan : Danau Panggang)	11588	437	360	77	258	102	1.032	9
6	IKK BABIRIK (Kecamatan : Sungai Pandan dan Babirik)	21528	1.030	850	180	711	139	2.844	13
7	IKK MUARA TAPUS (Kecamatan : Amuntai Tengah dan Sungai Pandan)	19694	1.762	1.685	77	1.382	303	5.528	28
8	IKK PAMINGGIR (Kecamatan : Paminggir)	2455	512	437	75	417	20	1.668	68
9	IKK SUNGAI TABUKAN (Kecamatan : Sungai Pandan dan Sungai Tabukan)	9509	1.068	1.049	19	984	65	3.936	41
	JUMLAH	198.649	31.305	29.991	1.314	25.718	4.273	102.872	51,79

Sumber : PDAM Tahun 2022 (Desember 2021)

Adapun persentase capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum, baik berasal dari cakupan PDAM maupun Non PDAM berdasarkan survey terlihat pada tabel berikut. Capaian akses Air Bersih pada tahun 2021 adalah 92,47 %, capaian terendah di Kecamatan Babirik dengan capaian 72,89% sedangkan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Tabukan dengan capaian 99,19%.

Tabel 2.27.
Capaian akses penduduk terhadap air bersih/air minum

No	KECAMATAN	Jml Desa 100% akses	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sumber Air Minum								CAK AKSES SAM (%)
					PDAM		Sumur Bor pribadi	Sumur Bor/tong umum non pamsimas	PAMSI MAS	Sumur Gali	Depot Air minum	Sungai/ Rawa	
					SR	HU							
1	SUNGAI TABUKAN	8	4.331	14.342	1.790	13	549	1.154	759	0	16	35	99,19
2	DANAU PANGGANG	10	5.817	19.380	298	59	759	1.328	3.070	0	234	66	98,87
3	AMUNTAI TENGAH	13	12.116	43.616	9.225	408	610	802	327	31	0	713	94,12
4	HAUR GADING	7	4.442	15.174	2.629	7	27	40	1.032	22	412	273	93,85
5	AMUNTAI SELATAN	20	7.658	28.441	3.435	452	418	909	1.329	0	505	533	93,07
6	PAMINGGIR	1	2.460	8.471	554	0	0	97	1.625	0	0	184	92,52
7	SUNGAI PANDAN	14	8.647	26.520	2.350	34	1.290	1.413	2.143	36	726	655	92,43
8	BANJANG	9	4.919	17.779	1.309	55	324	944	1.250	11	625	401	91,85
9	AMUNTAI UTARA	9	5.292	19.627	3.365	75	253	162	402	2	594	439	91,70
10	BABIRIK	4	4.563	18.841	292	64	366	1.193	1.349	0	62	1.237	72,89
JUMLAH		95	60.245	212.191	25.247	1.167	4.596	8.042	13.286	102	3.174	4.536	92,47

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022

Adapun persentase per tahun capaian akses penduduk terhadap air bersih atau air minum, baik berasal dari cakupan PDAM maupun Non PDAM terlihat pada tabel berikut. Untuk capaian akses air bersih dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 selalu meningkat namun belum mencapai target universal akses yang diharapkan yakni 100% air bersih .

Tabel 2.28.
Capaian akses air bersih/air minum

TAHUN	CAPAIAN AKSES AIR BERSIH (%)
2017	77,68
2018	85,43
2019	88,25
2020	91,42
2021	92,47

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten HSU, 2022

Sanitasi

Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar masih menggunakan sistem on site individual (WC/MCK) atau jamban. Pada tabel berikut terlihat Capaian Sanitasi Dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana capaian paling tinggi di Kecamatan Amuntai Utara dan paling rendah adalah di Kecamatan Paminggir. Total Capaian Sanitasi pada tahun 2021 mencapai 91,84%.

Tabel 2.29.
Capaian akses Sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

No	KECAMATAN	Jumlah Desa	Jumlah Desa ODF	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Memiliki WC		Kepemilikan WC					AKSES WC (%)
						Ya	Tidak	Pribadi	WC Umum	WC Komunal	Numpang Tetangga	Ke Sungai / rawa	
1	AMUNTAI UTARA	26	23	5.292	19.627	5.032	260	4.920	54	112	130	76	98,56
2	AMUNTAI TENGAH	29	18	12.116	43.616	11.582	534	11.399	115	183	92	327	97,30
3	AMUNTAI SELATAN	30	23	7.658	28.441	7.234	424	7.121	47	113	148	229	97,01
4	BANJANG	20	9	4.919	17.779	4.443	476	4.406	136	37	159	181	96,32
5	HAUR GADING	18	7	4.442	15.174	4.004	438	3.854	122	150	106	210	95,27
6	SUNGAI PANDAN	33	16	8.647	26.520	7.853	794	7.684	95	169	269	430	95,03
7	SUNGAI TABUKAN	17	11	4.331	14.342	3.533	798	3.477	224	56	190	384	91,13
8	DANAU PANGGANG	16	3	5.817	19.380	4.212	1.605	3.798	186	414	276	1.143	80,35
9	BABIRIK	23	3	4.563	18.841	3.124	1.439	2.949	105	175	164	1.170	74,36
10	PAMINGGIR	7	2	2.460	8.471	1.176	1.284	1.040	46	136	471	767	68,82
JUMLAH		219	115	60.245	212.191	52.193	8.052	50.648	1.130	1.545	2.005	4.917	91,84

Sumber : Pokja AMPL Kab. HSU dan Dinas Kesehatan, 2022

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Indikator urusan wajib ini diantaranya adalah jumlah polisi pamong praja, jumlah linmas, dan pos kamling. Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Tabel berikut memperlihatkan rasio Pol PP dan Linmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2.30.
Rasio Polisi Pamong Praja dan Linmas Kab. HSU Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	58	56	42	42	40
2.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,54	2,42	1,79	1,78	1,75
3.	Jumlah Petugas Perlindungan masyarakat	1.528	1.528	1.428	1.428	1428
4.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
5.	Jumlah Penduduk	228.578	231.594	234.604	235.841	228.831

Sumber : Kantor Satpol PP, Kabupaten Hulu Sungai Utara , 2022

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Dengan kondisi ini berarti kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah perlu ditingkatkan.

Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengalami penurunan. Semakin meningkatnya/menurunnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar/kecil ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. Sosial

Berbagai jenis PMKS yang ada di Kab. HSU dapat dilihat pada Tabel berikut. Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

Tabel 2.31
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. HSU

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Balita Terlantar (0-4 th)	0	16	16	33	33	33
2.	Anak Terlantar(5-18 th)	1	132	132	113	113	133
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	5	3	3	2	2	
4.	Anak Jalanan	1	13	13	4	4	4
5.	Anak dengan kedisabilitas	216	360	360	220	220	
6.	Anak yang menjadi korban kekerasan/ diperlakukan salah	6	2	2	2	2	2
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	0	1	1	16	16	
8.	Lanjut Usia Terlantar	657	4.887	4.887	1.191	1.191	1.191
9.	Penyandang Disabilitas	180	1.580	1.580	823	823	
10.	Tuna Susila	0	4	4	1	1	
11.	Gelandangan	5	11	11	9		
12.	Pengemis	7	20	20	26	26	35
13.	Pemulung	27	18	18	17		
14.	Kelompok Minoritas	0	8	8	27	27	
15.	Berkas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	14	44	44	77	77	77
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	23	521	521	66	66	66
18.	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	3	0	0	0	0	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	0	0	0
21.	Bencana Alam	63	2.577	2.577	26	26	
22.	Bencana Sosial	0	925	925	20	20	
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	647	6.046	6.046	2.040	2040	
24.	Fakir Miskin	18521	18.521	18.521	16.621	16.118	16.221
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	493	493	97	97	
26.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	
	Jumlah	20.376	36.182	36.182	21.431	20.929	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dijalankan Pemerintah Daerah. Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah mendata jumlah pencari kerja dan membantu penempatannya untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut jumlah pencari kerja yang terdata oleh SKPD yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Tabel 2.32.
Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan di Kab. HSU

Uraian	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan (%)	0,5	0,5	21,7	16,9	1,36

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa para pencari kerja yang terdaftar di instansi terkait masih banyak yang belum diterima di perusahaan/entitas bisnis karena masih tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh perusahaan/entitas bisnis selain itu juga tingkat Pendidikan para pencari kerja masih rendah.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas – luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di

Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kab. Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Kekerasan terhadap Perempuan					Kekerasan terhadap Anak				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Fisik	4	3	2	1	6	4	1	1	1	2
2	Psikis	8	0	7	1	3	8	0	0	7	11
3	Seksual	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
4	Penelantaran	1	0	0	0	0	1	1	5	0	0
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dan lain-lain	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka

b. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.34.

Capaian Kinerja urusan Pangan Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kap/hari)	4,821	3,432	4,541	4,286	4,331	2,491
2.	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kap/hari)	146,84	83,56	133,80	120,89	121,10	60,74
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,00	79,30	80,00	81,20	81,80	82,30

Jika dilihat dari tabel diatas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dari tahun 2016 s.d tahun 2020 mengalami trend yang positif

sedangkan indikator Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein dari tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, penurunan yang significant terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 hal ini dikarenakan Data pangan non produksi seperti gula, terigu dan minyak goreng dari BPS tidak bias digunakan untuk menghitung angka ketersediaan kabupaten, hal ini dikarenakan data terdahulu (tahun 2016) yang diberikan oleh BPS berasal dari data SUSENAS dimana data tersebut memiliki tingkat error/deviasi yang tinggi karena tidak semua pangan yang ada dalam daftar pangan untuk survei SUSENAS berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu di tahun 2017 tidak bisa memberikan data tersebut lagi sehingga menyebabkan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dilakukan di tahun 2017 hanya menggunakan data pangan HSU yang produksi saja. Selanjutnya dari tahun 2018- 2020 terjadi fluktuasi dengan peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu besar.

c. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi pantau yaitu pada Sungai Balangan, Sungai Haur Gading dan Sungai Nagara dengan 7 (tujuh) parameter diantaranya DO, TTS, Total Posphat, BOD, COD, E Coli, Total Coliform. Dengan hasil dari titik pantau nilai IKA Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 dengan nilai 60 yang dianggap kualitas air baku dalam masih dalam kondisi cemar ringan meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kualitas, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.35.
Indeks Kualitas Air Kabupaten Hulu Sungai Utara

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Air	44	43	45	47.80	60	55
Evaluasi	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2022

Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pada beberapa lokasi sampling yaitu pada pemukiman di Komplek Perumahan CPS Sei Malang; pada Perkantoran di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara dan Padat Transportasi di Terminal banua Lima dengan parameter yang terpenting diantaranya SO₂ dan NO₂. Katagori IKU baik dengan nilai 1 – 50; sedang nilai 51 – 100; tidak sehat nilai indeks 101 – 199; sangat tidak sehat nilai indeks 200 – 299 dan berbahaya nilai indeks 300 – lebih. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 89,11 merupakan katagori kondisi sedang, hal ini perlu perhatian lebih dari segenap kalangan untuk menjaga kualitas udara karena dilihat perkembangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini artinya kualitas udara mengalami penurunan. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36.
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Udara	74,66	71,86	89,64	89,77	89,11	89,40
Evaluasi	baik	baik	baik	baik	baik	baik

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2022

Persampahan

Tabel 2.37.
Volume Sampah Yang Dapat Diangkut

NO	URAIAN	2016	2017	2019	2020
1.	Jumlah Sampah Yang Ditangani (m3)	43.200	48.240	66.500	67.500
2.	Jumlah Volume Produksi Sampah (m3)	164.635,20	170.000,00	175.000,00	178.000,00
	PERSENTASE	26,24	28,38	38,00	37,92

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten HSU 2021*

Berdasarkan Tabel di atas Persentase Volume Sampah yang Dapat diangkut, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun masih di bawah 50%, volume sampah hanya dapat diangkut mencapai 37,92% pada tahun 2020. Sebagai tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tebing Liring yang direncanakan sebagai TPA Regional, namun secara teknis belum beroperasi secara maksimal.

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dibagi jumlah penduduk yang berusia >17 atau telah menikah. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2017–2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 2.33.

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2017-2021

Rasio bayi berakte kelahiran

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunyai akte kelahiran. Jumlah kelahiran bayi pada tahun 2021 sebanyak 1.478 kelahiran hidup, dan jumlah

pelayanan penerbitan akta kelahiran sebanyak 9.141 lembar. Data rasio bayi berakta kelahiran tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.38
Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Bayi Lahir	3.928	3.913	3.838	3.545	1.478
2	Jumlah Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	9.001	9.314	9.213	5.484	9.141
3	Rasio bayi Berakta Kelahiran	0.436	0,420	0,417	0,646	0,162
4	Jumlah Akta Kelahiran yg dimiliki Penduduk	93.808	103.122	112.335	117.819	126.960

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 2015-2020

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Tabel. 2.39
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	211	211	211	211	211
2	Rata-rata jumlah binaan PKK	10	10	10	10	10
3	Jumlah LPM Aktif	Na	30	38	38	38
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri.

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Angka rata-rata akseptor KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 sebesar 81,57 %, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.40
Jumlah dan Rasio Akseptor KB Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah akseptor KB	29.094	30.079	32.072	36.552	39.032
2	Jumlah pasangan usia subur	38.184	38.328	40.291	45.049	47.850
3	Rata-rata akseptor KB	76,19	78,48	79,60	81,14	81,57

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2022

g. Perhubungan

Angkutan Darat

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat terminal tipe B dan tipe C, terminal tipe B yaitu Terminal

Banua Lima pengelolaannya saat ini adalah wewenang Provinsi, sarana terminal di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41.
Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum

No	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi	Luas Kawasan (m)	Ket.
1	Terminal Banua Lima	B	Kecamatan Amuntai Tengah	75 x 400	Prov
2	Terminal Palampitan	C	Kecamatan Amuntai Tengah	85 x 85	Kab
3	Terminal Pasir mas	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
4	Terminal Hulu Pasar	C	Kecamatan Amuntai Tengah	80 x 80	Kab
5	Terminal Babirik	C	Kecamatan Babirik	55 x 100	Kab
6	Terminal Sungai Pandan (Alabio)	C	Kecamatan Sungai Pandan	65 x 65	kab

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek Prasarana sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terdapat terminal tipe B dan tipe C.

Angkutan Sungai

Prasarana lainnya yang sangat vital sebagai angkutan umum pada sungai dan rawa adalah dermaga dan tambatan perahu. Dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.42.
Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	KONDISI	TAHUN DIBANGUN
1	Banua Lima	Amuntai Tengah	Baik	1969
2	Pasar Amuntai	Amuntai Tengah	Baik	1994
3	Banyu Tajun Pangkalan	Sungai Pandan	Baik	1970
4	Sungai Sandung	Sungai Pandan	Baik	2000
5	Pondok Babaris	Sungai Pandan	Baik	2012

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	KONDISI	TAHUN DIBANGUN
6	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2015
7	Hambuku Pasar	Sungai Pandan	Baik	2016
8	Pasar Babirik	Babirik	Baik	1970
9	Kalumpung Dalam	Babirik	Baik	2015
10	Sungai Dalam	Babirik	Baik	2016
11	Kalumpung Luar	Babirik	Baik	2017
12	Sungai Durait Hilir	Babirik	Baik	2017
13	Parupukan	Danau Panggang	Baik	2017
14	Danau Panggang	Danau Panggang	Baik	2010
15	Baru	Danau Panggang	Baik	2017
16	Keramat	Haur Gading	Rusak Ringan	2011
17	Keramat	Haur Gading	Baik	2015
18	Kamayahan	Amuntai Utara	Baik	2017
19	Paminggir	Paminggir	Baik	2013-2015
20	Tampakang	Paminggir	Baik	2015
21	Sapala	Paminggir	Baik	2015
22	Telaga Silaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
23	Telaga Silaba	Amuntai Selatan	Rusak Berat	2012
24	Paminggir	Paminggir	Baik	2017
25	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Baik	2018
26	Bararawa	Paminggir	Sangat Baik	2019
27	Paminggir	Paminggir	Sangat Baik	2019
28	Kebun Sari	Amuntai Tengah	Sangat Baik	2019

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

h. Komunikasi dan Informatika

Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Hulu Sungai Utara khususnya Kota Amuntai telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL, INDOSAT, TELKOM, 3, FLEXI, XL. Untuk TV lokal, Amuntai telah memiliki AM TV yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah dan sebaran menara BTS (Base Transceiver Station) yang merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara

perangkat komunikasi dan jaringan operator mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Jumlah Sebaran Menara BTS di Kabupaten HSU

NO.	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Amuntai Tengah	19	20	20	20	20	20
2.	Amuntai Selatan	4	4	5	8	8	8
3.	Amuntai Utara	8	8	8	8	8	8
4.	Banjang	3	3	3	4	4	4
5.	Babirik	3	3	3	5	5	5
6.	Danau Panggang	5	5	5	4	4	4
7.	Haur Gading	-	-	-	3	3	3
8.	Paminggir	1	1	1	2	2	2
9.	Sungai Pandan	6	6	6	9	9	9
10.	Sungai Tabukan	1	1	1	2	2	2
	JUMLAH (unit)	50	51	52	65	65	65

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

Dari Tabel di atas jumlah sebaran terbanyak di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 20 buah, dan di Kecamatan Haur Gading tidak ada berdiri menara telekomunikasi/BTS. Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Hulu Sungai Utara tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.

Pelayanan komunikasi dan penggunaan internet hingga saat ini masih dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan akses internet agar dirasakan seluruh masyarakat dapat tercover atau terlayani, hal ini perlu terubusan Pemerintah daerah untuk menggandeng operator seluler untuk membangun jaringan terutama 4G.

Daerah atau desa yang belum mendapatkan jangkauan layanan 4G atau blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada sebanyak 18 Desa,

Daerah terbanyak di Kecamatan Paminggir yang belum tercover jaringan 4G yakni ada 4 Desa dan Kecamatan Banjang dan Kecamatan Amuntai Tengah masing-masing ada 2 Desa, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.44 di bawah.

Tabel 2.44
Desa Blankspot 4G di Kabupaten Hulu Sungai Utara

N O	KEC	DESA	COVER AGE 4G (KM2)	LUAS WILAYAH (KM2)	PERSentase 4G TERHADAP WILAYAH (%)	STATUS 3T	JUMLAH PENDUDUK	Elektrifitas	Aksesibilitas Jalan	sarana Pendidikan	sarana kesehatan	objek Wisata	Sinyal Telekomunikasi 2G/3G/4G	Ketersediaan Jaringan Fiber Optik
1	PAMINGGIR	DESA TAMPAKANG	0 KM2	40,46	0	Eks. 3T	1.287	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
2	PAMINGGIR	DESA PAL BATU	0 KM2	23,59	0	Eks. 3T	778	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
3	PAMINGGIR	DESA BARARAWA	0 KM2	48,4	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Ada
4	PAMINGGIR	DESA SAPALA	0 KM2	23,6	0	Eks. 3T	1.599	Ada	Sungai	Ada	Ada	-	-	Tidak Ada
5	PAMINGGIR	DESA AMBAHAI	0 KM2	13,59	0	Eks. 3T	1.045	Ada	Sungai	Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada
6	AMUNTAI TENGAH	DESA MAWAR SARI	0 KM2	7,2	0	Eks. 3T	1.674	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
7	AMUNTAI TENGAH	DESA PINANGKARA	0 KM2	6,59	0	Eks. 3T	1.270	Ada	Titian	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
8	BANJANG	DESA PAWALUTAN	0 KM2	5.90	0	Eks. 3T	8.25	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
9	BANJANG	DESA PULAU DAMAR	0 KM2	2.10	0	Eks. 3T	1.357	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
10	DANAU PANGGANG	DESA RINTISAN	0 KM2	3.60	0	Eks. 3T	1.254	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
11	BABIRIK	DESA KALUMPANG DALAM	0 KM2	2.10	0	Eks. 3T	8.78	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
12	BABIRIK	DESA SUNGAI LUANG HULU	0 KM2	2.23	0	Eks. 3T	1.687	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
13	BABIRIK	DESA PAJUKUNGAN HULU	0 KM2	1.90	0	Eks. 3T	1.965	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
14	AMUNTAI SELATAN	DESA KAYAKAH	0 KM2	6.78	0	Eks. 3T	1.423	Ada	Titian	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
15	AMUNTAI SELATAN	DESA MURUNG PANGGANG	0 KM2	5.65	0	Eks. 3T	1.243	Ada	Urukan tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
16	AMUNTAI UTARA	DESA TEBING LIRING	0 KM2	4.78	0	Eks. 3T	876	Ada	Aspal	Ada	Ada	-	2G	Tidak Ada
17	AMUNTAI UTARA	DESA PANDAWANAN	0 KM2	5.63	0	Eks. 3T	1.452	Ada	Urukan Tanah	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada
18	HAUR GADING	DESA PANAWAKAN	0 KM2	3,4	0	Eks. 3T	1.198	Ada	Aspal	Ada	Tidak Ada	-	2G	Tidak Ada

i. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 2.45
Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Aktif

No	Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Koperasi yang Aktif (Unit)	Persentase
1	2017	126	96	76,19
2	2018	126	89	70,63
3	2019	126	89	70,63
4	2020	127	56	44,09
5	2021	127	57	44,53

Sumber : Dinas Perindag,Koperasi & UKM Kab.HSU

Dari tabel diatas trend menunjukkan persentase koperasi aktif dari selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan dikisaran 26 persen dimana 3 tahun sebelumnya persentase koperasi aktif berada dikisaran 70 persen. Hal ini menunjukkan perlunya usaha yang lebih keras lagi dari SKPD teknis untuk melakukan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.46
Jumlah Penduduk (Perempuan dan Laki-laki)
yang bekerja di Sektor UMKM (Orang) Tahun 2017-2022

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-Laki	69.984	70.031	70.031	70.031	70.031
2	Perempuan	43.480	43.469	43.469	43.469	43.469
	Jumlah	113.464	113.500	113.500	113.500	113.500

Sumber : Dinas Perindag,Koperasi & UKM Kab.HSU

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah setelah tahun 2017 tidak mengalami perubahan atau tetap.

j. Penanaman Modal

Tabel 2.47.
Rekap Perijinan SIUP dan TDP yang diterbitkan Tahun 2017-2022

No	Jenis Perijinan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SIUP	276	254	335	320	534
2	TDP	133	127	194	209	259

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya SIUP yang diterbitkan tidak diikuti dengan besarnya TDP yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih kurang sadarnya masyarakat untuk membuat ijin tersebut, selain itu juga perlu ditingkatkan penyerderhanaan prosedur dengan system digitalisasi perijinan sehingga iklim investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara makin kondusif

Tabel 2.48.
Nilai Investasi berskala nasional (PMDN)

Uraian	Tahun	
	2020	2021
Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN)-milyar	370,9	956,9

Dari tabel Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN) diatas selama 2 tahun terakhir di Kabupaten Hulu Sungai utara mengalami Peningkatan 158% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan iklim investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat kondusif bagi investor yang menanamkan modal usahanya.

k. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga sebanyak 3 (tiga) buah yakni Komite Olahraga Nasional (KONI), *National Paralympic Comit*e (NPC) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Adapun perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	40	49	67	70	65
2	Cakupan pembinaan olahraga	24	26	30	30	25
3	Jumlah prestasi olahraga	72	46	129	102	86

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

I. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara. Output yang dihasilkan dan menjadi rutinitas setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

m. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi. Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Government, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola

hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta indungi sistem elektronik dan dokumen elektronik. Persentase Peningkatan SKPD yang Menerapkan Keamanan Informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 baru mencapai 60%.

n. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan. Adapun perkembangan urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50.
Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	24%	19,8%	38,50%	56,32%	47,1%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	57,30%	57,30%	100%	100%	47,1%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Hulu Sungai Utara, 2020

n. Perpustakaan

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah sebanyak tiga buah dan milik desa 86 buah pada tahun 2021, kalau dilihat dari pengunjung perpustakaan daerah maupun desa pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Perkembangan perpustakaan dan pengunjungnya dapat dilihat di Tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan Daerah	3	3	3	3	3
2	Jumlah Perpustakaan Desa	64	69	64	64	86
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	34.620	44.350	58.786	17.853	24.152
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Desa	17.236	3.045	856	351	5.308

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian, perikanan, kehutanan dan perindustrian, meskipun urusan pilihan lainnya juga dilaksanakan, namun tidak menonjol.

a. Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi dalam tiga kategori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan tempat hiburan/rekreasi budaya.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai berkembang dengan adanya wisata-wisata local yang memanfaatkan kearifan budaya local yang dikelola oleh masyarakat setempat/desa. Ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.52.
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	82.626	94.591	99.603	62.288	74.154

Sumber data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan local di Kabupaten Hulu Sungai Utara berfluktuatif. Dengan merebaknya virus covid19 membawa pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan local pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 mulai menggeliat kembali akibat munculnya objek-objek wisata local yang memanfaatkan kearifan local seperti kolam pemancingan ikan, susur rawa/sungai dan lain-lain

b. Pertanian

Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Hulu Sungai Utara sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.58
Jumlah Produksi Padi dan Luas Areal Pertanian Organik Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi (Ton)	130.836	131.787	145.427	143.403	103.749	103.031
2	Luas Areal Pertanian Organik (Ha)	160,61	178,6	146,49	141,48	140,27	

Sumber : Dinas Pertanian Kab.HSU

Produksi tanaman pangan padi terlihat meningkat dari tahun 2016-2019 dan terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021. Keberhasilan pencapaian produksi padi ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman padi. Luas tanam dan luas panen padi tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena curah hujan yang cukup tinggi merata sepanjang tahun sehingga kondisi lahan sawah banyak tergenang air yang menyebabkan petani tidak dapat secara maksimal melakukan penanaman padi. Luas Areal Pertanian Organik selama tahun 2015-2017 berfluktuatif dan tahun 2018-2020 cenderung tetap dikisaran 140 Ha.

Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan peternakan, karena dari populasi akan terlihat jumlah ternak pada suatu wilayah, sekaligus merupakan gambaran keberhasilan wilayah tersebut dalam melakukan kegiatan peternakan. Bila dilihat tren perkembangannya, populasi ternak besar terlihat meningkat dari tahun 2016 s.d tahun 2020, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu besar kecuali pada tahun 2019 kenaikan cukup besar dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2020 menurun.

Tabel 2.54
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ternak Besar	10.983	9.843	9.793	9.809	9.747	
2.	Ternak Kecil	457	452	491	516	592	
3.	Ternak Unggas	4.871.401	4.822.548	4.902.958	5.059.196	3.454.088	

Sumber : Dinas Pertanian Kab.HSU

Untuk ternak kecil terjadi penurunan dari tahun 2016 s.d tahun 2018 disebabkan oleh banyaknya ternak yang terjangkit penyakit dan kondisi geografis yang tidak cocok, kemudian tahun 2019-2020 mulai meningkat. Adapun untuk populasi unggas terlihat memiliki tren peningkatan populasi

dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dan populasinya sedikit menurun pada tahun 2020.

Perkembangan produksi daging ternak besar dari tahun 2016 s.d 2021 cenderung tetap, dimana tahun 2017 paling tinggi dan tahun 2020 paling rendah. Produksi daging ternak unggas juga terlihat berfluktuatif dari tahun 2016 s.d 2021. Produksi telur unggas dari tahun 2016 s.d 2019 cenderung tetap dikisaran 11.000.000, kemudian tahun 2020 turun menjadi kurang dari 7.000 dan sedikit peningkatan di tahun 2021. Penurunan produksi pada tahun 2020 tidak terlepas dari kondisi pandemic covid 19 yang menyebabkan penurunan permintaan dan distribusi.

Tabel 2.55.
Produksi Ternak Kabupaten HSU 2016-2021

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Daging Ternak Besar (Kg)	427.410	514.158	427.782	428.173	338.534	346.021
2.	Daging Ternak Unggas (Kg)	2.756.779	2.131.803	2.927.113	2.961.570	2.184.552	2.183.928
3.	Telur Unggas (Kg)	10.558.713	10.287.018	10.821.016	11.146.525	6.719.807	6.830.606

Sumber : Dinas Pertanian Kab.HSU

c. Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lahan rawa dan sungai. Lahan rawa ini merupakan lahan rawa yang tergenang secara periodik dan monoton. Luas lahan potensi perikanan Kab. Hulu Sungai Utara mencapai 355 km². Produksi perikanan pada tahun 2020 mencapai 21.398,37 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya. Adapun keragaan produksi perikanan Kab. Hulu sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kab. HSU Tahun 2016-2019

NO	SUB SEKTOR	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perikanan Tangkap (ton)	12.290,6	12.210,5	12.304,10	12.438,85	12.316,34	12.319,665
2	Perikanan Budidaya (ton)	17.714,10	9.595,85	9.564,12	8.829,18	9.082,03	9.362,397

Sumber : Dinas Perikanan Kab.HSU

Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan Tangkap selama enam tahun terakhir dari tahun 2016-2021 cenderung tetap pada kisaran 12 ribu ton, sedangkan Sub Sektor Perikanan budidaya perkembangan produksinya selama enam tahun terakhir fluktuatif. Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi dengan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan setrum.

Tabel 2.57.
Jumlah Nelayan dan Petani Ikan serta Tingkat Konsumsi Ikan Th. 2013–2017

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nelayan Perairan Umum (Orang)	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545
2.	Petani Ikan (Orang)	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
3.	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/th)	44,06	44,08	44,06	44,06	44,08	44,08

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan tabel diatas jumlah nelayan, Petani/Pembudidaya Ikan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2016 s.d 2020 tetap dikarenakan Potensi Desa Nelayan terbaru tidak ada dan dilihat dari data produksi per tahun tidak ada peningkatan significant. Berdasarkan survey data statistik perikanan jumlah orang yang bermata pencaharian nelayan penangkap ikan sebanyak 18.545 akan tetapi ini bukan mata pencaharian utama bagi mereka tetapi merupakan mata pencaharian sambilan dan sambilan utama. Terlepas dari hal tersebut ini menunjukkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara sangat bergantung pada kemakmuran rawa secara langsung, apabila ekosistem rawa terganggu akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

d. Perdagangan

Dari banyaknya sarana perdagangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menunjukkan kondisi ideal. Kabupaten Hulu Sungai hanya memiliki 1 Pasar Induk dengan menjual berbagai macam komoditas. Selain itu terdapat juga pasar desa dan pasar rakyat yang tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Berikut perkembangannya.

Tabel 2.58.
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pasar Desa yang dikembangkan/dipelihara (%)	80	80	80	80	80

Sumber : Dinas Perindag,Kop & UKM Kab.HSU

Tabel 2.59.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informlal/ Kaki Lima (PKL)

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Bina kelompok pedagang/usaha informal/PKL	2.800	2.830	2.980	3.000	3.100

Sumber : Dinas PerindagKop & UKM Kab.HSU

e. Perindustrian

Sektor Industri yang tumbuh di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Industri Kecil dan Menengah. Dari tabel ibawah ini, Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) selama 5 tahun terakhir mengalami trend positif.Kenaikan yang melonjak yakni dari tahun 2019 ke Tahun 2020 yakni sebesar 2.988 IKM.

Tabel 2.60.
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab. HSU

N0	Tahun	IKM (Unit)
1	2017	35.194
2	2018	35.235
3	2019	35.279
4	2020	38.267
5	2021	38.327

Sumber : Dinas Perindag,Koperasi & UKM

Bila dilihat dari unit usaha formal dan non formal menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kerajinan yang bersifat home industri. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sebuah daerah otonom mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu mengurus 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemerintah Daerah tidak mengurus urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, seperti Urusan Luar Negeri, Pertahanan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, agama, dan lain-lain.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat terwujud masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sejahtera. Untuk itu berbagai kebijakan, program maupun kegiatan dilaksanakan. Dalam urusan pemerintahan sendiri telah dilaksanakan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi

pemerintah. Selanjutnya juga ada Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (Simda) dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pemerintah Daerah.

b. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang biasa disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tiga dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan daerah. Adapun untuk setiap SKPD harus memiliki perencanaan selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tiap tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022, yang merupakan tahapan keempat dari dokumen RPJPD yang sudah ada. Selanjutnya sekarang sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Adapun RKPD setiap tahun telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi dasar untuk penyusunan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi RAPBD dan APBD. Ke depannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dibenahi untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB kabupaten. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/ angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Selama periode 2016 -2020 total konsumsi rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat terus meningkat. Dari tabel terlihat adanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari tahun 2016-2018, namun terlihat menurun di tahun 2019 dan 2020. Hal ini tidak terlepas dari dampak akibat kondisi pandemic covid-19.

Tabel 2.61.
Angka Konsumsi Rumah Tangga Kab.HSU
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Konsumsi Rumah Tangga (Milyar)	2.651,72	2.788,15	2.931,30	3.047,25	3.036,47
2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (%)	3,64	3,75	3,79	2,66	-1,56

Sumber : BPS Kab.HSU

b. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Umumnya, pada rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi, porsi konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan) dipakai untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan.

Tabel 2.62
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan

No	KET	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Pengeluaran konsumsi per Kapita per bulan (Rp)	897.377	1.058.419	973.222	1.018.951
2	Pengeluaran konsumsi Non Makanan per Kapita per bulan (Rp)	408.401	511.587	489.010	514.491
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan	45.,51	48.34	50,25	50,53

Sumber : BPS Kab.HSU

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita didapatkan dari proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap pengeluaran. Berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan bahwa Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2017 s.d tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan karena konsumsi non makanan lebih besar dari konsumsi makanan, dimana artinya konsumsi makanan telah tercukupi.

d. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk berusia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Sedangkan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap penduduk yang belum produktif dan penduduk yang berusia diatas 65 tahun dianggap sebagai penduduk yang tidak produktif.

Dari Tabel dibawah rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2016 sd tahun 2020 cenderung tetap di kisaran 0.5.

Tabel 2.63.
Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	66.955	67.337	67.658	67.900	62.844
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	10.423	10.856	11.350	11.903	16.184
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	77.378	78.192	79.008	79.803	79.028
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	151.150	153.402	155.596	157.770	156.813
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020

2.4.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastuktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten.

a. Aksesibilitas Daerah (Jaringan Jalan Darat dan Sungai)

Dari sisi indeks aksesibilitas jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) hal ini dikarenakan jaringan panjang jalan masih cukup pendek. Sesuai dengan kondisi yang ada, saat ini semua ibu kota kabupaten telah terhubung oleh jaringan jalan provinsi dan nasional, sehingga untuk kabupaten dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimum perlu diarahkan melalui pengembangan jaringan jalan kabupaten. Capaian jaringan jalan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Dari sisi transportasi, sesuai kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari transportasi darat dan transportasi sungai. Kedua sistem transportasi tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam melayani pergerakan di dalam wilayah maupun dari dan keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.64
Analisis Capaian Jaringan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

Luas Kabupaten (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Panjang Jalan (Km)	Aksesibilitas (Km/Km2)		M/TM
				Eksist.	Syarat	
892,7	228.528	256,00	391,541	0,44	> 0,15	TM

Keterangan : M = Memenuhi, TM = Tidak Memenuhi

Transportasi sungai sangat vital dalam melayani wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan transportasi darat dan wilayah-wilayah perairan/rawa.

Dalam transportasi sungai dan rawa, sungai dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran dengan sarana yang dipakai meliputi jukung, motor tempel, motor boat, kelotok, dan long boat. Untuk menunjang kelancaran arus transportasi sungai, maka jalur pelayaran yang dilalui oleh sarana angkutan sungai dilengkapi oleh rambu-rambu lalu-lintas sungai. Prasarana ini diletakkan dipinggir sungai dan mudah dibaca oleh para pengguna transportasi sungai.

Prasarana lainnya yang sangat vital dalam perangkutan sungai dan rawa adalah pelabuhan sungai. Pelabuhan sungai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Pelabuhan Danau Panggang, Pelabuhan Babirik, Pelabuhan Sungai Pandan (Alabio), Pelabuhan Muara Tapus, Pelabuhan Negara, Pelabuhan Amuntai.

b. Penataan Wilayah

Dari tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berusaha menetapkan Perda RTRW Kabupaten yang sesuai dengan UU 26 tahun 2007. Akhirnya Perda RTRW ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032.

Untuk pengembangan wilayah perkotaan direncanakan untuk pembangunan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa permasalahan keruangan di Kota Amuntai antara lain :

- Bencana banjir yang melanda Kota Amuntai hampir tiap tahun merupakan salah satu penyebab perlunya pengembangan wilayah Kota Amuntai
- Banjir mengganggu fungsi Kota Amuntai sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- Tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang terus meningkat memerlukan upaya pengembangan permukiman dan perumahan yang layak dalam rangka permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur serta penyebaran atau pendistribusian penduduk yang rasional.
- Terlalu terpusatnya seluruh kegiatan di Kota Amuntai menyebabkan stagnansi dalam pertumbuhannya.

- Adanya rencana pembangunan fasilitas-fasilitas strategis seperti perkantoran dan infrastruktur yang baru, yaitu pembangunan Kantor DPRD, pembangunan pasar serta fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas pendidikan (sekolah).
- Penetapan Kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Perkotaan Amuntai.

Adanya beberapa permasalahan dan kebijakan terkait Kota Amuntai tersebut, sehingga diperlukan pengembangan Kota Amuntai agar pembangunan Kota Amuntai lebih terarah. Pengembangan Kawasan ini memerlukan skenario yang meliputi berbagai aspek perencanaan yang dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan secara bertahap. Dengan keterpaduan ini diharapkan pengembangan wilayah ini dapat terselenggara dengan lebih terkoordinasi serta berjalan secara sinergis dengan pengembangan bagian-bagian lain dari kawasan perkotaan Amuntai.

d. Ketersediaan Air Bersih

Cakupan pelayanan untuk sistem pelayanan non perpipaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menggunakan sumur bor telah banyak dibangun dari proyek Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di perdesaan. Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada Tabel terlihat pelayanan air bersih dengan pengguna jaringan perpipaan di Kabupaten Hulu sungai Utara pada tahun 2020. Jaringan perpipaan aman perkotaan mencapai 13,60% sedangkan jaringan perpipaan aman perdesaan layak mencapai 81,30% dan aman 0,80%. Total penduduk yang terlayani akses layanan air minum 76,50 % dan belum terlayani 10,10 % sedangkan total penduduk akses aman air minum mencapai 13,40%

Pada Tabel terlihat pelayanan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencapai 85,43%. Sedangkan target RPJMN tahun 2019 untuk akses penduduk pengguna air bersih atau air minum layak sebesar 100%, sehingga masih ada gap sebesar 14,72%.

Tabel 2.65
Pelayanan Air Bersih Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Jaringan Perpipaan (%)				Total Penduduk Belum Terakses Air Minum (%)	Total Penduduk Terlayani Akses Layak Air Minum (%)	Total Penduduk Akses Aman Air Minum (%)
					Perkotaan		Perdesaan				
					Layak	Aman	Layak	Aman			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	16	17	18
2016	207.250	61.170	43.887	163.363		3,60	71,30	0,00	12,90	74,50	12,60
2017	207.292	61.182	43.896	163.396		6,10	73,80	0,20	12,20	75,00	12,80
2018	207.333	61.194	43.904	163.429		8,60	76,30	0,40	11,50	75,50	13,00
2019	207.375	61.207	43.913	163.461		11,10	78,80	0,60	10,80	76,00	13,20
2020	207.416	61.219	43.922	163.494		13,60	81,30	0,80	10,10	76,50	13,40

Sumber: Dinas PUPR 2021

Hasil dari pemeriksaan Laboratorium pada air baku di pelanggan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada parameter turbidity 95,6% memenuhi syarat dan 4,4% tidak memenuhi syarat, pada parameter sisa chlor 94,9% memenuhi syarat dan 5,1% tidak memenuhi syarat. Sedangkan parameter suhu dan pH 100% memenuhi syarat. Hasil dari pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, air minum PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara 100% memenuhi syarat kesehatan.

Tabel 2.66.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A	Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB	5,71	5,81	5,54	-0,67	3,32	-
2	PDRB per kapita :						
	a. ADHK	18.093,64	19.496,02	21.111.900	21.952.770	22.960.700	+
	b. ADHB	12.858,22	13.433,48	14.210,21	14.594,54	14.901,05	+
3	Indek Gini	0,309	0,325	0,325	0,319	0,378	-
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	93,35	93,62	93,50	93,86	93,17	-
5	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	1,22	1,14	0,66	0,85	0,76	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,21	65,06	65,49	65,59	66,12	-
B	Kesejahteraan Sosial						
1	Harapan Lama Sekolah	12,82	12,83	12,88	12,91	12,92	-
2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,19	7,36	7,37	7,53	7,75	+
3	Angka usia harapan hidup	62,94	63,24	63,58	63,83	64,10	+
4	Persentase balita gizi buruk	4.88	8.27	10.02	9.41	9.53	-
5	Prevalensi balita gizi kurang	24.02	22.63	22.49	22.11	18.65	+
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,58	70,55	68,94	70,08	71,41	-
7	Tingkat pengangguran terbuka	4,11	3,76	3,35	4,49	4,80	-
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,40	79,33	78,86	78,94	77,41	-
9	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp)	131.597.974.168,19	104.839.104.906,67	141.448.897.477,45	124.970.257.488,34	123.541.201.164,04	+
10	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	+
11	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)						
	a. PPH Konsumsi	79,3	80	81,2	81,5	82,3	+
	b. PPH Ketersediaan	59,82	60,53	61,12	59,28	60,35	+

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
12	Penguatan cadangan pangan	15	0	10	0	6,75	-
13	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB:	451.823,58	482.854,21	488.358,03	490.998,43	486.874,76	-
14	Produksi sektor pertanian (Padi) (ton)	131.787	145.247	143.403	105.066	73.787	-
15	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Juta Rp)	35.663,26	36.098,21	36.534,35	35.584,42	38.442,30	+
16	Produksi sektor perkebunan (kg)						
	- Karet	385.000	415.752	405.341	409.749	403.080	-
17	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (Juta Rp)	385.723,40	437.459,51	468.481,62	471.753,54	493.302,10	+
23	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (Juta Rp)	418.650,00	452.750,00	487.370,00	464.060,00	485.480,00	-
24	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (Juta Rp)	309.330,00	318.380,00	325.660,00	316.240,00	324.670,00	-
25	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	7,26	7,34	7,34	7,65	8,90	+
II	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	<u>PELAYANAN URUSAN WAJIB</u>						
A	Terkait Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73,89	67,92	68,02	64,52	58,96	-
	Angka partisipasi kasar						
	a. SD/MI	113,84	112,40	108,64	106,97	105,40	+
	b. SMP/MTs	83,98	85,44	84,31	85,86	82,10	-
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan						
	a. SD/MI	36,14	36,45	29,98	30,40	29,12	-
	b. SMP/MTs	13,77	16,12	20,48	23,01	20,15	+

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
	c. SMA/SMK/MA	13,9	9,95	13,95	14,60	16,64	-
	d. D1-D3	9,88	2,46	3,45	3,61	4,12	-
	e. D.IV/S-1/S-2/S-3	9,88	5,99	8,40	8,79	10,01	-
1.3	Angka Partisipasi Murni						
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,61	99,98	99,51	99,34	98,86	-
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75,18	73,66	75,66	75,69	75,47	-
	c. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	59	55,48	56,10	56,97	56,50	
1.4	Angka partisipasi sekolah						
	a. 7-12 Tahun	99,61	99,98	99,51	99,34	99,20	-
	b. 13-15 Tahun	90,74	91,44	91,96	93,74	93,29	-
	c. 15-18 Tahun	72,04	55,48	65,49	66,21	65,78	
1.5	Angka Putus Sekolah						
	a. SD/MI	0,06	0,09	0,12	0,04	0,13	+
	b. SMP/MTs	0,28	0,35	0,37	0,58	0,46	-
	c. SMA/SMK/MA						
1.6	Fasilitas Pendidikan						
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79	88	90	90	89	-
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	84	86	95	93	91	+
1.7	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	11,91	11,73	11,93	11,87	11,87	+
1.8	Rasio guru/murid SMP/MTs	9,12	9,43	9,92	9,26	9,26	-
1.9	Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK	9,82	9,34	7,97	7,98	7,98	-
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	17.15	22.50	20.30	12,90	15.70	+
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	983	978	980	987	984,00	+
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	4,40	5,70	5,2	3,60	4,40	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	14,60	18,40	16,70	11,00	12,50	+
2.5	Jumlah Kematian Ibu (orang)	6	5	5	6	12	-
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	11,82	15,01	19,66	21,58	21,43	-
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	-
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	0,14	0,16	0,15	0,13	0,16	+
2.9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,40	2,48	2,70	2,04	2,26	+
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	149.53	166.70	182,00	168.60	185,10	+
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85.03	86.43	85.79	80.70	93,67	+
2.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	59,40	90.9	59.8	62.1	49,80	-
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	+
2.14	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap	82.60	82,60	80,17	73,50	76,49	-
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100	+
2.16	Angka Konversi TB	84,75	88,90	92,03	79,50	75,46	-
2.17	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0	+
2.18	Angka Kesembuhan Pengobatan TB (%)	94,36	93,56	88,27	93,29	91,71	-
2.19	Persentase kasus HIV yang ditemukan dan ditangani	100	100	100	75,11	77,62	-
2.20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	+

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
2.21	Penderita diare yang ditangani (%)	87,00	100	100	100	100	+
2.22	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	+
2.23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	+
2.24	Cakupan kunjungan bayi	72.01	77,00	73.40	57.60	64,51	-
2.25	Cakupan puskesmas	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	+
2.26	Cakupan pembantu puskesmas	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	+
2.27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	75.08	75.91	75.4	74.13	82,93	+
2.28	Cakupan pelayanan nifas	83.05	85.10	85.30	79.90	82,90	-
2.29	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	62,00	68.10	40.10	56.70	64,70	+
2.30	Cakupan pelayanan anak balita	43.47	49.1	40.1	39.03	46,67	+
2.31	Cakupan pelayanan keshtn dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	+
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Pekerjaan Umum:						
3.1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	45,45	45,45	45,73	47,28	51,24	-
3.2	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	11,87	11,42	10,96	10,96	10,96	+
3.3	Persentase jalan kab dalam kondisi baik (%)	45,45	45,45	45,73	47,28	51,24	+
3.4	Penduduk yang memiliki sanitasi layak (%)	65,24	75,80	88,96	89,7	91,84	-
3.5	Rasio Jaringan Irigasi	17,5	18,72	19,49	41,59	44,34	+
3.6	Persentase penduduk berakses air bersih	74,50	80,27	88,27	90,02	92,47	-
	Penataan Ruang :						
3.8	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.9	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	3,92	3,93	3,94	4,11	4,12	+
3.10	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	1,49	1,58	1,72	2,11	2,36	+
3.11	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	0	0	0	0	0	+
3.12	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,29	0,29	0,29	0,22	0,22	-
3.13	Persentase peruntukan lahan yang sesuai	99,71	99,58	99,75	99,75	99,75	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Pengurangan kawasan Kumuh Perkotaan (%)	0	60,21	76,71	81,04	86,78	+
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,14	0,05	0,03	0,03	0,02	+
4.3	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,44	60,47	40,8	18,6	30,3	-
4.4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	NA	39,29	29,7	25,86	25,86	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	-
5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	65	125	100	100	100	+
5.3	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) penanganan kebakaran dalam radius 10 Km (%)	75	100	88,46	94,74	77,78	-
5.4	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang diselesaikan	50	50	55	71,43	80	+
6	Sosial						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	47,16	63,48	76,63	82,84	73,54	+
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	47,2	63,53	76,69	82,97	74,13	+
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	47,16	63,48	76,63	82,84	73,54	+
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	+
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial	4,48	12,98	4,92	12,49	38,32	-
B	Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kejuruan (org)	64	560	864	144	256	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,13	54,34	54,34	54,92	56,41	+
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	16,67	16,67	20	20	20	-
2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	41,70	49,10	49,50	44,26	44,72	-
2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,007	1,000	1,009	1,013	1,008	+
2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,084	1,200	0,861	1,170	0,747	-
2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,147	1,106	1,216	1,114	1,276	+

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	
2.8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,36	92,09	91,59	91,52	91,74	-
2.9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,50	64,59	70,36	70,36	70,65	+
2.10	Persentase Pengaduan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	100	100	100	100	100	+
2.11	Status Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak	500	865.99	632,50	632,5	632,5	-
3	Pangan						
3.1	Ketersediaan pangan utama (Kg/Kapita)	329,74	371,39	349,28	263,9	246,47	-
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita						
	-Total Energi (kkal/kapita/tahun)	3,754,00	4.487,000	4,286	3.386,00	3.176,00	-
	-Total Protein (gram/kapita/tahun)	123.49	125,01	120,89	99,39	99,48	+
3.3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (%)	87,90	88,88	89,66	90,20	88,00	-
3.4	Stabilisasi Harga Pangan dan Pasokan	91,00	87,50	86,43	82,22	80,00	-
4	Pertanahan						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	6,78	7,61	8,22	9,25	10,28	+
4.2	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100	+
5	Lingkungan Hidup						
5.1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada	+
5.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	45	44,34	47,08	60	55	-
5.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	71,86	89,64	89,77	89,11	89.40	-
5.4	Timbulan sampah yang ditangani (%)	41,42	42,48	43,49	72,9	72,28	+

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.5	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	5,81	11,66	12,17	12,27	13,23	-
5.6	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	35,57	45,66	55,25	57,99	68,49	+
5.7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,42	42,48	43,49	72,09	72,28	+
5.8	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kab/kota	82,57	72,57	75,85	75,85	81,07	+
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100	100	100	100	100	+
6.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun (%)	81,45	92,84	97,17	93,10	97,98	+
6.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	+
6.4	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (%)	95,16	100,00	100,00	100,00	99,82	+
6.5	Cakupan penduduk berakta kelahiran (%)	39,37	45,43	48,97	53,3	53,97	-
6.6	Jumlah kepemilikan akta kematian (orang)	19	40	50	442	1349	+
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	149	155	160	200	214	+
7.2	Persentase LPM Aktif	5,6	8,21	17,80	21,00	52,51	+
7.3	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	80	90	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	1,34	1,30	1,39	0,78	0,70	+
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,41	2,41	2,46	2,46	2,46	+
8.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	-
8.4	Ratio Akseptor KB	7,62	7,85	7,69	8,11	8,57	-
8.5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia	29.094	30.079	32.072	36.552	39.032	+

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
	15 – 49						
8.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2,94	2,25	2,13	2,26	2,38	+
8.7	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	90,44	88,87	89,07	88,59	91,32	+
8.8	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	83,18	82,51	81,82	84,90	86,46	+
8.9	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	72,34	71,46	71,43	85,59	86,73	+
8.10	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	1	1	1	1	+
8.11	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100	+
9	Perhubungan						
9.1	Pemasangan rambu-rambu (%)	100	100	100	100	94	-
10	Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	52	61	64	67	67	+
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1	Persentase koperasi aktif	76,19	70,63	70,63	44,09	44,53	-
11.2	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja	8,50	19,39	14,30	4,94	16,91	+
12	Penanaman Modal						
12.1	Jumlah Perizinan yang diterbitkan :						
	a. SIUP	324	265	373	294	170	-
	b. TDP	168	128	188	191	80	-
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	56,00	56,00	70,00	70,00	62,50	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	24	25	27	29	34	-
13.3	Persentase atlet berprestasi di tingkat Provinsi	72	47	82	67	50	+
14	Statistik						
14.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	+
14.2	Buku "PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	+
15	Persandian						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	88,52	88,52	88,52	88,52	88,52	+
16	Kebudayaan						
16.1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	13	13	13	13	13	+
16.2	Benda cagar budaya yang dilestarikan	6	6	6	6	6	+
17	Perpustakaan						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	38.841	37.252	56.860	17.453	29.966	-
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	22.115	31.233	33.873	36.601	37.903	+
17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	3.237	3.105	4.739	1.455	1.131	-
17.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	15.917	16.817	17.766	18.948	19.547	+
18	Kearsipan						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	24	19,80	38,50	56,32	47,10	-
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (%)	57,30	57,30	100	100	47,10	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
	<u>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</u>						
1	Pariwisata						
1.1	Destinasi wisata (buah)	19	20	20	20	20	-
1.2	PAD sektor pariwisata (Juta Rp)	142,00	139,00	210,00	125,50	175,60	+
2	Pertanian						
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	451.823,58	482.854,21	488.358,03	490.998,43	486.874,76	-
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	35.663,26	36.098,21	36.534,35	35.584,42	38.442,30	+
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100	100	100	100	100	+
4	Perdagangan						
4.1	Persentase pasar desa yang dikembangkan (%)	20	20	20	20	20	+
5	Perindustrian						
5.1	Persentase Pertumbuhan Indusri Kecil Menengah (%)	7,26	7,34	7,34	7,55	8,90	+
6	Kelautan dan Perikanan						
6.1	Produksi perikanan						
	-Perikanan Tangkap	12.210,50	12.304,12	12.438,85	12.316,33	12.325,34	+
	-Perikanan Budidaya	9.595,85	9.564,12	9.564,12	9.082,03	9.362,40	-
6.2	Konsumsi ikan	44,02	44,06	44,06	44,06	58,68	
	<u>PENUNJANG URUSAN</u>						
1	Perencanaan Pembangunan						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	+
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	+
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	+
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	+
2	Keuangan						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	+
2.2	Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	+
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
3.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,045	0,043	0,035	0,01	0,04	-
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	2,24	3,09	3,04	2,72	2,06	-
3.3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	149	149	149	148	148	+
3.4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	20	78	128	206	206	+
4	Penelitian dan Pengembangan						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100	+
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100	+

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
5	Pengawasan						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	72,50	0,82	80,00	81,60	67,00	-
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	0,003	0,002	0,001	0,000	0,001	+
5.3	Jumlah temuan BPK	9	14	12	14	12	-
6	sekretariat Dewan						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	60	70	80	85	90	+
6.2	Tersusun & terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	60	70	80	85	90	+
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	60	70	80	85	90	+
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
A	Kemampuan Ekonomi						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Milyar Rp)	10.768.524	12.701.028	11.678.664	12.227.412	14.382.936	+
2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Milyar Rp)	4.900.812	6.139.044	5.868.120	6.178.692	7.511.340	+
3	Produktivitas Total Daerah:						
	a.Primer	17.604.788,35	17.957.078,41	17.742.574,26	17.076.468,23	16.760.324,68	-
	b.Sekunder	104.329.150,58	90.331.557,92	80.512.325,34	68.520.352,58	62.579.229,22	-
	c.Tersier	544.631.736,53	444.398.435,70	384.866.479,93	323.232.751,85	289.455.902,31	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja					Catatan (tercapai (+)/tidak (-))
		2017	2018	2019	2020	2021	
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	1,41	1,54	1,66	1,48	1,88	+
B	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur						
1	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang)	1.665,00	1.718,00	1.665,00	1.637,00	1.313,00	-
2	Ketaatan terhadap RTRW (%)	99,71	99,58	99,75	99,75	99,75	-
3	Luas Wilayah Produktif (ha)	39.605,55	39.605,08	39.598,02	39.598,02	39.589,46	+

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena kabupaten/kota tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Dilaksanakannya otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan menggali berbagai potensi yang dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan hal ini maka pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sangat penting dalam menopang pembangunan secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 dan 2021 serta tahun 2022 yang sedang berjalan ini. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Hulu Sungai Utara periode tahun 2018-2021, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2021 (Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2018	104.839.104.906,67	1.150.126.176.325,67	9,11
2019	140.746.276.569,45	1.268.138.398.214,45	11,09
2020	125.044.221.716,34	1.231.664.954.683,34	10,15
2021	105.591.017.598,81	1.062.442.492.585,81	9,93
2022**	120.243.760.050,00	990.817.341.050,00	12,13
Rata-rata	119.292,876.168,77	1.140.637.872.571,66	10,45

Sumber: BPKAD Kabupaten HSU, 2022

** Masih proyeksi pada tahun berjalan

Dari tabel 3.1 di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Hulu Sungai Utara relatif masih kecil yakni dengan rata-rata 10,45 %. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kisaran derajat fiskal daerah antara yang terkecil ditahun 2018 sebesar 9,11 % sampai dengan 12,13 % yang diperoleh ditahun 2022. Diharapkan di tahun – tahun mendatang, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami perkembangan yang agak berfluktuasi namun cenderung stabil di atas angka 1 trilyun rupiah baik pendapatan maupun belanja daerah yang dilaksanakan. Secara lebih jelas kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.
Perkembangan APBD dan Realisasi APBD
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2021 (Ribuan Rupiah)

URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022 (Rencana Tahun Berjalan)	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pendapatan	1.123.643.571.511	1.150.126.176.325	1.224.200.343.803	1.268.138.398.214	1.261.060.536.942	1.209.504.014.011	1.196.914.567.805	1.062.442.492.585	990.817.341.050	-
Belanja	1.291.748.943.846	1.147.043.260.450	1.392.346.651.064	1.238.750.030.204	1.458.395.566.501	1.220.504.971.063	1.589.009.699.366	1.188.411.447.465	1.301.243.762.456	-
Surplus (Defisit)	(168.105.372.334)	3.082.915.875	(168.146.307.260)	29.388.368.010	(197.335.029.559)	(11.000.957.051)	(392.095.131.561)	(125.968.954.879)	(310.426.421.406)	-
Penerimaan Pembiayaan	171.304.024.454	171.315.879.454	171.446.307.260	171.446.307.260	197.335.029.559	197.335.029.559	392.095.131.561	208.255.861.916	352.926.421.406	-
Pengeluaran Pembiayaan	171.304.024.454	171.304.024.454	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0	0	0	42.500.000.000	-
Pembiayaan Netto	168.105.372.334	168.495.879.454	168.146.307.260	168.146.307.260	197.335.029.559	197.335.029.559	392.095.131.561	208.255.861.916	310.426.421.406	-
SILPA	171.304.024.454	171.304.024.454	171.446.307.260	171.446.307.260	197.335.029.559	197.335.029.559	182.095.131.561	182.095.131.560	166.676.421.406	-

Sumber : BPKAD (LRA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 - 2021

Pada tabel 3.2. diatas bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 melebihi dari anggaran/target, sedangkan untuk tahun 2022 atau pada tahun berjalan sekarang ini target pendapatan daerah berkurang menjadi dibawah 1 trilyun rupiah. Ada kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir ini khususnya dimasa pandemi covid_19 dana transfer Pemerintah Pusat mengecil yang ditransfer ke daerah. Hal ini tidak terlepas dari adanya tekanan alokasi anggaran yang harus dianggarkan untuk penanganan pandemi covid_19 yang tidak kecil jumlahnya secara nasional.

a. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah ini dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Transfer Pusat (meliputi Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, dan Dana Transfer Lainnya); serta Transfer Antar Daerah (meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi, Bantuan Keuangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain Pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber pendapatan daerah ini merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Realisasi APBD
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2021 (Ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pendapatan	1.150.126.176.325	1.268.138.398.214	1.209.504.014.011	1.062.442.492.585	1.172.552.770.284
Belanja	1.147.043.260.450	1.238.750.030.204	1.220.504.971.063	1.188.411.447.465	1.198.677.427.296

Sumber: : Diolah dari data BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tahun 2018 - 2021

Dari tabel 3.3 di atas tampak rata-rata pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 1.172.552.770.284. Di sini terlihat bahwa ada kecenderungan penurunan pendapatan daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Karenanya perlu untuk dicari potensi-potensi pendapatan daerah yang dapat dijadikan sumber peningkatan pendapatan daerah. Kecenderungan penurunan pendapatan daerah ini juga tidak terlepas dari berkurangnya transfer dana pusat baik yang bersumber dari dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Tekanan terhadap pendapatan daerah ini secara umum adalah merupakan dampak dari masa pandemi covid_19 yang harus diatasi dengan mengalokasikan dana yang besar secara nasional. Oleh karenanya pengendalian dan keberhasilan pemerintah untuk memusnahkan pandemi covid_19 ini akan sangat membantu dalam hal optimalisasi alokasi anggaran

pada tahun-tahun mendatang terhadap program-program pembangunan baik secara nasional maupun regional.

Dengan demikian, PAD harus tetap diperhatikan konsistensinya sehingga proporsi pendapatan daerah terhadap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan (lihat kembali tabel 3.1). Untuk melihat perilaku (*behaviour*) dari pendapatan asli daerah dapat terlihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4.
Capaian Pendapatan Asli Daerah Kab. HSU Tahun 2018-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2018	112.952.833.592,00	104.839.104906,67	92,82
2019	123.291.641.278,24	140.746.276.569,45	114,16
2020	147.706.246.215,00	126.983.048.244,34	85,07
2021	145.123.828.478,00	105.591.017.598,81	72,76

Sumber LRA Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Kinerja dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari indikator Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp 104.839.104906,67 meningkat menjadi Rp 140.746.276.569,45 pada tahun 2019, tetapi kemudian turun menjadi Rp 126.983.048.244,34 pada tahun 2020, dan selanjutnya ditahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi Rp. 105.591.017.598,81 (lihat tabel 3.4).

Pencapaian realisasi penerimaan PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 sebesar 92,82 % dan berhasil meningkat menjadi 114,16 % ditahun 2019. Selanjutnya ditahun 2020 realisasi capaian menurun menjadi hanya 85,07 % dan ditahun 2020 kembali mengalami penurunan dimana realisasinya yang berhasil diwujudkan hanya mencapai sebesar 72,76%.

Terhadap Pendapatan Transfer yang istilah ini dimulai tahun 2021 (pada tahun-tahun sebelumnya adalah Dana Perimbangan) dari target Rp. 999.919.025.688,00 berhasil direalisasi 95,63% yakni sebesar Rp. 956.196.508.987,00. Ditahun 2020 Dana Perimbangan yang ditergetkan adalah sebesar Rp. 805.696.470.177,00 dan berhasil direalisasi sebesar Rp. 803.011.058.896,00 atau mencapai 99,66%. Pada tahun 2019 dari target pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan diperoleh capaian 102,46% yakni dari target Rp. 812.334.414.850,00 berhasil direalisasikan sejumlah Rp. 832.348.840.403,00. Demikian pula ditahun 2018 dari target pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp. 777.987.035.000,00 berhasil diperoleh realisasi sebesar Rp. 799.129.266.905,00 atau mencapai 102,72% dari target. Secara rinci terlihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Dana Transfer/Perimbangan Tahun 2018 - 2021

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2018	105.265.377.000,00	138.139.078.727,00	131,23
		2019	110.528.645.850,00	131.738.548.285,00	119,19
		2020	174.043.500.177,00	179.994.126.845,00	103,42
	(dana perimbangan)	2021	740.640.822.688,00	713.131.856.228,00	96,29
2	Dana Alokasi Umum	2018	485.062.285.000,00	485.062.285.000,00	100,00
		2019	490.413.410.000,00	507.610.007.000,00	103,51
		2020	457.931.491.000,00	454.719.805.000,00	99,29
	(dana insentif daerah)	2021	9.638.926.000,00	9.638.926.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	2018	187.659.373.000,00	175.927.903.178,00	93,75
		2019	211.392.359.000,00	193.000.285.118,00	91,30
		2020	173.721.479.000,00	168.297.127.051,00	100%
	(dana desa)	2021	172.389.277.000,00	172.222.983.600,00	100,00
4	Jumlah	2018	777.987.035.000,00	799.129.266.905,00	102,72
		2019	812.334.414.850,00	832.348.840.403,00	102,46
		2020	173.721.479.000,00	168.297.127.051,00	96%
	(Pendapatan Transfer)	2021	999.919.025.688,00	956.196.508.987,00	95,63

Sumber : BPKAD (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah kurun waktu tahun 2018- 2020 meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Insentif Daerah. Semenjak tahun 2021 komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah ini mengalami perubahan dimana unsur pendapatan yang ada hanya terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tabel 3.6 berikut dirincikan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan unsur pendapatannya, yakni :

Tabel 3.6.
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 - 2021

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	2018	18.847.000.000,00	17.122.520.000,00	90,85
		2019	20.118.600.000,00	9.339.419.000,00	46,42
		2020	26.169.847.200,00	0,00	00,0
		2021	34.416.463.639,00	654.966.000,00	1,26
2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2018	32.283.965.919,26	60.337.547.514,00	186,90
		2019	60.000.810.675,00	77.248.985.242,00	128,75
		2020	73.426.777.350,00	62.643.347.871,00	85,31
		2021	77.250.000.000,00	61.202.743.159,00	79,23
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2018	155.822.737.000,00	155.822.737.000,00	100
		2019	174.701.975.000,00	174.701.975.000,00	100
		2020	172.389.277.000,00	172.389.277.000,00	100
		2021	0,00	0,00	0,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	2018	0,00	00,0	00,0
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		2021	0,0	0,0	0,0
5	DBH SDA Pertambangan Umum dari Propinsi atau Pemda lainnya	2018	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00
6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan	2018	0,00	00,0	0,00
		2019	0,00	00,0	0,00
		2020	00,0	00,0	0,00

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Pemb.Daerah	2021	0,00	0,00	0,00
7	Dana Insentif Daerah	2018	25.750.000.000,00	12.875.000.000,00	50,00
		2019	33.752.902.000,00	33.752.902.000,00	0,00
		2020	35.671.919.000,00	44.477.282.000,00	124,68
		2021	0,00	0,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2021	17.455.250.000,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara

b. Kinerja Pelaksanaan Belanja

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan belanja daerah yang merupakan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, Khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan baik. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Penyerapan anggaran yang direalisasikan juga merupakan hal penting dan mendasar bagi berhasilnya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, karena dengan adanya anggaran yang telah direalisasikan pelaksanaannya maka akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat melalui *multiplier effect* atau efek pengganda dari pembangunan yang dilakukan. Tabel 3.7 berikut merupakan gambaran realisasi atau

penyerapan anggaran yang berhasil dicapai selama tahun 2018 hingga tahun 2021.

Tabel 3.7.
Belanja Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2018 - 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2018	1.291.748.943.846,00	1.147.043.260.450,50	88,79
2019	1.392.346.651.064,15	1.238.750.030.204,00	88,96
2020	1.458.395.566.501,36	1.220.504.971.063,00	83,68
2021	1.589.009.699.366,00	1.188.411.447.465,53	74,78
2022	1.301.243.762.456,00	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berhasil dicapai tahun 2018 adalah sebesar 88,79% atau nominal Rp 1.147.043.260.450,50. Pada tahun 2019 realisasi Belanja Daerah secara nominal naik menjadi Rp 1.238.750.030.204,00 atau 88,96%. Kemudian untuk tahun 2020 realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 1.220.504.971.063,00 atau sebesar 83,86% dari anggaran yang tersedia. Pada tahun 2021 realisasi Belanja Daerah yang berhasil diserap sebesar Rp. 1.188.411.447.465,53 atau meliputi 74,78% dari anggaran tersedia. Rendahnya persentase serapan anggaran ditahun 2020 dan 2021 karena adanya beberapa kali terjadi perubahan/pemangkasan anggaran yang diperuntukkan untuk penanggulangan pandemic covid 19 yang terjadi.

Realisasi terhadap Belanja Tidak Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 sampai 2020 yakni sebesar Rp 640.350.697.837,00 (92,52%) ditahun 2018. Pada tahun 2019 realisasi Belanja Tidak Langsung bertambah secara nominal yakni Rp. 668.235.209.910,00 (91,22%), kemudian pada tahun 2020 realisasi nominal bertambah menjadi sebesar Rp. 676.423.863.778,00 (82,40%).

Realisasi terhadap Belanja Langsung tahun 2018 sampai tahun 2020 yakni, tahun 2018 realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 506.692.562.613,50 atau mencapai 84,50% dari anggaran yang tersedia. Pada tahun 2019 Belanja

Langsung yang terealisasi sebesar Rp. 570.514.820.294,00 atau sebesar 86,47% dari anggaran; dan pada tahun 2020 realisasinya Rp. 544.081.107.285,00 atau mencapai 85,34 % dari anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2021 struktur belanja daerah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam hal ini untuk belanja daerah terbagi dalam empat hal yakni Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Kemudian Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Selanjutnya Belanja Tidak Terduga hanya terdiri dari satu sub belanja yakni Belanja Tidak Terduga. Kemudian untuk Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 yang direalisasi melalui Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 741.628.513.776,46 atau sebesar 82,10% dari anggaran tersedia. Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp. 194.904.401.374,07 atau 46,28% dari anggaran. Belanja Tidak Terduga yang direalisasikan sebesar Rp. 3.146.283.815,00 atau meliputi 20,14% anggaran yang tersedia. Yang terakhir adalah pada Belanja Transfer dimana realisasi sebesar Rp. 248.732.248.500,00 atau mencapai 99,93% dari anggaran tersedia.

Jika dilihat dari realisasi komponen belanja daerah dari Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 – 2020 serta komponen belanja tahun 2021, maka pencapaian realisasi belanja ini sangat bervariasi pada setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Belanja Tidak Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2018-2021

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2018	454.996.324.137,00	407.255.396.873,00	89,50
		2019	465.413.167.794,15	410.586.196.540,00	88,22
		2020	471.931.563.180,00	395.565.751.165,00	83,81
		2021	475.237.240.307,00	429.170.211.169,00	90,31
2	Belanja Subsidi	2018	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	2018	10.361.830.000,00	9.942.541.669,00	95,95
		2019	14.428.507.500,00	11.028.750.944,00	76,44
		2020	11.774.200.000,00	9.745.300.000,00	82,76
		2021	36.987.453.072,00	18.064.549.497,00	48,84
4	Belanja Bantuan Sosial	2018	6.786.952.700,00	6.007.352.700,00	88,51
		2019	6.997.190.000,00	5.927.890.000,00	84,72
		2020	6.701.600.000,00	4.390.050.000,00	65,50
		2021	10.390.920.000,00	8.407.000.000,00	80,91
5	Belanja Bantuan Keuangan	2018	215.868.954.995,00	215.568.954.995,00	99,86
		2019	238.806.283.210,00	238.742.597.741,00	99,97
		2020	244.324.194.531,00	244.324.194.531,00	100,00
		2021	246.762.541.900,00	246.596.248.500,00	99,93
6	Belanja Tidak Terduga	2018	2.544.200.000,00	0,00	0,00
		2019	5.000.000.000,00	5.605.000,00	0,11
		2020	84.012.154.573,36	19.737.568.082,00	23,49
		2021	15.620.881.791,00	3.146.283.815,00	20,14
7	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2018	692.139.495.832,00	640.350.697.837,00	92,52
		2019	732.589.318.189,15	668.235.209.910,00	91,22
		2020	820.864.712.284,36	676.423.863.778,00	82,40
		2021	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Demikian pula terhadap komponen belanja dalam Belanja Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 – 2020 serta komponen belanja daerah tahun 2021 sangat bervariasi dan berfluktuasi sebagaimana tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9.
Belanja Langsung Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2018 – 2021

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2018	38.996.457.500,00	31.915.731.500,00	81,84
		2019	40.088.082.000,00	31.454.769.700,00	78,46
		2020	29.025.501.000,00	24.647.956.500,00	84,91
		2021	475.237.240.307,00	429.170.211.169,00	90,31
2	Belanja Barang dan Jasa	2018	315.870.109.019,00	265.352.329.190,50	84,01
		2019	363.039.210.652,00	310.101.802.529,00	85,42
		2020	329.813.800.681,00	263.661.746.910,00	79,94
		2021	377.117.048.598,00	284.096.755.212,46	75,33
3	Belanja Modal	2018	244.742.881.495,00	209.424.501.923,00	85,57
		2019	256.630.040.223,00	228.958.248.065,00	89,22
		2020	278.691.552.536,00	255.771.403.875,00	91,77
		2021	421.157.613.698,00	194.904.401.374,07	46,28
4	Jumlah Belanja Langsung	2018	599.609.448.014,00	506.692.562.613,50	84,50
		2019	659.757.332.875,00	570.514.820.294,00	86,47
		2020	637.530.854.217,00	544.081.107.285,00	85,34
		2021	1.273.511.902.603,00	908.171.367.756,00	71,31

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

c. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali atas investasi jangka panjang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah.

Tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus anggaran untuk tujuan

yang produktif. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun anggaran 2018- 2021 dapat mengelola pembiayaan daerah sehingga pembiayaan daerah tersebut dapat menyeimbangkan pendapatan daerah dan belanja daerah yang dilaksanakan. Adapun anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada periode 2018- 2021 dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kab. HSU
Tahun Anggaran 2018-2021

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2017	-	-
		2018	171.304.024.454,74	171.304.024.454,74
		2019	171.446.307.260,91	171.446.307.260,91
		2020	197.335.029.559,36	197.335.029.559,36
		2021	182.095.131.561,00	182.095.131.561,00
2	Pencairan Dana Cadangan	2017	-	-
		2018	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2017	-	-
		2018	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2017	-	-
		2018	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00
		2021	210.000.000.000,00	26.154.908.496,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2017	-	-
		2018	0,00	11.855.000,00
		2019	0,00	450.000,00
		2020	100.000,00	100.000,00
		2021	0,00	0,00
6	Penerimaan Kembali Atas Investasi Jangka Panjang	2017	-	-
		2018	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi
		2021	0,00	0,00
7	Jumlah	2017	-	-
		2018	171.304.024.454,74	171.304.024.454,74
		2019	171.446.307.260,91	171.446.307.260,91
		2020	197.335.129.599,00	197.335.229.599,00
		2021	392.095.131.561,00	208.250.040.057,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Realisasi penerimaan pembiayaan selama tahun 2018 - 2021 sebagian besar berasal dari Silpa tahun berkenaan. Pada tahun 2021 selain Silpa terdapat adanya penerimaan yang berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 26.154.908.496,00 dari Rp. 210.000.000.000,00 yang dianggarkan. Penerimaan Pinjaman Daerah ini merupakan pinjaman daerah yang dialokasikan untuk terbangunnya rumah sakit daerah di Muara Tapus sebagai bentuk implementasi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Realisasi terhadap Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2021 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang direalisasi lebih dominan pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah direalisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.820.000.000,00 ditahun 2018 dan Rp. 3.300.000.000,00 ditahun 2019.

Adapun realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2017-2021

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi
1	Pembentukan dana Cadangan	2017	-	-
		2018	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2017	-	-
		2018	3.150.000.000,00	2.820.000.000,00
		2019	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
		2020	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2017	-	-
		2018	48.652.120,00	-
		2019	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00
4	Jumlah	2017	-	-
		2018	3.198.652.120,00	2.820.000.000,00
		2019	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
		2020	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Proporsi Belanja Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2018 – 2020 menyangkut proporsi kebutuhan aparatur terhadap anggaran belanja keseluruhan terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan ada perbaikan kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memperbaiki struktur anggarannya, khususnya yang berkaitan dengan belanja pegawai. Pada tahun 2018 proporsi belanja pegawai sebesar 35,41 %, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 33,05 %, dan tahun 2020 kembali turun menjadi 32,41 %. Namun pada tahun 2021 proporsi belanja aparatur ini naik kembali mencapai 36,11 %, hal ini karena adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan ditahun 2021 yang dipicu oleh transfer pusat yang berkurang akibat

adanya pandemi covid_19 yang belum tuntas teratasi. Secara lebih jelas dapat terlihat pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12.
Proporsi Belanja Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2018 - 2021 (%)

No	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(%)
1	Tahun Anggaran 2017	-	-	-
2	Tahun Anggaran 2018	407.255.396.873,00	1.149.863.260.450,00	35,41
3	Tahun Anggaran 2019	410.586.196.540,00	1.242.050.030.204,00	33,05
3	Tahun Anggaran 2020	395.565.751.165,00	1.220.504.971.063,00	32,41
5	Tahun Anggaran 2021	429.170.211.169,00.	1.188.411.447.465,53	36,11

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggungjawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2018 BPKAD menyusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh BPKAD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BPKAD.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2021

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2017	-
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

Target ke depan pada periode berikutnya, laporan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

3.2.1 . Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SILPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14.
SILPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2021

Tahun	SILPA (Rp)
2017	-
2018	3.082.915.875,17
2019	29.388.368.010,45
2020	(11.000.957.051,66)
2021	(125.968.954.879,72)

Sumber: BPKAD, LRA APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018-2021

SILPA Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tabel 3.14 di atas mengalami perubahan yang berfluktuasi dari tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 SILPA yang terjadi adalah surplus anggaran, dan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi defisit anggaran. Selanjutnya perkembangan SILPA yang dianggarkan lagi untuk membiayai belanja Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan proporsinya terhadap seluruh Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Persentase SILPA
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Tahun	SILPA	Pengeluaran Pembiayaan
2017	-	-
2018	3.082.915.875,17	2.820.000.000,00
2019	29.388.368.010,45	3.300.000.000,00
2020	(11.000.957.051,66)	0,00
2021	(125.968.954.879,72)	0,00

Sumber: BPKAD, LRA APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2021

3.2.2. Analisis kemandirian keuangan daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah dapat menyelenggarakan otonominya secara efektif dan efisien yang bersumber dari pendanaan sendiri. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa model, salah satunya dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana tabel berikut :

$$\text{Rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Realisasi Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100$$

Tabel 3.16
Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2018-2021 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Total PAD	Realisasi Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian (%)
2017	-	-	-
2018	104.839.104.906,67	799.129.266.905,00	13,11
2019	140.746.276.569,45	832.348.840.403,00	16,90
2020	126.983.048.244,34	803.011.058.896,00	15,81
2021	105.591.017.598,81	713.131.856.228,00	14,80

Sumber: BPKAD, LRA APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 - 2021

Rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas mengalami kenaikan yang fluktuatif pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Pada tahun 2018 rasio kemandirian keuangan adalah sebesar 13,11 persen dan meningkat menjadi 16,90 persen ditahun 2019. Namun pada tahun 2020 rasio kemandirian keuangan daerah ini mengalami penurunan menjadi 15,81 persen dan ditahun 2021 kembali turun menjadi 14,80 persen. Penurunan kemandirian keuangan daerah ini dipengaruhi oleh total PAD yang juga berfluktuasi dimana pada awalnya PAD tahun 2019 mampu meningkat signifikan dibanding PAD tahun 2018, namun pada tahun 2020 dan 2021 PAD yang diperoleh menurun dibanding tahun sebelumnya.

3.2.3. Analisis Penutupan Riil Anggaran

Defisit riil anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 29.388.368.010,40 kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp. (11.000.957.052,00) dan pada tahun 2021 sebesar (125.968.954.880) sebagaimana tabel 3.17.

Tabel 3.17
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2019-2021 (Rp)

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.268.138.398.214,45	1.209.504.014.011,34	1.062.442.492.585,81
	Dikurangi Realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.238.750.030.204,00	1.220.504.971.063,00	1.188.411.447.465,53
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.300.000.000,00	0,00	0,00
	Defisit riil	29.388.368.010,40	(11.000.957.052,00)	(125.968.954.880)

Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

3.3. Kerangka Pendanaan dan Penerimaan

Pendanaan program kegiatan dalam periode tahun 2018-2022 sangat penting untuk dikaji. Berdasarkan analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2023-2026.

3.3.1 Kerangka Pendanaan

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Terhadap proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.18.

3.3.2 Kerangka Penerimaan

Berdasarkan pandangan dari sisi belanja, keuangan daerah yang berhasil juga adalah keuangan daerah yang sebagaimana kerangka pendanaan, yakni mampu meningkatkan efisiensi secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Berikut proyeksi belanja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2023-2026 dapat dilihat juga pada tabel 3.18 sebagaimana berikut :

Tabel 3.18.

**RINGKASAN REALISASI ANGGARAN DAN PROYEKSI APBD TAHUN 2020 SAMPAI 2026 PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

URAIAN	JUMLAH						
	Realisasi Tahun2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Murni Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026
PENDAPATAN DAERAH	1,231,664,954,683.34	1,061,733,277,901.04	990,817,341,050.00	921,700,265,000.00	943,494,088,677.00	945,794,088,677.00	947,141,588,677.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,044,221,716.34	104,881,802,914.04	120,243,760,050.00	127,606,221,000.00	128,502,720,000.00	130,802,720,000.00	132,150,220,000.00
Pendapatan Pajak Daerah	10,887,026,124.00	11,117,739,817.00	11,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,500,000,000.00	12,700,000,000.00
Hasil Retribusi Daerah	8,317,215,999.00	7,219,170,732.00	9,544,539,750.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,500,000,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,391,345,343.52	9,166,983,360.00	7,500,000,000.00	11,307,000,000.00	12,302,500,000.00	12,502,500,000.00	12,750,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98,448,634,249.82	77,377,909,005.04	92,199,220,300.00	94,299,221,000.00	94,200,220,000.00	94,800,220,000.00	95,200,220,000.00
PENDAPATAN TRANSFER	1,019,877,617,896.00	956,851,474,987.00	870,573,581,000.00	794,094,044,000.00	814,991,368,677.00	814,991,368,677.00	814,991,368,677.00
A 1. Transfer Pusat	803,011,058,896.00	894,993,765,828.00	814,991,368,677.00	734,094,044,000.00	814,991,368,677.00	814,991,368,677.00	814,991,368,677.00
a. Dana Transfer Umum	634,713,931,845.00	546,216,109,417.00	581,601,703,000.00	581,601,703,000.00	581,601,703,000.00	581,601,703,000.00	581,601,703,000.00
- DBH Pajak / Bukan Pajak (SDA)	179,994,126,845.00	98,518,300,417.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00	133,903,894,000.00
- DAU	454,719,805,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00	447,697,809,000.00
b. Dana Transfer Khusus	168,297,127,051.00	166,915,746,811.00	80,897,324,677.00	-	-	-	-
- D A K	168,297,127,051.00	166,915,746,811.00	80,897,324,677.00	-	-	-	-
c. Dana Transfer Lainnya	216,866,559,000.00	181,861,909,600.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00
- Dana Insentif Daerah	44,477,282,000.00	9,638,926,000.00	-	-	-	-	-
- Dana Desa	172,389,277,000.00	172,222,983,600.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00	152,492,341,000.00
B 2. Transfer Antar Daerah	86,743,115,071.00	61,857,709,159.00	55,582,212,323.00	60,000,000,000.00	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	62,643,347,871.00	61,202,743,159.00	55,582,212,323.00	60,000,000,000.00	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00
2. Bantuan Keuangan	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	24,099,767,200.00	654,966,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00
a. Hibah (Dana BOS)	24,099,767,200.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00
b. Dana Darurat	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	654,966,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00

URAIAN	JUMLAH						
	Realisasi Tahun2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Murni Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026
BELANJA DAERAH	1,246,904,952,682.00	1,184,478,399,225.41	1,301,243,762,456.00	914,356,565,526.00	944,600,960,828.00	1,041,294,088,677.00	1,039,641,588,677.00
1. Belanja Operasi	714,435,199,277.00	737,977,079,175.46	830,235,176,447.00	651,907,105,526.00	669,900,000,000.00	696,593,127,849.00	694,940,627,849.00
- Belanja Pegawai	401,564,996,165.00	428,520,126,689.00	494,458,335,742.00	480,100,000,000.00	498,500,000,000.00	498,500,000,000.00	498,500,000,000.00
- Belanja Barang dan Jasa	295,437,212,460.00	281,095,405,091.46	304,357,191,061.00	107,607,055,526.00	150,000,000,000.00	176,693,127,849.00	175,040,627,849.00
- Belanja Bunga	-	1,889,997,898.00	10,000,000,000.00	8,600,000,000.00	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	12,502,940,652.00	18,064,549,497.00	15,825,599,644.00	50,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
- Belanja Bantuan Sosial	4,930,050,000.00	8,407,000,000.00	5,594,050,000.00	5,600,050,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
2. Belanja Modal	266,286,990,792.00	194,892,601,374.95	248,294,245,009.00	23,735,119,000.00	33,986,619,828.00	103,986,619,828.00	103,986,619,828.00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,364,634,132.00	37,792,636,742.00	45,020,674,851.00	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,486,906,400.00	66,202,226,093.24	171,712,734,011.00	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	171,171,668,260.00	90,672,657,539.71	31,285,962,297.00	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	170,322,000.00	225,081,000.00	274,873,850.00	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	93,460,000.00	-	-	-	-	-	-
(Belanja Tanah, Peralatan dan mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya)	-	-	-	23,735,119,000.00	33,986,619,828.00	103,986,619,828.00	103,986,619,828.00
3. Belanja Tidak Terduga	19,737,568,082.00	2,876,470,175.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
4. Belanja Transfer	246,445,194,531.00	248,732,248,500.00	212,714,341,000.00	228,714,341,000.00	228,714,341,000.00	228,714,341,000.00	228,714,341,000.00
- Belanja Bagi Hasil	2,121,000,000.00	2,136,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00	2,060,000,000.00
- Belanja Bantuan Keuangan	244,324,194,531.00	246,596,248,500.00	210,654,341,000.00	226,654,341,000.00	226,654,341,000.00	226,654,341,000.00	226,654,341,000.00
SURPLUS / (DEFISIT)	- 15,239,997,998.66	- 122,745,121,324.37	- 310,426,421,406.00	7,343,699,474.00	- 1,106,872,151.00	- 95,500,000,000.00	- 92,500,000,000.00
PEMBIAYAAN DAERAH							
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	197,335,129,559.36	208,255,861,916.70	352,926,421,406.00	95,406,245,000.00	97,500,000,000.00	95,500,000,000.00	92,500,000,000.00
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	197,335,029,559.36	182,095,131,560.70	166,676,421,406.00	95,406,245,000.00	97,500,000,000.00	95,500,000,000.00	92,500,000,000.00

URAIAN	JUMLAH						
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Murni Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2024	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026
b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
d. Penerimaan Pinjaman	-	26,154,908,496.00	186,250,000,000.00	-	-	-	-
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000.00	5,821,860.00	-	-	-	-	-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	42,500,000,000.00	102,749,944,474.00	96,393,127,849.00	-	-
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	42,500,000,000.00	84,000,000,000.00	84,000,000,000.00	-	-
b. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	18,749,944,474.00	12,393,127,849.00	-	-
c. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	197,335,129,559.36	208,255,861,916.70	310,426,421,406.00	- 7,343,699,474.00	1,106,872,151.00	95,500,000,000.00	92,500,000,000.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	182,095,131,560.70	85,510,740,592	-	-	-	-	-

Catatan: Proyeksi 2023 sampai 2026 belum termasuk :

Pendapatan :

1. DAK (Fisik dan Non Fisik)
2. DID

Belanja

1. Belanja dari sumber dana DAK (Fisik dan Non Fisik)
2. Belanja dari sumber dana DID

3.4. Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada trend menurunnya Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi pendapatan ditahun 2020, 2021 dan dalam APBD Murni tahun 2022 yang sedang berjalan sekarang ini. Turunnya Pendapatan Daerah ini banyak diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer. Pada realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 masih berada pada angka Rp. 1.231.664.954.683,34 atau masih di atas 1 trilyun rupiah. Pada realisasi tahun 2021 berkurang menjadi Rp. 1.061.733.277.901,04 dan masih berada di atas 1 trilyun rupiah. Namun dalam APBD tahun 2022 atau ditahun yang sedang berjalan ini diproyeksikan Pendapatan Daerah semakin turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni hanya sebesar Rp. 990.817.341.050,00. Terjadi penurunan yang signifikan. Pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 125.044.221.716,34 sedangkan tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp. 104.881.802.914,04 atau terjadi penurunan 20 milyar lebih. Dalam APBD berjalan ditahun 2022 ini diproyeksikan Pendapatan Asli Daerah ini meningkat kembali mencapai Rp. 120.243.760.050,00. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi tahun 2020 dan 2021 berfluktuasi dibandingkan dengan tahun berjalan di 2022 ini.

Pada Pendapatan Transfer dalam realisasinya ditahun 2020 dan 2021 serta proyeksi dalam APBD tahun 2022 mengalami trend yang semakin menurun. Realisasi Pendapatan Transfer ditahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.019.877.617.896,00 dan realisasi ini turun menjadi Rp. 956.851.474.987,00 pada tahun 2021. Selanjutnya dalam proyeksi APBD Tahun 2022 ini semakin mengalami penurunan menjadi Rp. 870.573.581.000,00. Yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan Pendapatan Transfer ini adalah dari Dana Transfer Lainnya dimana pada tahun 2021 realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 216.866.559.000,00, dan mengalami penurunan dalam realisasi tahun 2021 menjadi Rp. 181.861.909.600,00, sedangkan dalam proyeksi APBD Tahun 2022 yang berjalan sekarang juga semakin menurun menjadi Rp. 152.492.341.000,00. Pada Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah juga

mengalami trend yang semakin menurun yakni dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 86.743.115.071,00 turun dalam realisasi tahun 2021 menjadi Rp. 61.857.709.159,00 serta dalam proyeksi APBD Tahun 2022 ini semakin turun menjadi Rp. 55.582.212.323,00.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah ditahun 2020 dan 2021 dan proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2022 yang semakin berkurang, maka proyeksi Pendapatan Daerah juga diproyeksikan lebih rendah dibanding realisasi pendapatan tahun 2020 dan 2021. Perhitungan Pendapatan Daerah yang didasarkan trend penurunan yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya membuat perkiraan Pendapatan Daerah tahun 2023 sampai 2026 juga lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2020, 2021 dan proyeksi APBD Tahun 2022 ini. Pada tahun 2023 diproyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 921.700.265.000,00; meningkat menjadi Rp. 943.494.088.677,00 ditahun 2024; dan diproyeksi semakin meningkat ditahun 2025 menjadi Rp. 945.794.088.677,00; serta kembali meningkat ditahun 2026 menjadi Rp. 947.141.588.677,00.

3.5. Belanja Daerah

Berkurangnya Pendapatan Daerah yang terjadi berkorelasi langsung terhadap kemampuan Belanja Daerah di setiap tahunnya. Berdasarkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 telah dibelanjakan anggaran sebesar Rp. 1.246.904.952.682,00. Realisasi selanjutnya ditahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.184.478.399.225,41 atau bekurang lebih kurang 60 milyar dibanding tahun 2020. Namun demikian dalam APBD Tahun 2022 yang sedang berjalan tahun ini terjadi peningkatan dalam memproyeksikan Belanja Daerah menjadi Rp. 1.301.243.762.456,00. Meningkat secara signifikan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 ini menghasilkan defisit anggaran yang semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 dalam realisasi anggaran yang dilaksanakan defisit anggaran adalah sebesar Rp. 15.239.997.998,66; dan pada realisasi tahun anggaran 2021 defisit anggaran yang terjadi meningkat hingga Rp. 122.745.121.324,37. Selanjutnya pada tahun berjalan dalam

proyeksi APBD Tahun 2022 defisit anggaran yang diproyeksikan kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 310.426.421.406,00.

Pada Belanja Operasional dalam realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 sampai tahun berjalan 2022 ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020 realisasi Belanja Operasional adalah sebesar Rp. 714.435.199.277,00 yang sebagian besarnya adalah untuk Belanja Pegawai atau membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil atau Aparat Sipil Negara. Realisasi Belanja Operasional semakin meningkat ditahun 2021 menjadi Rp. 737.977.079.175,46 yang seiring dengan meningkatnya Belanja Pegawai yang harus dibayarkan. Dalam proyeksi APBD Tahun 2022 sekarang ini Belanja Operasional ini semakin meningkat lagi menjadi Rp. 830.235.176.447,00 dimana kebutuhan untuk Belanja Pegawai juga semakin meningkat. Namun demikian untuk proyeksi Belanja Operasional Tahun Tahun 2023 – 2026 jumlahnya berkurang dari realisasi tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi tahun 2022. Kisaran Belanja Operasional untuk tahun 2023 – 2026 diproyeksikan antara Rp. 651.907.105.526,00 ditahun rencana 2023 dan Rp. 694.940.627.849,00 ditahun rencana 2026.

Belanja Modal sebagaimana realisasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 266.286.990.792,00. Dalam Belanja Modal ditahun 2020 ini pengeluaran yang terjadi lebih banyak pada pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai Rp. 171.171.668.260,00. Pos terbesar selanjutnya adalah untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 65.364.634.132,00. Untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp. 29.486.906.400,00. Pada tahun 2021 pengeluaran untuk realisasi Belanja Modal terjadi penurunan yakni menjadi sebesar Rp. 194.892.601.374,95. Pada tahun 2021 ini pos terbesar masih pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, namun dengan besaran yang jauh berkurang dari tahun 2020 yakni sebesar Rp. 90.672.657.539,71. Masih untuk Belanja Modal, yakni dalam APBD Tahun 2022 diproyeksi besaran Belanja Modal naik menjadi sebesar Rp. 248.294.245.000,00. Kenaikan yang terjadi akibat melonjaknya pengeluaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditahun 2022 ini yakni sebesar Rp. 171.712.734.011,00. Kenaikan yang sangat

signifikan ini adalah karena adanya kebijakan untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah yang baru sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah. Untuk proyeksi Belanja Modal pada tahun-tahun rencana ditahun 2023 – 2026 yang akan datang akan sangat jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diproyeksikan Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.735.119.000,00; kemudian tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp. 33.986.619.828,00; selanjutnya ditahun 2025 dan tahun 2026 Belanja Modal diproyeksi meningkat dari tahun 2024 menjadi Rp. 103.986.619.828,00. Turunnya proyeksi Belanja Modal ditahun 2023 – 2026 ini tidak terlepas dari trend turunnya Pendapatan Daerah yang harus ditanggapi dengan secara realistis untuk menjaga agar APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tetap eksis. Dibutuhkan pemahaman bagi seluruh stakeholder yang ada di daerah khususnya seluruh SKPD untuk dapat menerima hal ini sebagai upaya menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini kedepannya tetap sehat dan aman.

Terhadap Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer tetap tercantum dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026. Berdasarkan realisasi tahun 2020 dan 2021 serta APBD tahun berjalan di tahun 2022 ini untuk Belanja Tidak Terduga besarnya fluktuatif. Tahun 2020 telah direalisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 19.737.568.082,00 dimana realisasinya lebih banyak diperuntukkan dalam penanganan wabah covid-19 yang melanda dan tidak diperhitungkan sebelumnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara kala itu. Selanjutnya ditahun 2021 realisasi Belanja Tidak Terduga ini berkurang dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 2.876.470.175,00. Pada tahun 2022 yang sedang berjalan ini proyeksi Belanja Tidak Terduga ini diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Dalam hal perencanaan untuk APBD Tahun 2023 – 2026 maka diproyeksi kembali dimana pada tahun 2023 diproyeksikan Belanja Tidak Terduga ini sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp. 10.000.000.000,00; dan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 diproyeksi meningkat menjadi rata Rp. 12.000.000.000,00. Selanjutnya pada Belanja Transfer pada tahun 2020 telah direalisasikan sebesar Rp. 246.445.194.531,00 yang meliputi Belanja Bagi

Hasil sebesar Rp. 2.121.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan atau yang dikenal sebagai Dana Desa sebesar Rp. 244.324.194.531,00. Realisasi angka-angka ini ditahun 2021 mengalami peningkatan dimana Belanja Transfer yang terealisasi sebesar Rp. 248.732.248.500,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 2.136.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 246.596.248.500,00. Untuk APBD Tahun 2022 sekarang ini Belanja Transfer yang dialokasikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 212.714.341.000,00. Adapun Belanja Bagi Hasil tahun 2022 ini diproyeksi sebesar Rp. 2.060.000.000,00 sementara Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 210.654.341.000,00. Untuk proyeksi tahun 2023 – 2026 Belanja Transfer yang dialokasikan rata sebesar Rp. 228.714.341.000,00 yang meliputi Belanja Bagi Hasil 2023 – 2026 rata sebesar Rp. 2.060.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan juga rata sebesar Rp. 226.654.341.000,00.

3.6. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen pembiayaan yakni Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 197.335.129.559,36 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 197.335.029.559,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 100.000,00. Pada tahun 2021 realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah ini meningkat menjadi Rp. 208.255.861.916,70 dengan rincian penerimaan yang berasal dari SILPA sebesar Rp. 182.095.131.560,70; Penerimaan Pinjaman sebesar Rp. 26.154.908.496,00; dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 5.821.860,00. Pada Tahun Anggaran 2022 yang sedang berjalan sekarang ini proyeksi terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp. 352.926.421.406,00 dengan rincian dari SILPA sebesar Rp. 166.676.421.406,00 dan Penerimaan Pinjaman sebesar Rp. 186.250.000.000,00. Untuk proyeksi tahun 2023 – 2026 yang akan datang, maka diproyeksikan diperoleh Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 95.406.245.000,00 yang seluruhnya diperoleh dari SILPA; tahun

2024 sebesar Rp. 97.500.000.000,00 juga diperoleh dari SILPA; tahun 2025 dan tahun 2026 adalah sama yakni sebesar Rp. 95.500.000.000,00 yang seluruhnya juga diperoleh dari SILPA.

Pada komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada pengeluaran yang direalisasikan. Untuk tahun anggaran 2022 sekarang ini proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp. 42.500.000.000,00 yang digunakan untuk Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo. Selanjutnya ditahun 2023 diproyeksikan adanya Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 102.749.944.474,00 dengan rincian untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 84.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 18.749.944.474,00. Demikian pula ditahun 2024 diproyeksikan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 96.393.127.849,00 yang terdiri dari Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 84.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 12.393.127.849,00. Pada tahun 2025 dan 2026 tidak ada proyeksi terhadap adanya Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Demikian gambaran kinerja keuangan daerah dimasa sebelum tahun perencanaan 2023 sampai 2026, dan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun perencanaan 2023 sampai tahun 2026. Atas dasar proyeksi kemampuan keuangan daerah inilah maka belanja daerah pada tahun perencanaan 2023 sampai 2026 turut menyesuaikan dengan pagu anggaran yang didistribusikan pada seluruh SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Utara

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026 salah satu hal yang dilakukan adalah menggali berbagai persoalan dan permasalahan daerah yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian menjadi salah satu masukan dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah.

Perumusan permasalahan ini penting untuk menjadi acuan dalam mendeskripsikan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terbentuk dalam tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang sudah ditentukan akan diikuti dengan berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

4.1. Permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diterjemahkan sebagai perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang tidak termanfaatkan, dan ancaman yang tidak terantisipasi. Identifikasi dan perumusan permasalahan baik untuk penentuan program pembangunan daerah maupun untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ke depan didasarkan pada gambaran umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini atau kondisi “*existing*”. Selain itu, permasalahan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara diidentifikasi berdasarkan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala Kabupaten, Provinsi, maupun kondisi nasional serta global dalam beberapa tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting agar mampu mendefinisikan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan selanjutnya dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2023–2026 yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Tingginya angka kemiskinan serta belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS
4. Belum optimalnya kualitas Pendidikan dan profesionalisme pendidik
5. Perlunya peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan dan kualitas layanan kesehatan
6. Masih adanya kasus yang diakibatkan oleh Covid-19
7. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan perlunya peningkatan peran perempuan dalam ruang publik
8. Belum terpenuhinya target infrastruktur layanan dasar
9. Belum tercapainya target 100% akses air minum layak, 0% Kumuh dan 100% sanitasi layak
10. Adanya gangguan dalam kelancaran transportasi sungai yang disebabkan faktor alam seperti terhambatnya alur sungai oleh hama tanaman gulma dan adanya pendangkalan alur sungai
11. Belum meratanya akses informasi dan komunikasi Infrastruktur
12. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan masih terjadinya bencana alam
13. Pertumbuhan ekonomi daerah yang fluktuatif
14. Masih Rendahnya Investasi Daerah dan tingginya tingkat pengangguran
15. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah
16. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan

4.2. Isu Strategis

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dimasa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke depan. Isu-isu strategis di atas perlu dikorelasikan dengan isu dan kebijakan nasional maupun regional khususnya yang memberikan manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi penekanan pemerintah pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan dari pusat dan provinsi. Di samping itu, dokumen RPD Tahun 2023 - 2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005 – 2025 sehingga juga harus mengacu pada arahan pembangunan yang ada pada RPJPD tersebut. Terlebih dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 pada Lampiran alinea keempat ketentuan umum disebutkan bahwa “penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Dengan melihat dan memperhatikan berbagai isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka isu-isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat dikelompokkan sebagai isu secara internal dan isu

secara eksternal. Secara internal terkait dengan berbagai permasalahan dan isu regional di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri, dan berbagai kebijakan daerah seperti “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025” dan “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Secara eksternal terkait dengan berbagai permasalahan pada regional yang lebih luas seperti isu dan permasalahan baik di tingkat provinsi, nasional dan permasalahan yang terjadi secara global dan menyangkut internasional. Juga terkait dengan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan seperti “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026” dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN)”. Menghadapi isu dan permasalahan ini tentunya dibutuhkan solusi strategis untuk mengentaskan berbagai permasalahan pembangunan ditahun mendatang. Isu-isu strategis yang paling mendasar, mendesak dan prioritas menjadi bahan perumusan kebijakan utama pembangunan ke depan.

Rencana pembangunan Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan saat ini tengah memasuki RPJM Nasional ke-4 (2020–2025) dengan visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Selanjutnya, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang ditempuh dengan 7 misi, yang beberapa di antaranya sangat relevan dengan isu pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini yakni Mewujudkan Masyarakat Maju, berkeseimbangan dan demokrasi yang berlandaskan hukum, Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia yang tinggi, Maju dan Sejahtera, Mewujudkan Daerah yang Berdayasaing dan Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Terhadap kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana visi daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada RPJMD Tahun 2016– 2021 adalah Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing yang semuanya hendaknya sejalan dengan kebijakan pembangunan di Hulu Sungai Utara.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Wacana (Discousere) dari luar yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk lima tahun kedepan dapat identifikasikan sebagai berikut :

a) Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi Asean adalah suatu realisasi dari tujuan akhir terhadap integrasi ekonomi yang telah dianut di dalam ASEAN Visi 2020 yang berdasarkan atas konvergensi kepentingan para negara anggota ASEAN untuk dapat memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi lewat inisiatif yang ada dan baru dengan memiliki batas waktu yang jelas, di dalam mendirikan MEA.

Prinsip-prinsip yang terkandung pada pemberlakuan MEA ini adalah terbuka, mengarah ke luar dan mengarah pada pasar ekonomi yang teguh pendirian dengan peraturan multilateral serta patuh terhadap terhadap sistem untuk pelaksanaan dan komitmen ekonomi yang efektif berdasarkan aturan.

b) SDGS

Sejak tahun 2015 berakhir, saat itulah ujung waktu dari kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dan, negara-negara di dunia pun mulai merumuskan sebuah platform berkelanjutan untuk dapat mencapai cita-cita mulia dari MDGs tersebut. Untuk itu, pada tanggal 25-27 September 2015 terjadi pertemuan akbar di markas PBB di New York , dengan dihadiri oleh 193 negara. Pertemuan *Sustanaible Development Summit* ini berhasil mengesahkan dokumen yang disebut *Sustanaible Development Goals* (SDGs).

Ada 17 point penting di dalam SDGs,yakni terciptanya dunia dengan :

- 1) Tanpa kemiskinan
- 2) Tanpa kelaparan
- 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan gender
- 6) Air bersih dan sanitasi
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak
- 9) Industri, inovasi, dan infrastruktur
- 10) Pengurangan kesenjangan
- 11) Keberlanjutan kota dan komunitas
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Aksi terhadap iklim
- 14) Kehidupan bawah laut
- 15) Kehidupan di darat
- 16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
4. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar.
5. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Politik hukum pertahanan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan

Guna mencapai perencanaan pembangunan daerah yang baik, efektif dan efisien serta sinkronisasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu untuk ditelaah Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan yang perlu diintegrasikan dengan isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara. Isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- 1) Masih Terjadinya Kerusakan Lingkungan (Pencemaran Air, Lubang Tambang, Dan Deforestasi) Dan Belum Optimalnya Mitigasi Bencana (Banjir Dan Kebakaran Hutan Lahan) Lingkungan (Pencemaran Air, Lubang Tambang, Dan Deforestasi) Dan Belum Optimalnya Mitigasi Bencana (Banjir Dan Kebakaran Hutan Lahan)
- 2) Belum Mantapnya Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (Termasuk Energi Dan Konektivitas)
- 3) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- 4) Belum Terdiversifikasinya Sektor Ekonomi Di Kalimantan Selatan Dalam Mendukung Transformasi Struktur Ekonomi Daerah (Pertanian, Pariwisata, Hilirisasi Komoditas Unggulan, Dan Pelaku UMKM)
- 5) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Ke Masyarakat Berbasis Digital
- 6) Kalimantan Selatan Memiliki Peluang Besar Menjadi Gerbang Food Estate Di Kalteng Dan Ibu Kota Negara Di Kaltim (Jalur Logistik Dan Konektivitas)

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan kondisi aktual pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meliputi, yaitu :

1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Kemajuan yang tercipta dalam kehidupan sosial masyarakat berakibat semakin tingginya tuntutan terhadap peranan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang seimbang dengan kemajuan global yang terjadi. Dalam konteks ini masyarakat semakin menuntut untuk memperoleh akses terhadap layanan publik yang semakin baik, transparan dan akuntabel. Tuntutan terhadap keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, tuntutan terhadap layanan sosial, diberdayakannya masyarakat, penyetaraan gender, perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak, ketersediaan atas berbagai

prasarana kemasyarakatan dan prasarana lainnya menuntut pemerintah untuk mampu mengembangkan organisasinya agar dapat menjawab berbagai tantangan dan tuntutan masyarakatnya. Pemerintah Daerah telah membentuk satuan kerja (OPD) yang bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan baik urusan yang bersifat pelayanan umum, urusan wajib maupun urusan pilihan. Pada pelaksanaannya, fungsi penyelenggaraan urusan ini masih belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Hal ini akibat adanya keterbatasan-keterbatasan baik secara kelembagaan maupun individu guna dapat melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud. Secara kelembagaan banyak jabatan struktural yang tidak terisi meliputi jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV. Dengan kekosongan ini maka berdampak pada kurang optimalnya kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akibat lain dari keterbatasan ini yakni kurang tertatanya administrasi kerja, pendapatan asli daerah yang relatif kecil dan masih sangat tergantung dengan dana transfer Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah belum optimal.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya. Kualitas tatakelola birokrasi yang efektif dan efisien adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun yang berjangka panjang. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi disegala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *cultur set*. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani dan

berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Ketika telah terbangunnya *good governance*, maka proses pembuatan keputusan dan kebijakan publik serta implementasinya lebih mudah untuk dilakukan.

2. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Kualitas Sumberdaya Manusia sangat penting dan menjadi faktor penentu (*determinant*) dalam proses pembangunan untuk mencapai kondisi yang lebih maju. Kualitas sumberdaya manusia merupakan potensi penggerak dalam mewujudkan eksistensinya, karena manusialah subjek yang bersentuhan langsung dengan sumberdaya pembangunan lainnya, termasuk sumberdaya alam yang dimiliki. Untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas diperlukan ***Kehidupan sehat dan sejahtera*** yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia; ***Pendidikan berkualitas***, yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; ***Adanya Kesetaraan gender*** dan pemberdayaan perempuan. Selain itu ***peningkatan prestasi olahraga*** juga menunjukkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Beberapa hal yang berkenaan langsung dan relevan dengan permasalahan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah permasalahan kesehatan, permasalahan pendidikan, stunting, kurangnya akses kaum perempuan terhadap kesetaraan gender serta belum optimalnya prestasi olahraga.

3. Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.

Parameter dari pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi harus mampu menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sekaligus berdampak terhadap meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi berkualitas mesti memberikan *impact* atau akibat berantai serta memacu tumbuhnya sektor – sektor ekonomi lainnya.

Semua sektor ekonomi harus dipacu sehingga mampu memberikan *multiplier effect* yang lebih besar. Dengan begitu, masyarakat secara luas dapat merasakan manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.

Tiga norma dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas yaitu Pertama, membangun untuk manusia dan masyarakat; Kedua, upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas yang tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Ketiga, aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus memperhatikan tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia; dimensi pembangunan sektoral khususnya yang terkait dengan sektor ekonomi unggulan; serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Jadi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan menurunnya kemiskinan dan pengangguran serta pencegahan kerusakan lingkungan.

4. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Secara umum kondisi di Indonesia dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara persoalan ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Selatan persoalan kemiskinan ini juga masih merupakan persoalan yang menjadi prioritas untuk diatasi. Senada dengan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, di Kabupaten Hulu Sungai Utara angka kemiskinan dan persentase penduduk miskin relatif masih cukup tinggi bahkan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian isu tentang kemiskinan

adalah merupakan isu terdepan yang harus selalu diperhatikan dan mendapat intervensi pemerintah untuk pengentasannya.

5. Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum.

Infrastruktur Dasar terdiri air bersih, persampahan, air limbah, drainase, irigasi, perhubungan dan lainnya. Capaian target *Universal Access* RPJMN 100 – 0 – 100 (100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi) menjadi prioritas daerah untuk mencapai cakupan tersebut dimana Kabupaten Hulu Sungai Utara relatif masih jauh dari capaian target. Pelayanan Umum terdiri transportasi, komunikasi dan informatika.

6. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Kebencanaan.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air di saluran irigasi, adanya genangan di wilayah permukiman, jalan pada saat hujan (kualitas dan kuantitas drainase tidak memadai), alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke kegiatan non pertanian yang semakin tinggi dan tidak terkendalikan merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah setempat.

Penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan terbukti dari hasil laboratorium air baku PDAM masih belum memenuhi syarat. Masih terdapat usaha (pemerintah dan swasta) yang belum memiliki IPAL. Masih terdapat usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan. Penurunan kualitas tanah, kualitas air dan kualitas udara. Terjadinya peningkatan suhu udara. Pengelolaan persampahan belum optimal dan produksi sampah yang dihasilkan meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Kerusakan kawasan resapan akibat konstruksi yang tidak ramah rawa. Kerusakan kawasan lindung sempadan sungai akibat pemanfaatan bantaran sungai yang tidak terkendali dan persoalan banjir yang acapkali

terjadi di daerah juga menjadi faktor yang harus banyak mendapat perhatian.

Secara lebih sederhana gambaran isu strategis nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS

NO	NASIONAL	PROVINSI	ISU RPD KABUPATEN HSU
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Belum Terdiversifikasinya Sektor Ekonomi Di Kalimantan Selatan Dalam Mendukung Transformasi Struktur Ekonomi Daerah (Pertanian, Pariwisata, Hilirisasi Komoditas Unggulan, Dan Pelaku UMKM)	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
2	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	
			Belum Optimalnya Penanggulangan kemiskinan Daerah
			Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas SDM
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Ke Masyarakat Berbasis Digital	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien

NO	NASIONAL	PROVINSI	ISU RPD KABUPATEN HSU
4	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar	Belum Mantapnya Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (Termasuk Energi Dan Konektivitas)	Belum optimalnya Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum
5	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Masih Terjadinya Kerusakan Lingkungan (Pencemaran Air, Lubang Tambang, Dan Deforestasi) Dan Belum Optimalnya Mitigasi Bencana (Banjir Dan Kebakaran Hutan Lahan) Lingkungan (Pencemaran Air, Lubang Tambang, Dan Deforestasi) Dan Belum Optimalnya Mitigasi Bencana (Banjir Dan Kebakaran Hutan Lahan)	Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi kebencanaan
6	Memperkuat Stabilitas Politik hukum pertahanan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik		
		Kalimantan Selatan Memiliki Peluang Besar Menjadi Gerbang Food Estate Di Kalteng Dan Ibu Kota Negara Di Kaltim (Jalur Logistik Dan Konektivitas)	

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana ketentuan umum pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023 – 2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 Visi Daerah untuk perencanaan jangka panjang adalah “RAWA MAKMUR 2025”, yang mengandung pemahaman “terciptanya kesejahteraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara optimal melalui pemanfaatan dan perekayasaan terhadap berbagai potensi sumberdaya alam/biotik berupa hamparan rawa yang luas; potensi sumberdaya manusia; potensi ekonomi; potensi sosial budaya; potensi ruang dan berbagai potensi yang bersifat lokal lainnya, serta kemampuan dalam memanfaatkan peluang internal dan eksternal sehingga dapat membawa kemakmuran bagi segenap masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Guna mewujudkan Rawa Makmur 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan melalui berbagai MISI yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan visi Rawa Makmur 2025. **MISI-MISI** ini meliputi :

- 1. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ**, yakni pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, terampil, memiliki kemandirian dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupannya, memiliki kualitas kehidupan yang baik, serta tetap memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan yang baik dan diimplementasikan sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

2. **Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas**, yakni arah pembangunan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju. Secara agregat tercipta struktur perekonomian yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi, yang merupakan perwujudan dari transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri).
3. **Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahan**, dimana arah pembangunan ditujukan untuk menciptakan ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya dalam menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik**, yakni menciptakan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas, yang ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang profesional, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dapat memberi pelayanan yang maksimal yang disertai penegakkan supremasi hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
5. **Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam** baik berupa sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari dan berkelanjutan serta mewujudkan pengembangan pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan.

5.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah

yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Penggambaran tujuan yang akan dicapai dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat di masa-masa yang akan datang yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek infrastruktur daerah. Selain itu juga adanya komitmen untuk taat dan patuh terhadap hukum dan aturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Secara sosial dan ekonomi diinginkan adanya perbaikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat yang meliputi perbaikan perekonomian masyarakat dan semakin majunya kualitas sumberdaya manusia sebagai kebutuhan mendasar yang dilakukan secara bertahap melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan pengembangan wilayah, aspek pemberdayaan masyarakat dan lainnya dalam rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal juga penting dan ditujukan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang ditopang oleh peningkatan infrastruktur yang mendukung berbagai aspek kehidupan dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan yang diinginkan dan hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 sampai tahun 2026 dan merupakan kelanjutan dari tujuan-tujuan lima tahun sebelumnya meliputi :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mampu untuk memberikan pelayanan publik terhadap berbagai lapisan masyarakat semakin mengemuka dalam era reformasi yang sudah berlangsung beberapa dasawarsa ini. Karenanya sangat penting untuk

memperkuat sektor pemerintahan di berbagai lini yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terjadi secara dinamis. Untuk menjawab tantangan zaman ini mutlak dibutuhkan keberadaan pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntabel serta berkinerja baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dengan demikian maka dalam kurun waktu 2023 – 2026, sektor pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara harus semakin profesional untuk terselenggaranya pemerintahan yang berkinerja baik serta ditopang oleh aparatur yang semakin handal dan profesional dalam bidang tugasnya. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitasnya, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

2. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi publik

Seiring dengan semakin dominannya kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa umat manusia pada suatu keadaan yang sangat dinamis dalam pola kehidupan dan kehidupan sosial sehari-hari. Perubahan yang sangat cepat di bidang komunikasi telah sangat nyata berpengaruh terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap akses pada sektor pemerintahan dan sektor publik. Segala kejadian dan perkembangan yang terjadi pada suatu belahan dunia dengan cepat dapat diakses oleh masyarakat pada belahan dunia lainnya. Hal ini berdampak terhadap tuntutan masyarakat untuk semakin kritis dan terlibat dalam pengambilan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Dengan perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi ini diikuti dengan semakin tingginya harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah dan layanan publik yang

dapat diberikan. Tuntutan terhadap akses dan keterlibatan dalam sektor publik semakin tinggi untuk dapat diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, tuntutan terhadap kesetaraan gender, pemerataan layanan publik yang dilakukan, distribusi terhadap alokasi pembangunan semakin meningkat dan perubahan-perubahan lainnya sejalan dengan perkembangan zaman.

3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan dan pembiayaan daerah sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah. Ketergantungan terhadap transfer dana pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan daerah akan membatasi kemampuan daerah dalam mencapai visi dan misi serta berbagai tujuan dan cita-cita daerah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karenanya adalah sangat penting bagi daerah untuk selalu meningkatkan kapasitas keuangan daerahnya dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

4. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam upaya menumbuhkan kemandirian masyarakat dibutuhkan adanya kualitas dan daya saing yang kompetitif dari sumberdaya manusia di daerah. Dengan demikian sangat dibutuhkan perwujudan sumberdaya manusia di daerah yang memiliki kualitas dan dapat bersaing dalam eksistensi kehidupan di era globalisasi, memiliki akses dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai kemajuan global serta dapat bersikap mandiri dalam kehidupan sosial baik dalam lingkungan regional, nasional bahkan internasional.

5. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Sangat disadari bahwa kehidupan sosial dan keagamaan merupakan kebutuhan rohani yang harus diwujudkan untuk menjadi insan yang bertakwa. Demikian pula bahwa tata kehidupan sosial budaya dan

keagamaan yang selaras dan harmonis merupakan upaya penting untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Tujuan pembangunan ini meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap berpegang teguh pada norma-norma keagamaan sebagaimana telah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara sejak dahulu hingga sekarang. Kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan faktor pendorong untuk terselenggaranya kegiatan pembangunan yang berlandaskan agama di satu sisi, dan menjadi salah satu dari tujuan dilakukannya pembangunan itu sendiri.

6. Meningkatnya perekonomian daerah

Secara ekologis Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada zona dataran rendah yang didominasi oleh genangan rawa yang merupakan potensi sumberdaya lokal bagi aktivitas perekonomian masyarakatnya. Sudah menjadi kearifan lokal dan terjadi secara turun temurun wilayah genangan rawa ini dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk berdampak semakin diperlukan luasan lahan yang akan dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai mata pencahariannya. Selama ini sumberdaya lahan yang ada telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kawasan pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Sebagai kelanjutan dari kearifan lokal pemanfaatan lahan rawa ini dibutuhkan peran Pemerintah Daerah yang semakin bermakna dalam menyediakan sarana dan prasarana terkait, termasuk penggunaan teknologi dan pembinaan terhadap masyarakat sehingga nilai tambah produk pertanian dapat ditingkatkan dan ketahanan pangan daerah dapat diwujudkan.

Salah satu fungsi pemerintahan adalah melakukan kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dapat terukur melalui meningkatnya kinerja terhadap berbagai indikator perekonomian.

Kemajuan perekonomian di daerah dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat yang terus meningkat serta menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau system perekonomian yang lebih berpihak terhadap usaha kecil harus terus dibina dan dikembangkan. Potensi lain yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah industri kecil dan menengah. Telah menjadi hal yang diketahui oleh banyak kalangan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat adanya potensi industry kerajinan yang banyak memasok permintaan daerah-daerah lainnya terhadap baik di regional Kalimantan Selatan maupun provinsi lainnya di Kalimantan dan luar pulau Kalimantan seperti daerah Jawa dan Sulawesi. Industry kerajinan yang dihasilkan adalah meliputi industry meubel, anyaman rotan dan anyaman purun, sulaman bordir dan berbagai kebutuhan perabotan rumah tangga lainnya.

7. Menurunnya angka kemiskinan

Dalam beberapa tahun terakhir ini persoalan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menjadi perhatian yang harus dicarikan solusi dan kebijakan yang tepat dalam penanggulangannya. Perhatian yang diwujudkan dengan kebijakan dalam hal pengentasan kemiskinan di daerah sangat diperlukan karena masalah kemiskinan adalah hak dari setiap warga masyarakat untuk dituntaskan. Semenjak terjadinya pandemi yang diakibatkan oleh virus corona diseases 2019 (covid 19) persoalan kemiskinan ini menjadi semakin kompleks bukan hanya di Kabupaten Hulu Sungai Utara saja tetapi menjadi momok bagi seluruh daerah di Indonesia. Jadi masalah ini terjadi secara nasional bahkan merebak hampir di seluruh belahan negara-negara di dunia serta menjadi isu secara internasional. Wabah yang terjadi oleh virus covid-19

ini berkorelasi secara langsung dengan masalah perekonomian dan pendapatan masyarakat. Karenanya sejak tahun 2019 hingga sekarang angka kemiskinan yang terjadi baik secara nasional maupun regional cenderung trendnya terjadi kenaikan. Oleh sebab itu permasalahan kemiskinan ini menjadi isu di hampir seluruh kawasan Republik Indonesia yang harus diatasi sedapat mungkin.

8. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar

Guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat tentunya juga dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang dibutuhkan guna mendukung terwujudnya pengembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Keberadaan infrastruktur daerah yakni keberadaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai, berkualitas, dalam kondisi baik dan tepat guna sangat diperlukan keberadaannya. Infrastruktur adalah faktor penunjang yang sangat penting bagi aktivitas sehari-hari segenap lapisan masyarakat disuatu wilayah. Dalam hal ini keberadaan infrastruktur berkorelasi penting untuk meningkatnya kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui aksesibilitas terhadap kawasan dan wilayah yang terisolasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan yang menjadi pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan terhadap kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti air bersih dan tumbuhnya perekonomian daerah. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur wilayah akan sangat mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi yang selanjutnya akan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Keberadaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian alam berkorelasi bagi pemenuhan kebutuhan terhadap kenyamanan, keindahan, sumberdaya yang berkelanjutan bagi generasi akan datang. Pemanfaatan sumberdaya alam yang ditujukan dalam proses pemenuhan kebutuhan produksi barang dan jasa dan memenuhi

kebutuhan hidup masyarakat memang menjadi keharusan. Namun demikian pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat dengan melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam harus tetap berada pada batas-batas toleransi dan kemampuan daya dukung lahan maupun sumberdaya alam yang tersedia. Oleh karenanya pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap harus memperhatikan berbagai kaidah bagi tetap terjaminnya kelestarian sumberdaya alam, baik berupa sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati serta plasma nutfah yang tersedia. Dengan demikian akan dapat diwujudkan kegiatan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana

10. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana

Permasalahan yang masih sering terjadi dan berdampak terhadap lingkungan di daerah yakni bencana banjir. Hampir pada setiap tahunnya terjadi limpasan air yang membanjiri baik kawasan permukiman di perkotaan dan wilayah pedesaan, juga kawasan tepi sungai yang membentang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sudah umum diketahui bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan pertemuan 2 (dua) sub daerah aliran sungai (DAS) yakni sub DAS Tabalong dan sub DAS Balangan. Bilamana terjadi hujan pada dua wilayah sub DAS tersebut maka berakibat terhadap meningkatnya debit sungai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menjadi limpasan banjir yang menggenangi kawasan-kawasan perkotaan dan permukiman. Oleh karenanya permasalahan banjir dan dampak yang diakibatkannya terhadap lingkungan di daerah harus menjadi perhatian baik pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat di daerah.

5.2. Sasaran

Atas berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun-tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN
3. Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah
4. Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik
5. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Meningkatnya pengendalian penduduk
11. Meningkatnya kontribusi Pemuda dalam Pembangunan
12. Terwujudnya tata kehidupan sosial dan agama yang harmonis
13. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa
14. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
15. Meningkatnya sektor pariwisata
16. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja
17. Penurunan kemiskinan
18. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar
19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
20. Meningkatnya kesesuaian peruntukkan lahan
21. Meningkatnya kapasitas lembaga dan masyarakat penanggulangan bencana.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
							2023	2024	2025	2026	
1.Terwujudnya penyelenggaraa n Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (54,04)	B (70)	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B/63,34	B/66	B/66,5	B/67	B/67,5	B/67,5
					Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Persentase Pencegahan Korupsi (MCP)/ KORSUPGAH	68	70	75	78	80	80
				2. Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85	85	87	90	95	95
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	NA	80	3. Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah	Jumlah desa yang terjangkau jaringan internet (4G)	196	201	206	211	214	214

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
							2023	2024	2025	2026	
				4. Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah SKPD yang menerapkan SPBE	10	17	25	33	38	38
3. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase PAD/ Total Pendapatan Daerah (%)	9,80	20,00	5. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Jumlah PAD (Rp)	104.881.802,91	112.747.938,13	121.204.033,49	130.294.336,01	140.066.411,21	140.066.411,21
4. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	66,12	68,02	6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	7,75	8,03	8,17	8,31	8,45	8,45
					- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92	13,36	13,58	13,80	14,02	14,02
					- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,47	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50
				7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	64,10	64,68	64,97	65,26	65,55	65,55

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
							2023	2024	2025	2026	
				8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6649	0,6764	0,6853	0,6919	0,7004	0,7004
				9. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,65	75,00	76,50	78,00	79,50	79,50
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,52	92,02	92,52	93,02	93,52	93,52
					Jumlah Perkawinan Anak (orang)	69	59	49	39	29	29
				10. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,7	0,7	0,69	0,68	0,67	0,67
				11. Meningkatnya kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	65	70	72	75	80	80
5. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Angka Kriminalitas	6	<5	12. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Jumlah Kasus konflik sosial	0	0	0	0	0	0

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
							2023	2024	2025	2026	
6. Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	3,23	6,05	13. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	1,64	2,29	3,69	5,09	6,49	6,49
	PDRB Perkapita ADHB (Rp)	20.648,74	21.061,71		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	4,62	5,44	5,69	5,94	6,19	6,19
	PDRB Perkapita ADHK (Rp)	13.735,44	14.010,15		Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	2,67	2,61	2,71	2,81	2,91	2,91
					Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	10,93	6,6	6,8	7	7,2	7,2
					Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	9644	9761	9891	10021	10151	10151
				14. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	68,09	70,1	70,6	71,05	71,5	71,5

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
							2023	2024	2025	2026	
				15. Meningkatnya sektor pariwisata	Jumlah wisatawan (orang)	79.934	88.934	97.934	106.934	115.934	115934
				16. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3,6
7. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase kemiskinan	6,83	6,43	17. Penurunan Kemiskinan	Persentase kemiskinan (%)	6,83	6,73	6,63	6,53	6,43	6,43
8. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	baik	18. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	21 - 40 (sedang)	21 - 40 (sedang)	41 - 60 (cukup)	61 - 80 (baik)	61 - 80 (baik)
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04 (Sedang)	67,98	19. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	67,7	67,96	67,97	67,98	67,98
				20. Meningkatnya Kesesuaian peruntukan lahan	Tertib Penataan Ruang	NA	100	100	100	100	100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
							2023	2024	2025	2026	
10. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	128,4 (Sedang)	128,3 (Sedang)	21. Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,25 (Rendah)	0,30 (Rendah)	0,35 (Rendah)	0,38 (Rendah)	0,40 (sedang)	0,40 (sedang)

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Setelah perumusan Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah ditahun 2023 hingga 2026 mendatang, perlu dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan yang menjadi bagian dari tersusunnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode pembangunan tahun 2023 – 2026 itu sendiri. Strategi sebagaimana “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah”. adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi adalah cara atau langkah-langkah yang di dalamnya terdapat program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dibuat. Selanjutnya kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Perumusan strategi dijabarkan secara umum terhadap capaian pembangunan yang bersifat makro, sedangkan dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dilakukan melalui strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing misi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

6.1. Strategi Pembangunan

Strategi juga dikatakan sebagai cara dan upaya yang ditempuh untuk menangani suatu persoalan. Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas penelaahan terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi. Secara umum strategi pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 tetap diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan yang dimaksudkan untuk terciptanya rasa keadilan di masyarakat, fungsi pembangunan yang terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta

fungsi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan guna terciptanya kemandirian di masyarakat. Dengan berlandaskan keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka rumusan strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sampai tahun 2026 ini adalah :

1) Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen tata kelola pemerintahan yang harus selalu ditingkatkan kinerjanya. Pada aspek perencanaan harus semakin dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai kemajuan dibidang teknologi informasi, begitu pula pada aspek pengendalian rencana pembangunan yang mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan juga pelaksanaannya harus semakin berkualitas. Pada aspek evaluasi harus selalu terselenggara secara berkala secara intensif. Karenanya pada aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perlu dibangun sistem perencanaan daerah yang teradministrasi dengan baik, lebih terpadu antar sektor dan lebih dapat diimplementasikan. Keberadaan dokumen perencanaan pada setiap unsur pemerintah daerah hendaknya tidak hanya dalam bentuk formal saja tetapi harus lebih substantif sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian pula dalam hal pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasinya harus teradministrasi secara jelas sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Penelitian sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Dapat dikatakan bahwa hulu dari perencanaan adalah hasil penelitian. Artinya perencanaan akan lebih berkualitas bila didasari oleh penelitian yang berkualitas pula. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan bahwa peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan. Adapun penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi itu salah satunya adalah penelitian. Melalui penelitian yang berkualitas akan diperoleh data-data yang akurat, analisis yang tepat, dan argumentasi yang kuat dalam

menentukan prioritas sehingga dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas pula.

3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Keterbatasan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) merupakan masalah umum yang terjadi di banyak daerah, khususnya pemerintah kabupaten. Demikian pula di Kabupaten Hulu Sungai Utara, selama ini kontribusi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah masih di bawah 10 persen terhadap total APBD di setiap tahunnya. Dengan kata lain ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap transfer pemerintah pusat sangat tinggi. Kondisi ini sudah lama disadari sehingga selalu menjadi perhatian besar dari seluruh komponen di daerah agar Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa lebih mandiri dan tidak sangat tergantung terhadap dana transfer dalam pembiayaan dan penganggaran terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menerapkan strategi peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah ini perlu dilakukan inventarisasi kembali terhadap sumber-sumber penerimaan yang ada serta perluasan terhadap potensi sumber penerimaan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Hal lain dalam penyelenggaraan manajemen keuangan daerah juga dirasa perlu untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Dalam beberapa tahun terakhir opini yang dicapai yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dipertahankan bahkan ditingkatkan guna terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan daerah yang semakin baik.

4) Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan

Manajemen kearsipan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dimulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengevaluasian sampai pemusnahan arsip. Arsip adalah sesuatu yang berharga karena didalamnya memuat informasi-informasi yang penting dan mempunyai nilai guna bagi organisasi, terlebih organisasi pemerintahan. Arsip juga dapat dianggap sebagai pusat ingatan sehingga keberadaan arsip tersebut perlu disimpan atau dilindungi. Dengan pengelolaan kearsipan yang

baik dan terstruktur maka akan memberikan nilai lebih terhadap pelayanan kearsipan yang dapat dilakukan.

5) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

Peran aparatur pemerintah sangat berkorelasi terhadap tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang dikehendaki. Dengan adanya dukungan keberadaan aparatur pemerintah yang profesional, memiliki etika dan komitmen moral yang tinggi akan menghasilkan layanan publik yang memiliki kualitas optimal yang diinginkan oleh masyarakat. Karenanya pembinaan aparatur pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi aparatur yang professional tentu harus didukung dengan *reward and punishment* terhadap kinerja yang dihasilkan, disamping adanya jenjang karir yang jelas dan adil bagi seluruh aparatur pemerintah di daerah.

Aparatur pemerintah yang berkualitas memiliki peran penting terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya. Dengan semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh seorang aparat, akan dapat mengembangkan kemampuannya secara teknis dalam hal penyelenggaraan dan manajemen layanan pemerintahan. Hal ini berdampak pada semakin meningkatnya kapasitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang didukung dengan komitmen moral dan etika serta etos kerja tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal dalam memberikan kepuasan masyarakat. Karenanya keberadaan aparatur berkualitas dan profesional juga sangat menentukan kapasitas dan kualitas layanan publik yang optimal yang dapat diberikan kepada masyarakat.

6) Peningkatan kualitas dan pelayanan data dan informasi kependudukan

Sebagaimana telah dicanangkan dalam program strategis nasional sejak tahun 2012 telah dilakukan pemutakhiran data dalam mendukung program E-KTP di berbagai daerah di Indonesia. Guna mewujudkan penanganan data dan informasi kependudukan yang berkualitas, maka dipandang penting untuk terselenggaranya peningkatan efektivitas pelayanan administrasi

kependudukan kepada masyarakat yang lebih menjamin akurasi data dan informasi kependudukan.

7) Optimalisasi jangkauan jaringan internet

Dalam dua dasawarsa terakhir ini secara internasional terjadi percepatan perkembangan yang sangat pesat baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang semakin mengglobal. Kemajuan yang sangat pesat ini tidak terlepas dari pengaruh kemajuan yang terjadi di bidang teknologi informasi. Masyarakat dunia terbawa pada suatu era baru dimana batas-batas administrasi wilayah seolah tidak menjadi hambatan untuk melakukan hubungan dan kontak sosial. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini tentu harus diakses dan dimanfaatkan oleh setiap individu maupun pemerintahan serta harus disikapi sebagai suatu keadaan yang harus diadaptasi. Bilamana kemajuan teknologi ini tidak diikuti dan diadaptasi dengan baik maka boleh jadi kita akan tergerus oleh kemajuan itu sendiri. Karenanya strategi dalam hal optimalisasi jangkauan jaringan internet di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan strategi yang penting sebagai bagian dari kebijakan pemerintah ke depan.

8) Optimalisasi jaringan intranet

Intranet adalah sebuah jaringan privat (*privat network*) yang menggunakan protokol-protokol internet. Fungsi utama intranet adalah menghubungkan satu perangkat jaringan dengan perangkat jaringan lainnya atau satu komputer dengan komputer lainnya. Secara garis besar intranet ini dapat dimanfaatkan dalam lingkup organisasi pemerintahan khususnya dalam mendukung fungsi-fungsi pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.

9) Peningkatan Kualitas Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pemerintah daerah terhadap pembiayaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya tentu tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah menentukan strategi yang dapat dielaborasi dalam kebijakan daerah guna meningkatnya pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Dengan berbagai potensi lokal yang dimiliki oleh daerah dan diusahakan secara ekonomi berpotensi untuk dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

10) Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan

Untuk tewujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di daerah, tidak terlepas dari aspek pendidikan baik formal maupun informal yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pendidikan masyarakat secara formal maupun informal yang akan dikembangkan tentu harus memenuhi berbagai syarat terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas yang dapat diberikan. Dalam hal ini banyak hal yang menjadi faktor yang harus diperhatikan guna tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri, antara lain aksesibilitas terhadap jenjang pendidikan yang harus dipenuhi, kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan, manajemen yang dikembangkan pada sekolah dan pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan penunjang pendidikan. Permasalahan pendidikan memang sangat erat kaitannya dengan perkembangan kualitas sumberdaya manusia. Sementara kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah sangat terkait erat dengan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti tercapainya kesejahteraan masyarakat, kemandirian, produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya masalah pendidikan ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan suatu daerah. Perhatian yang diberikan kepada bidang pendidikan merupakan investasi yang sangat berharga untuk terciptanya kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang, dan untuk ini maka strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta penyediaan berbagai sarana penunjang pendidikan serta pemerataan terhadap akses pendidikan sangat dibutuhkan dalam perencanaan bidang pendidikan.

11) Peningkatan budaya baca dan literasi

Literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Berbagai laporan dari lembaga kompeten baik nasional maupun internasional, baik pemerintah maupun institusi non pemerintah menunjukkan bahwa indeks minat baca dan tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah dan memprihatinkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca dan tingkat literasi masyarakat Indonesia, baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Diantara sekian banyak faktor itu

salah satunya adalah budaya masyarakat Indonesia yang cenderung masih berbudaya dengar dan bicara atau lisan. Sangat perlu upaya budaya baca dan literasi ini untuk semakin ditingkatkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

12) Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya

Dalam rangka melindungi dan melestarikan kebudayaan di daerah perlu kiranya untuk meningkatkan upaya agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut melestarikan benda cagar budaya dan kekayaan budaya lainnya yang ada di daerah. Informasi serta pengetahuan akan pentingnya mengelola kekayaan budaya dan melestarikannya sudah merupakan kebutuhan sebagai salah satu alat memperkuat budaya bangsa. Dengan demikian pengelolaan kekayaan budaya ini sangat penting untuk ditingkatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat agar lebih melek budaya.

13) Peningkatan promosi kesehatan

Salah satu faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah di daerah dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yakni tentang promosi kesehatan. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pola hidup yang berkembang di masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. Pelayanan di bidang kesehatan tidak hanya berupa tindakan yang diberikan bagi si penderita sakit, penyediaan sarana dan prasarana pengobatan, tetapi juga bagaimana menjaga suatu komunitas atau seseorang sehingga tidak gampang menjadi sakit. Dengan kata lain pelayanan kesehatan tidak hanya berupa tindakan pengobatan terhadap pasien yang sakit tetapi juga mencegah dan menghindarkan seseorang untuk tidak menjadi sakit. Dalam hal ini maka promosi kesehatan perlu dilakukan guna menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga pola hidup yang sesuai dengan standar kesehatan.

14) Peningkatan kualitas layanan kesehatan

Dalam memenuhi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, layanan kesehatan masyarakat senantiasa menjadi perhatian utama pemerintah daerah

karena kesehatan adalah merupakan salah satu fundamen yang dapat menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pelayanan terhadap bidang kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kebutuhan terhadap layanan kesehatan ini dirasakan semakin meningkat dari tahun-ketahun, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Atas dasar pemikiran tersebut maka layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah daerah untuk dapat diselenggarakan secara optimal guna memenuhi hajat hidup masyarakat yang semakin berkualitas khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat mencakup penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih bermutu serta memperhatikan asupan gizi masyarakat serta menghindarkan masyarakat dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatannya. Karenanya perlu disikapi oleh pemerintah dengan semakin meningkatkan mutu pelayanan dan akses kesehatan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

15)Peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Selain mengalami pertumbuhan yang terhambat, stunting juga kerap kali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal serta prestasi belajar yang buruk. Dalam jangka panjang stunting dapat dianggap sebagai salah satu faktor resiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi. Dengan demikian sangat penting untuk adanya peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting ini secara lebih dini.

16) Peningkatan keberdayaan masyarakat

Salah satu fungsi utama yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat sehingga dalam kehidupannya

menjadi lebih independen dan tidak tergantung kepada pemerintah maupun menjadi beban masyarakat lainnya. Dengan keberdayaan yang dimilikinya maka seseorang maupun sekelompok orang akan mampu membuat keputusan hidupnya serta berkontribusi terhadap kemajuan suatu masyarakat atau komunitasnya. Dengan demikian maka peningkatan terhadap keberdayaan masyarakat ini juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang maju dan berdaya saing dalam era global di abad ini. Karenanya sangat dibutuhkan upaya-upaya pelayanan sosial guna menciptakan perbaikan dan kemandirian masyarakat.

17) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Konflik komunal dan kekerasan horizontal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia kerap kali menempatkan perempuan dan anak sebagai korban. Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan konflik kekerasan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Berbagai langkah dilakukan pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, meningkatkan akses, dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan. Komitmen negara untuk merespon situasi konflik di Indonesia, terutama pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban konflik, dimana dampaknya banyak merugikan perempuan dan anak diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Sangat penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan akibat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

18) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat juga meliputi pada upaya pengarusutamaan gender. Pesatnya kemajuan yang mulai terjadi pada abad 20 yang ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi telah membawa umat manusia kedalam suatu era baru. Segala

kemajuan dan informasi yang berada pada suatu belahan dunia akan dengan cepat merambah pada belahan dunia lainnya. Hal ini berdampak pada semakin berkembangnya kesadaran masyarakat atau suatu komunitas terhadap hak hidup layak dan kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Perkembangan yang terjadi ini juga berpengaruh terhadap tuntutan penyetaraan gender dan kesadaran untuk mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan kebijakan dalam hal pengarusutamaan gender yang dapat menempatkan kaum perempuan juga sebagai subyek dalam pembangunan dan lingkungan sosialnya.

19) Peningkatan pemahaman terhadap resiko perkawinan anak

Perlu pemahaman bersama terkait pelaksanaan undang-undang pernikahan dan undang-undang perlindungan anak untuk menghapuskan terjadinya praktek pernikahan usia dini di masyarakat. Selain melanggar hukum, pernikahan usia dini juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada pengantin perempuan. Hal ini yang harus sangat dipahami oleh masyarakat yang potensial menjadi pelaku adanya pernikahan anak di daerah.

20) Peningkatan penyelenggaraan keluarga berencana

Keluarga berencana adalah sebuah program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia guna menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Program ini dirancang untuk menyeimbangkan jumlah kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki terhadap jumlah penduduk di Indonesia.

Dalam beberapa dasawarsa ini program keluarga berencana semakin digalakkan. Hal ini menganalogikan bahwa investasi pada Keluarga Berencana adalah mutlak. Kebijakan ini dilaksanakan beriringan dengan perubahan stigma pada perempuan, diskriminasi bahkan kekerasan pada perempuan yang harus diakhiri. Oleh karenanya strategi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas KB merupakan solusi utama untuk terciptanya keluarga yang berkualitas dan memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi.

21) Peningkatan prestasi olahraga

Guna menunjang prestasi olahraga di daerah serta meningkatnya gairah berolahraga di kalangan masyarakat hendaknya ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai tempat untuk melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat dalam berolahraga sekaligus dapat menunjang peningkatan prestasi atlet daerah.

Kegiatan olahraga sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat di daerah, tidak terkecuali di Hulu Sungai Utara. Olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh dan disadari sepenuhnya oleh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. Olahraga juga sarat dengan kebanggaan dan prestasi yang dapat mengharumkan nama daerah. Oleh karenanya olahraga dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat di daerah bilamana menghasilkan atlet yang dapat berprestasi baik secara regional maupun nasional. Peningkatan pembinaan dalam menunjang prestasi atlet juga tidak lepas dari upaya untuk mendukung rencana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah Pesta Olahraga Nasional (PON) pada suatu saat.

22) Pengembangan organisasi kepemudaan

Secara umum organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di daerah. Dengan demikian akan berguna untuk lebih mendorong produktivitas masyarakat yang ada di daerah. Sebagai suatu organisasi kepemudaan juga dapat menjadi wadah pembinaan dan pengembangan ekonomi produktif di daerah yang dapat memacu segenap potensi dan sumberdaya yang ada di daerah. Oleh karenanya pengembangan organisasi kepemudaan dapat dipandang sebagai suatu strategi untuk berkembangnya kepribadian dan potensi sumberdaya manusia sebagai generasi penerus dan pelopor pembangunan dimasa yang akan datang.

23) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

Pemuda merupakan pelopor dalam pelaksanaan pembangunan. Pemuda pelopor yang semakin banyak dan berkualitas diharapkan dapat memberikan efek yang luas dan positif terhadap pemuda lainnya dan masyarakat secara

umum. Peran pemuda dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

24) Peningkatan ketahanan sosial

Ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional untuk bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Penyelenggaraan ketahanan sosial dapat dilakukan secara optimal apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kohesivitas sosial yang tinggi. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan ketahanan sosial di lingkungan mereka.

25) Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan

Dalam perjalanan panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dimulai dari zaman kemerdekaan, masalah kerukunan kehidupan khususnya dalam hal keagamaan tidak pernah mengalami masalah. Namun demikian keadaan ini tetap harus selalu menjadi perhatian bagi pemerintah termasuk pemerintah di daerah. Kemajuan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi dan sudah masuk menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari tentunya harus diantisipasi oleh pemerintah. Melalui media informasi berbasis *website* dan *cyber space* masyarakat dapat terhubung langsung dengan dunia internasional dan menyerap berbagai informasi yang terkadang dapat menyesatkan. Seringkali isu-isu yang dapat menyesatkan ini berpengaruh terhadap isu sara dan keagamaan yang berkonotasi negatif. Dalam hal ini dibutuhkan adanya strategi maupun kebijakan dari pemerintah untuk selalu menjaga suasana keagamaan yang kondusif yang selama ini sudah tercipta di daerah. Salah satu jawaban terhadap ancaman dari kemajuan teknologi informasi dan globalisasi di seluruh belahan dunia yakni dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat khususnya generasi muda yang lebih dikenal dengan istilah generasi *millennial*.

26) Peningkatan keamanan ketertiban umum

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa faktor keamanan dan ketertiban umum sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan sosial masyarakat dan keberlangsungan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Stabilitas

keamanan dan ketertiban juga menjadi hak setiap warganegara sehingga bisa beraktivitas secara baik dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian menjadi tugas pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari pelayanan publik yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya.

27) Revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan

Kearifan lokal dalam hal aktivitas masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kaitannya dengan morfologis wilayah yang dominan berada pada wilayah genangan rawa baik tergenang secara periodik maupun tergenang terus-menerus sudah berlangsung secara turun-temurun. Bahwasanya wilayah rawa yang berada pada lebih kurang 89 persen luas wilayah keseluruhan di Hulu Sungai Utara selama ini menjadi sumber pendapatan dan mata pencaharian penduduknya khususnya di sektor pertanian dalam arti luas dan perikanan darat. Seiring dengan perkembangan penduduk, kebutuhan terhadap produk pertanian dan perikanan ini juga mengalami peningkatan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, baik di regional Hulu Sungai Utara maupun masyarakat di regional kabupaten lainnya. Guna memenuhi kebutuhan dan permintaan yang semakin meningkat, sementara luasan wilayah budi daya pertanian ini terbatas jumlahnya maka dibutuhkan strategi revitalisasi terhadap kawasan pertanian dan perikanan yang ada, termasuk sub sektor peternakan tentunya.

28) Efektivitas manajemen pengelolaan pasar

Manajemen pengelolaan pasar sangat penting untuk dikembangkan agar pasar dalam fungsinya sebagai tempat terjadinya transaksi antara pedagang dengan pembeli dapat berlangsung secara efisien. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di ibukota kabupaten terdapat dua jenis pasar yakni pasar tradisional atau pasar rakyat dan pasar modern yang bertempat di Plaza Amuntai. Dibutuhkan manajemen yang tepat dalam menangani dan menyelenggarakan fungsi masing-masing pasar ini dalam kontribusinya sebagai penyedia berbagai barang kebutuhan masyarakat di daerah.

29) Pemberdayaan IKM, UMKM dan koperasi

Guna mewujudkan terciptanya nilai tambah perekonomian yang didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki oleh daerah dan diharapkan dapat mentransformasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, maka strategi terhadap pengembangan sektor industri kecil, koperasi, perdagangan, hotel dan rumah makan juga penting untuk dilakukan. Keberhasilan dalam merubah struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier akan berimplikasi pada meningkatnya PDRB yang berarti meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita menunjukkan secara rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Pemberdayaan IKM, UMKM dan koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tidak terlepas dari banyaknya potensi industri kecil dan kerajinan yang sedang berkembang di daerah dan memiliki pangsa pasar cukup luas di luar daerah, luar kabupaten dan luar provinsi.

30) Peningkatan pelayanan sektor jasa

Perkembangan sektor jasa seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dunia. Di negara maju perkembangan sektor jasa justru melebihi sektor manufaktur dan industri barang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa semakin dibutuhkan keberadaannya oleh manusia. Pengelolaan industri jasa memiliki spesifikasi yaitu lebih menekankan dalam keterlibatan sumberdaya manusia, artinya dalam industri jasa manusia berperan sangat penting dibanding faktor produksi yang lain (modal, teknologi). Perkembangan sektor jasa ini juga sangat berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Dengan demikian peningkatan pelayanan terkait sektor jasa ini akan membutuhkan sekaligus menciptakan sumberdaya yang semakin berkualitas.

31) Meningkatkan ketersediaan energi dan protein pangan masyarakat

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dan pertambahan jumlah penduduk, maka permintaan terhadap barang konsumsi masyarakat juga meningkat. Dengan demikian pilihan konsumsi terhadap berbagai barang dan jasa juga meningkat. Kebutuhan akan barang-barang konsumtif akan semakin

menyuburkan perkembangan sektor-sektor ekonomi termasuk sektor pertanian. Dengan demikian meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan konsumsi pangan harus dijawab dengan kebijakan yang terarah pada meningkatnya ketahanan pangan di daerah.

32) Pengembangan pariwisata lokal

Secara nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat-istiadat, dan kebudayaan serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis yang menghasilkan keindahan alam dan satwa. Secara kedaerahan di Indonesia memiliki berbagai potensi pariwisata lokal yang beraneka ragam dan berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan. Demikian pula di Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga memiliki seni budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah terdahulu dan panorama alam berupa kawasan rawa yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu pariwisata yang unik. Ternyata pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan. Dengan demikian sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal.

33) Penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja

Secara nasional masalah ketenagakerjaan dari waktu ke waktu diperkirakan masih akan tetap diwarnai dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi serta terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi seperti ini merupakan akumulasi dari permasalahan yang menyangkut faktor ekonomi, demografi dan sosial budaya. Menyikapi atas perkembangan masalah ketenagakerjaan ini maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan yang strategis dalam rangka pembangunan usaha produktif, yang salah satunya dengan kebijakan usaha ekonomi berbasis potensi lokal. Secara teknis strategi ini merupakan konsep program membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan

potensi sumberdaya alam/lahan, sumberdaya manusia dan teknologi sederhana yang dimiliki serta dengan melihat peluang pasar.

34) Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial dewasa ini menunjukkan bahwa masih terdapat warga negara yang hak atas kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara layak dikarenakan belum memperoleh pelayanan sosial yang memadai dari negara. Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga belum terlepas dari adanya permasalahan tentang PMKS ini. Dalam hal upaya untuk mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui SKPD yang terkait telah melakukan beberapa kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Di setiap tahunnya kebijakan ini telah diimplementasikan baik melalui anggaran pada SKPD terkait juga melalui kebijakan bantuan sosial dari alokasi belanja yang bersifat hibah dan bantuan sosial. Namun demikian masalah PMKS ini belum tertuntaskan secara keseluruhan sehingga strategi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini harus selalu diprogramkan.

35) Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kementerian sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Orang dikatakan miskin jika dalam kadar tertentu sumberdaya ekonomi yang mereka miliki di bawah target atau patokan yang telah ditentukan. Selain itu ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah banyak diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya.

Kemiskinan dapat berdampak pada berbagai masalah sosial seperti menurunnya kesehatan, cakupan gizi rendah, pemeliharaan kesehatan kurang, lingkungan buruk, produktivitas rendah, angka kriminal meningkat dan berbagai dampak lainnya. Karenanya sangat penting bagi setiap pemerintahan untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Dengan demikian dalam kebijakan pembangunan ke depan perlu untuk mengoptimalkan program-program yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan di Hulu Sungai Utara.

36) Meningkatkan cakupan layanan air bersih, layak dan aman

Kebutuhan terhadap layanan air bersih sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan persebaran permukiman di daerah maka dibutuhkan peningkatan terhadap cakupan layanan air bersih ini yang lebih menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Peningkatan cakupan terhadap layanan penyediaan air bersih ini menyangkut kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia, jaringan perpipaan serta ketersediaan air bersih yang cukup dan berkualitas baik. Diharapkan layanan air bersih ini akan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan sektor perumahan dan permukiman yang semakin bertambah.

37) Meningkatkan cakupan sanitasi layak dan aman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat berarti cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan tiga komponen untuk dikelola yaitu persampahan, air limbah dan drainase. Sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi memiliki manfaat yang luas. Pengabaian terhadap aspek sanitasi dapat beresiko terjadinya angka kesakitan yang meningkat sehingga berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Semakin lama pengabaian terhadap aspek sanitasi ini maka akan semakin besar biaya investasi yang dibutuhkan untuk perbaikannya. Dengan demikian strategi untuk meningkatnya cakupan

sanitasi dasar layak sangat penting untuk dialokasikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

38) Meningkatkan layanan persampahan

Masalah persampahan berbanding lurus dengan semakin banyaknya kawasan permukiman yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat di suatu daerah/wilayah. Selain itu permasalahan sampah ini juga merupakan akumulasi dari semakin berkembangnya sarana prasarana ekonomi yang dibangun seperti pasar dan pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian.

Permasalahan persampahan ini juga menjadi salah satu isu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang cukup menjadi polemik dengan permasalahan perkotaan, tingginya tingkat kepadatan dan fungsi aktifitas heterogen. Sampah yang dihasilkan pada beberapa kawasan khusus di perkotaan yang tingkat kepadatan penduduknya relative tinggi tentu akan memiliki dampak sosial yang harus dicegah dan diantisipasi. Karenanya strategi untuk mengatasi masalah persampahan baik di perkotaan maupun kawasan permukiman lainnya harus menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah di Hulu Sungai Utara. Dengan demikian berbagai kemungkinan resiko sosial yang ditimbulkan oleh masalah persampahan ini dapat dikendalikan.

39) Meningkatkan jalan dalam kondisi baik

Kondisi jalan dalam keadaan baik merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat beraktivitas secara optimal dalam berbagai bidang baik secara sosial terlebih kegiatan perekonomian masyarakat sehari-hari. Sudah merupakan pengetahuan yang dipahami oleh pelaku pembangunan bahwa fasilitas jalan adalah faktor yang sangat penting dalam memperkuat daya saing daerah. Kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang baik akan sangat berperan dalam mendukung kegiatan masyarakat serta menarik perhatian bagi pelaku dunia usaha untuk berinvestasi di suatu daerah. Dengan demikian baiknya kondisi jalan dan infrastruktur lainnya selalu mendapat perhatian dan prioritas pembangunan di daerah.

40) Meningkatkan akses pelayanan transportasi darat dan sungai

Keberadaan infrastruktur perhubungan baik darat maupun sungai sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan baik ekonomi maupun aktivitas sosial di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat dan sungai yang cukup secara kuantitas maupun kualitas akan sangat membantu berbagai mobilitas kehidupan kemasyarakatan. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan darat dan sungai merupakan salah satu strategi yang penting guna meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di samping memenuhi rasa keadilan terhadap pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dalam aspek ekonomi sarana prasarana perhubungan juga merupakan ukuran penting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah dan menjadi daya tarik tersendiri untuk masuknya investasi dan permodalan bagi daerah tersebut.

41) Pencegahan dan penurunan tingkat kekumuhan di permukiman

Masalah permukiman kumuh di Indonesia hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman di kota maupun kabupaten. Permasalahan permukiman kumuh juga menjadi salah satu isu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang cukup menjadi polemik dengan permasalahan perkotaan, tingginya tingkat kepadatan dan fungsi aktifitas heterogen. Kekumuhan yang terjadi pada beberapa kawasan khusus di perkotaan yang tingkat kepadatan penduduknya relatif tinggi tentu akan memiliki dampak sosial yang harus dicegah dan diantisipasi. Karenanya strategi untuk mengatasi masalah kekumuhan di perkotaan dan dampak sosial yang bisa saja terjadi menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah di Hulu Sungai Utara. Dengan demikian berbagai kemungkinan resiko sosial yang ditimbulkan oleh masalah kekumuhan ini dapat diantisipasi.

42) Pengurangan rumah tidak layak huni

Secara nasional kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat kurang. Oleh karenanya Kementerian Perumahan Rakyat sangat berharap adanya kerjasama dari setiap pemerintah daerah, para pengembang perumahan serta masyarakat luas untuk bersama-

sama menyelesaikan masalah perumahan ini. Intervensi pemerintah dalam program pembangunan perumahan ke depan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi karena dikhawatirkan bila hal ini tidak dilakukan, masyarakat tidak akan mampu memiliki rumah yang layak huni dengan harga terjangkau. Dengan demikian sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, strategi pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

43) Peningkatan kualitas air

Penyediaan air bersih selain kuantitasnya juga kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Dalam hal air bersih, sudah merupakan hal umum bahwa dalam menetapkan kualitas dan karakteristik dikaitkan dengan suatu baku mutu air tertentu atau standar kualitas air. Standar kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Menjadi sangat penting untuk memperhatikan kualitas air baku di daerah dan persyaratannya sebagai sumber kehidupan masyarakat untuk kebutuhan air minum atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kebutuhan air minum, pembudidayaan perikanan air tawar, peternakan, pertanian dan berbagai peruntukkan lainnya.

44) Peningkatan kualitas udara

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup tinggi tidak saja berdampak pada masalah kemacetan lalu lintas tetapi juga menimbulkan masalah lain seperti kecelakaan lalu lintas, polusi udara, kebisingan, kerugian ekonomi serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kerugian ekonomi dan dampak kesehatan akibat pencemaran udara yang diakibatkan kendaraan bermotor dapat terlihat melalui meningkatnya angka kesakitan masyarakat yang terjadi.

Selain kendaraan bermotor, memburuknya kualitas udara dapat pula disebabkan oleh kegiatan industri dan kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal ini harus menjadi perhatian pemerintah termasuk pemerintah di daerah untuk berkontribusi mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas udara di wilayahnya.

45) Peningkatan kesesuaian tata ruang

Pengertian tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat oleh masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Tata ruang sendiri adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang sebagaimana terdapat dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Karenanya peningkatan kesesuaian tata ruang merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya pola pemanfaatan ruang yang saling sinergi dengan berbagai kebijakan pembangunan di daerah.

46) Mengoptimalkan kajian resiko bencana daerah

Kajian resiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa pengkajian resiko bencana merupakan suatu metode untuk menganalisis bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan dan dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan orang, harta benda, mata pencaharian dan lingkungan tempat masyarakat bergantung. Cara pengkajiannya dengan menentukan sifat dan besarnya resiko yang ada didalam wilayah analisis.

47) Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas

Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yakni masyarakat berhak untuk (1) mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya masyarakat rentan bencana; (2) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan; (3) mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; (4) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan; (5) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; (6) melakukan pengawasan; (7) mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (khususnya yang terkena bencana); dan (8)

memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Dengan memperhatikan UU sebagaimana di atas, khususnya memperhatikan point (4), (5) dan (6), maka strategi “pengurangan resiko bencana berbasis komunitas” dalam penanggulangan bencana merupakan hal penting untuk lebih mengoptimalkan keterlibatan masyarakat (komunitas) dalam rangka penanggulangan bencana di daerah.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebagaimana penjabaran di atas, maka rumusan arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah;
- 2) Pengembangan instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan daerah;
- 4) Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- 5) Peningkatan efektivitas penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 6) Penguatan kualitas sistem pengawasan daerah;
- 7) Pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip;
- 8) Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan daerah;
- 9) Peningkatan kompetensi aparatur;
- 10) Peningkatan pencapaian SPM dan SOP;
- 11) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 12) Penyediaan internet Broadband cepat dan terjangkau;
- 13) Integrasi jaringan antar instansi;
- 14) Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan PAD;
- 15) Meningkatkan aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- 16) Pengembangan manajemen sekolah;

- 17) Peningkatan kompetensi guru;
- 18) Pemenuhan standar minimum pendidikan (SPM);
- 19) Peningkatan koleksi buku dan fasilitas perpustakaan;
- 20) Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan karakter;
- 21) Pelestarian cagar budaya dan nilai warisan tradisi;
- 22) Pengembangan kreativitas kesenian;
- 23) Pemberdayaan masyarakat dalam mendorong pembudayaan pola hidup bersih dan sehat;
- 24) Peningkatan persediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- 25) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- 26) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- 27) Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak dan remaja;
- 28) Peningkatan kualitas kesehatan lansia;
- 29) Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil;
- 30) Peningkatan gizi bayi dan balita;
- 31) Optimalisasi teknologi tepat guna (TTG);
- 32) Optimalisasi potensi dan aset desa;
- 33) Optimalisasi kawasan perdesaan;
- 34) Pengembangan kebijakan gender;
- 35) Pemenuhan hak-hak anak;
- 36) Peningkatan akses perempuan dalam pemerintahan, ekonomi dan politik;
- 37) Pengembangan strategi komunikasi resiko perkawinan anak;
- 38) Pendampingan terhadap keluarga yang potensial melakukan perkawinan anak;
- 39) Peningkatan partisipasi KB aktif;
- 40) Pendataan dan fasilitasi pasangan usia subur yang ingin be KB;
- 41) Peningkatan ketahanan keluarga;
- 42) Pemerataan fasilitas dan kualitas olahraga;
- 43) Pembinaan klub olahraga;
- 44) Perbaikan manajemen pembibitan atlet;
- 45) Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan;
- 46) Peningkatan kualitas dan kreativitas pemuda;
- 47) Peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat;

- 48) Peningkatan kerukunan ummat beragama;
- 49) Peningkatan peran serta masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum dan pencegahan perkembangan kriminalitas;
- 50) Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum;
- 51) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
- 52) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
- 53) Penataan pasar;
- 54) Peningkatan kapasitas SDM dan nilai tambah produk;
- 55) Peningkatan manajemen sektor jasa;
- 56) Penguatan ketahanan pangan daerah;
- 57) Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
- 58) Peningkatan investasi daerah;
- 59) Peningkatan kemandirian berusaha/*enterpreneurship*;
- 60) Peningkatan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat;
- 61) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- 62) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu;
- 63) Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
- 64) Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 65) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih layak dan aman;
- 66) Perluasan dan pemeliharaan jaringan perpipaan kabupaten;
- 67) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
- 68) Mengoptimalkan pengelolaan persampahan dengan prinsip keberlanjutan;
- 69) Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 70) Pemasangan dan pemeliharaan marka jalan;
- 71) Pemeliharaan alur sungai dan rambu sungai;
- 72) Meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;
- 73) Meningkatkan kualitas rumah layak huni;
- 74) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi pencemaran sungai, air tanah dan rawa;

- 75) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi pencemaran udara;
- 76) Pengendalian pemanfaatan peruntukkan lahan yang sesuai RTRW;
- 77) Meningkatkan kualitas dengan review dokumen rencana penanggulangan bencana;
- 78) Pembentukan desa tangguh bencana.

Secara sistematis penjabaran isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah disebutkan baik pada bab terdahulu maupun yang disebutkan pada bagian awal bab VI ini dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Peningkatan Sinergitas Perencanaan di Tingkat Daerah dengan Perangkat Daerah
				2. Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
			2. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kebijakan Daerah
			3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	4. Optimalisasi Potensi Daerah untuk Peningkatan PAD
				5. Peningkatan Efektifitas Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
				6. Penguatan kualitas sistem pengawasan daerah
			4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	7. Pengelolaan, Perlindungan, dan Penyelamatan Arsip
				8. Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan daerah
		2.Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	9. Peningkatan Kompetensi Aparatur
				10. Peningkatan Pencapaian SPM dan SOP
			6. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan	11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	3.Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah	7. Optimalisasi jangkauan jaringan internet	12. Penyediaan internet Broadband cepat dan terjangkau
		4.Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	8. Optimalisasi jaringan intranet	13. Integrasi jaringan antar instansi
	3. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	5. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	9. Peningkatan Kualitas Pendapatan Daerah	14. Optimalisasi Potensi Daerah untuk Peningkatan PAD

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
2. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas SDM	4. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	10. Peningkatan Kuitas dan Akses Layanan Pendidikan	15. Meningkatkan Aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang Pendidikan
				16. Pengembangan Manajemen Sekolah
				17. Peningkatan Kompetensi Guru
				18. Pemenuhan Standar Minimum Pendidikan (SPM)
			11. Peningkatan Budaya Baca dan Literasi	19. Peningkatan Koleksi Buku dan Fasilitas Perpustakaan
				20. Peningkatan Peran Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Pengembangan Karakter
			12. Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya	21. Pelestarian Cagar Budaya dan Nilai warisan Tradisi
				22. Pengembangan Kreatifitas Kesenian
		7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13. Peningkatan Promosi Kesehatan	23. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Pembudayaan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
				Pola Hidup Bersih dan Sehat
			14. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	24. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
				25. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
				26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
				27. Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja
				28. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lansia
			15. Peningkatan Penanganan Gizi Buruk dan Stunting	29. Pemenuhan Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
				30. Peningkatan Gizi Bayi dan Balita
		8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	16. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	31. Optimalisasi teknologi tepat guna (TTG)

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
				32. Optimalisasi potensi dan aset desa
				33. Optimalisasi kawasan perdesaan
		9. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17. Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	34. Pengembangan Kebijakan Gender
				35. Pemenuhan Hak-hak Anak
			18. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	36. Peningkatan Akses Perempuan dalam Pemerintahan, ekonomi dan Politik
			19. Peningkatan Pemahaman Terhadap Risiko Perkawinan Anak	37. Pengembangan Strategi Komunikasi Risiko Perkawinan Anak
				38. Pendampingan Terhadap Keluarga yang potensial melakukan Perkawinan Anak
		10. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	20. Peningkatan Penyelenggaraan Keluarga Berencana	39. Peningkatan Partisipasi KB Aktif
				40. Pendataan dan Fasilitasi Pasangan Usia

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
				Subur yang ingin ber KB
				41. Peningkatan Ketahanan Keluarga
		11.Meningkatnya kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	21. Peningkatan Prestasi Olahraga	42. Pemerataan Fasilitas dan Kualitas Olahraga
				43. Pembinaan Klub Olahraga
				44. Perbaikan Manajemen Pembibitan Atlet
			22. Pengembangan Organisasi Kepemudaan	45. Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan
			23. Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan	46. Peningkatan Kualitas dan Kreatifitas Pemuda
	5. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	12. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	24. Peningkatan ketahanan sosial	47. Peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalis di masyarakat
			25. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan	48. Peningkatan kerukunan umat beragama
			26. Peningkatan keamanan ketertiban umum	49. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ketentraman, ketertiban umum dan pencegahan perkembangan kriminalitas

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
				50. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum
3. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	6. Meningkatnya perekonomian daerah	13. Meningkatkan produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	27. Revitalisasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	51. Peningkatan produksi dan produktifitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
				52. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			28. Efektifitas manajemen pengelolaan pasar	53. Penataan Pasar
			29. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi	54. Peningkatan kapasitas SDM dan Nilai Tambah Produk
			30. Peningkatan Pelayanan sektor jasa	55. Peningkatan manajemen sektor jasa
		14. Meningkatkan ketahanan pangan daerah	31. Meningkatkan ketersediaan energi dan protein pangan masyarakat	56. Penguatan Ketahanan Pangan daerah
		15. Meningkatkan sektor pariwisata	32. Pengembangan pariwisata lokal	57. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
		16. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	33. Penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja	58. Peningkatan investasi daerah
				59. Peningkatan kemandirian berusaha/ entrepreneurship
	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin	17. Penurunan Kemiskinan	34. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	60. Peningkatan Pembinaan PMKS melalui Pemberdayaan dan Peran aktif masyarakat
			35. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	61. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
				62. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu
				63. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
				64. Meningkatkan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
4. Belum optimalnya Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum	8. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	18. Meningkatkan akses pelayanan infrastruktur dasar	36. Meningkatkan cakupan layanan air bersih layak dan aman	65. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
				air bersih layak dan aman
				66. Perluasan dan pemeliharaan jaringan perpipaan kabupaten
			37. Meningkatkan cakupan sanitasi layak dan aman	67. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
			38. Meningkatkan layanan persampahan	68. Mengoptimalkan Pengelolaan persampahan dengan prinsip keberlanjutan
			39. Meningkatkan jalan dalam kondisi baik	69. Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan
			40. Meningkatkan akses pelayanan transportasi darat dan sungai	70. Pemasangan dan Pemeliharaan marka jalan
				71. Pemeliharaan alur sungai dan rambu sungai
			41. Pencegahan dan Penurunan tingkat kekumuhan di Permukiman	72. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan
			42. Pengurangan rumah tidak layak huni	73. Meningkatkan kualitas rumah layak huni

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)
5. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi kebencanaan	9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	43. Peningkatan Kualitas air	74. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktifitas yang berpotensi pencemaran sungai, air tanah dan rawa
			44. Peningkatan Kualitas udara	75. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktifitas yang berpotensi pencemaran udara
		20. Meningkatkan Kesesuaian peruntukan lahan	45. Peningkatan Kesesuaian Tata Ruang	76. Pengendalian Pemanfaatan peruntukan lahan yang sesuai RTRW
	10. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana	21. Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	46. Mengoptimalkan Kajian Risiko Bencana Daerah	77. Meningkatkan Kualitas Dengan Review Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
			47. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas	78. Pembentukan Desa Tangguh Bencana

6.3. Program Prioritas Pembangunan

Program Prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran RPD seperti pada Tabel 6.2.

TABEL 6.2
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Tujuan 1 : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (54,04)	CC (55,00)	650.611.284.138	B (60,00)	671.890.780.690	B (65,00)	692.087.840.052	B (70)	695.254.608.640	B (70)	695.254.608.640	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B/63,34	B/66	647.982.743.277	B/66,5	668.228.756.851	B/67	687.694.118.928	B/67,5	690.976.195.165	B/67,5	690.976.195.165	
		Opini BPK	WTP (2020)	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Persentase Pencegahan Korupsi (MCP)/ KORSUPGAH	68%	70%		75%		78%		80%		80%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	637.377.943.296	100%	653.922.609.381	100%	672.114.138.384	100%	675.203.796.898	100%	675.203.796.898	Semua SKPD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase SKPD dengan capaian kinerja tinggi	100%	100%	858.000.000	100%	1.491.500.000	100%	1.260.000.000	100%	1.226.000.000	100%	1.226.000.000	Bappedalitbang
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, dan RPKD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100%	100%	875.550.000	100%	984.307.800	100%	1.033.610.928	100%	1.081.115.924	100%	1.081.115.924	Bappedalitbang
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Progres tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)	80%	80%	4.666.750.000	85%	5.357.652.000	85%	5.464.805.040	90%	5.574.101.141	90%	5.574.101.141	Inspektorat

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase cakupan pengendalian intern pemerintah	100%	100%	893.510.000	100%	1.254.554.726	100%	1.386.910.063	100%	1.412.290.335	100%	1.412.290.335	Inspektorat
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	154.616.856	100%	213.220.444	100%	263.698.013	100%	272.978.367	100%	272.978.367	Semua Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	100%	100%	392.692.500	100%	446.912.500	100%	445.956.500	100%	455.912.500	100%	455.912.500	Semua Kecamatan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian	100%	100%	903.680.625	100%	1.190.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.225.000.000	100%	1.225.000.000	Bappedalitbang
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	1.560.000.000	100%	2.733.000.000	100%	3.900.000.000	100%	3.900.000.000	100%	3.900.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	25%	25%	0	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	Dinas Perpustakaan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Arsip yang digunakan/diakses	NA %	NA %	-	35%	30.000.000	35%	50.000.000	35%	50.000.000	35%	50.000.000	Dinas Perpustakaan
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50%	90,50%	225.000.000	91%	430.000.000	91,50%	400.000.000	92%	400.000.000	92%	400.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 2 : Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85%	85%	2.628.540.861	87%	3.662.023.839	90%	4.393.721.124	95%	4.278.413.475	95%	4.278.413.475	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	85%	85%	414.270.000	87%	760.000.000	90%	825.000.000	95%	790.000.000	95%	790.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85%	85%	1.547.945.861	87%	2.161.673.839	90%	2.696.071.124	95%	2.620.038.475	95%	2.620.038.475	BKPSDM
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	7.500.000	100%	74.875.000	100%	116.125.000	100%	116.125.000	100%	116.125.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan KTP elektronik	99,82%	100%	59.875.000	100%	59.875.000	100%	128.250.000	100%	128.250.000	100%	128.250.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	53,97%	94%	45.000.000	95,50%	45.000.000	97,50%	53.000.000	100%	59.000.000	100%	59.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	550.200.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	100%	100%	3.750.000	100%	50.600.000	100%	65.275.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	60%	65%	2.060.731.147	70%	3.404.333.476	75%	4.016.001.164	80%	3.978.138.593	80%	3.978.138.593	
	Sasaran 3 : Meningkatkan jaringan interkoneksi daerah	Jumlah desa yang terjangkau jaringan internet (4G)	196	201	457.103.947	206	758.349.173	211	920.200.730	214	910.199.173	214	910.199.173	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	60%	85%	350.690.822	90%	578.639.856	95%	677.008.631	100%	670.915.553	100%	670.915.553	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85%	85%	106.413.125	90%	179.709.317	95%	243.192.099	100%	239.283.620	100%	239.283.620	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Sasaran 4 : Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah SKPD yang menerapkan SPBE	10 SKPD	17 SKPD	1.603.627.200	25 SKPD	2.645.984.303	33 SKPD	3.095.800.434	38 SKPD	3.067.939.420	38 SKPD	3.067.939.420	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	80%	85%	1.539.377.250	90%	2.509.694.385	95%	2.936.341.230	100%	2.909.915.349	100%	2.909.915.349	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	60%	85%	64.249.950	90%	136.289.918	95%	159.459.204	100%	158.024.071	100%	158.024.071	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Tujuan 3 : Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase PAD/ Total Pendapatan Daerah (%)	11,43%	12,29%	249.678.837.792	12,29%	250.586.872.090	12,29%	251.005.291.774	12,29%	251.005.291.774	12,29%	251.005.291.774	
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kemampuan	Jumlah PAD (Rp)	Rp. 104.881.802.914.604	Rp. 112.747.938.133.199	249.678.837.792	Rp. 121.204.033.493.189	250.586.872.090	Rp. 130.294.336.005.178	251.005.291.774	Rp. 140.066.411.205.567	251.005.291.774	Rp. 140.066.411.205.567	251.005.291.774	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel	90%	90%	248.622.939.313	90%	249.003.735.601	90%	249.317.342.076	90%	249.317.342.076	90%	249.317.342.076	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi/Jumlah PAD	12.051.239.751	12.051.239.751	508.376.500	123.882.008.347,270	939.947.510	125.740.238.472,470	964.950.010	127.626.342.049,560	964.950.010	127.626.342.049,560	964.950.010	Bapenda
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85%	85%	547.521.979	85%	643.188.979	85%	722.999.688	85%	722.999.688	85%	722.999.688	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Tujuan 4 : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	66,12	66,88	67.693.457.429	67,26	81.273.293.488	67,64	87.583.633.103	66,02	87.111.543.335	66,02	87.111.543.335	
	Sasaran 6 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	7,75 Tahun	8,03 Tahun	8.377.649.095	8,17 Tahun	12.813.496.748	8,31 Tahun	15.125.196.796	8,45 Tahun	14.978.907.576	8,45 Tahun	14.978.907.576	
		- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 Tahun	13,36 Tahun		13,58 Tahun		13,80 Tahun		14,02 Tahun		14,02 Tahun		

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	
		'- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,47	12		12,5		13		13,50		13,50			
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	7,75	8,03	7.602.000.085	8,17	11.769.411.488	8,31	13.891.441.286	8,45	13.765.152.066	8,45	13.765.152.066	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Sertifikat Pendidik	74,27%	76,00%	180.483.750	78,00%	228.920.000	80,00%	318.590.250	82,00%	318.590.250	82,00%	318.590.250	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100%	100%	386.165.880	100%	386.165.880	100%	386.165.880	100%	386.165.880	100%	386.165.880	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	12,00 Nilai	195.000.000	12,50 Nilai	410.000.000	13,00 Nilai	510.000.000	13,50 Nilai	485.000.000	13,50 Nilai	485.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (Judul)	1 naskah (358 Judul)	1 naskah (358 Judul)	5.000.000	1 naskah (362 Judul)	10.000.000	1 naskah (367 Judul)	10.000.000	1 naskah (373 Judul)	15.000.000	1 naskah (373 Judul)	15.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	100%	8.999.380	100%	8.999.380	100%	8.999.380	100%	8.999.380	100%	8.999.380	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Sasaran 7 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	64,10 tahun	64,68 tahun	51.145.484.634	64,97 tahun	56.622.349.092	65,26 tahun	59.041.624.347	65,55 tahun	58.876.533.357	65,55 tahun	58.876.533.357	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	226.764.625,00	100%	366.224.869,38	100%	428.483.097,17	100%	424.198.266	100%	424.198.266	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	48.695.663.652	100%	52.539.821.796	100%	54.255.941.501	100%	54.137.832.086	100%	54.137.832.086	Dinas Kesehatan

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	100%	100%	696.000.000	100%	1.147.309.127	100%	1.351.477.589	100%	1.338.838.067	100%	1.338.838.067	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	1.452.723.332	100%	2.448.945.464	100%	2.865.266.192	100%	2.836.613.530	100%	2.836.613.530	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100%	100%	74.333.025	100%	120.047.835,38	100%	140.455.967	100%	139.051.408	100%	139.051.408	Dinas Kesehatan
	Sasaran 8 : Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6649	0,723	3.923.729.945	0,734	4.649.214.938	0,747	5.089.826.938	0,758	4.957.714.938	0,758	4.957.714.938	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100%	100%	332.313.488	100%	614.000.000	100%	744.000.000	100%	734.000.000	100%	734.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Persentase Desa yang mempunyai Posyantekdes	100%	100%	132.182.320	100%	165.000.000	100%	190.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki Bumdes yang aktif	100%	100%	88.071.700	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel	100%	100%	2.076.950.000	100%	2.100.000.000	100%	2.356.612.000	100%	2.170.000.000	100%	2.170.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		Persentase desa yang telah mempunyai Perdes kewenangan desa dan Penetapan Batas Desa	100%	100%	13.300.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100%	100%	192.025.000	100%	345.000.000	100%	390.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase lembaga kerjasama antara desa yang aktif	100%	100%	11.362.500	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	1.077.524.937	100%	1.065.214.938	100%	1.089.214.938	100%	1.083.714.938	100%	1.083.714.938	Semua Kecamatan
	Sasaran 9 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perkawinan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,65	75	735.583.930	76,5	1.232.207.662	78	1.451.459.566	79,5	1.437.849.795	79,5	1.437.849.795	
		Indeks Pembangunan Desa (IPD)	91,52	92,02		92,52		93,02		93,52		93,52		
		Jumlah Perkawinan Anak (orang)	69 orang	59 orang		49 orang		39 orang		29 orang		29 orang		
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	75 APE %	79.134.635	75 APE %	183.020.887	75 APE %	215.586.565	75 APE %	213.565.094	75 APE %	213.565.094	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	70%	70%	203.219.213	70%	334.967.934	70%	394.570.191	70%	390.870.460	70%	390.870.460	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak	100%	100%	22.175.526	100%	29.574.324	100%	34.836.608	100%	34.509.958	100%	34.509.958	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100%	100%	102.785.331	100%	190.098.529	100%	223.923.562	100%	221.823.918	100%	221.823.918	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100%	100%	113.342.230	100%	185.062.185	100%	217.991.080	100%	215.947.063	100%	215.947.063	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100%	100%	214.926.995	100%	309.483.803	100%	364.551.560	100%	361.133.302	100%	361.133.302	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		Sasaran 10 : Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,70%	0,70%	770.484.500	0,69%	1.291.025.048	0,68%	1.533.125.456	0,67%	1.518.137.669	0,67%	1.518.137.669	
		Program Pembinaan	Jumlah Peserta KB Baru / PB	5.036 Akseptor	5086 Akseptor	449.460.000	5137 Akseptor	622.973.516	5188 Akseptor	703.673.652	5240 Akseptor	698.677.723	5240 Akseptor	698.677.723	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	13 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	49.244.250	22 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	97.180.000	25 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	133.980.902	28 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	138.974.973	28 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	138.974.973	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	37,5%	65%	100.337.000	75%	225.914.766	85%	269.814.000	90%	259.824.000	90%	259.824.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	NA Indeks Skala 0-100	65,00 Indeks Skala 0-100	171.443.250	66,00 Indeks Skala 0-100	344.956.766	67,00 Indeks Skala 0-100	425.656.902	68,00 Indeks Skala 0-100	420.660.973	68,00 Indeks Skala 0-100	420.660.973	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Sasaran 11 : Meningkatkan kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	65%	70%	2.740.525.325	72%	4.665.000.000	75%	5.342.400.000	80%	5.342.400.000	80%	5.342.400.000	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	13 Peringkat	9 Peringkat	2.252.497.200	8 Peringkat	3.780.000.000	7 Peringkat	4.298.900.000	6 Peringkat	4.298.900.000	6 Peringkat	4.298.900.000	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65%	70%	413.028.125	75%	735.000.000	80%	843.500.000	85%	843.500.000	85%	843.500.000	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan	100%	100%	75.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
	Tujuan 5 : Meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Angka Kriminalitas	6	<6	18.650.822.500	<5,5	23.719.373.548	<5	26.062.780.862	<4,5	26.197.805.193	<4,5	26.197.805.193	
	Sasaran 12 : Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Jumlah Kasus konflik sosial	0 kasus	0 kasus	18.650.822.500	0 kasus	23.719.373.548	0 kasus	26.062.780.862	0 kasus	26.197.805.193	0 kasus	26.197.805.193	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	70%	70%	132.750.000	70%	176.415.000	100%	213.460.000	100%	213.460.000	100%	213.460.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	80%	80%	10.475.000	80%	5.475.000	100%	20.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	70%	70%	1.017.435.000	70%	1.217.665.000	100%	1.242.780.000	100%	1.242.780.000	100%	1.242.780.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100%	100%	10.086.780.000	100%	10.338.949.500	100%	10.597.423.237	100%	10.862.358.818	100%	10.862.358.818	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Indeks Ketahanan Nasional	100%	100%	37.615.000	100%	37.615.000	100%	75.230.000	100%	74.710.000	100%	74.710.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Pandan)	0%	0%	0	100%	7.250.000	100%	18.250.000	100%	18.250.000	100%	18.250.000	Kec. Sungai Pandan, Kec. Paminggir, Kec. Sungai Tabukan
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	100%	927.504.000	100%	1.320.755.200	100%	1.554.805.980	100%	1.554.805.980	100%	1.554.805.980	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100%	100%	185.346.000	100%	270.949.800	100%	331.592.270	100%	331.592.270	100%	331.592.270	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Banjang)	100%	100%	5.000.000	100%	213.512.798	100%	48.075.000	100%	48.075.000	100%	48.075.000	Semua Kecamatan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Indeks Kewaspadaan Nasional	100%	100%	67.355.000	100%	118.675.000	100%	156.290.000	100%	155.510.000	100%	155.510.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	6.180.562.500	100%	10.012.111.250	100%	11.804.874.375	100%	11.681.263.125	100%	11.681.263.125	Sekretariat Dewan

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Tujuan 6 : Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	3,23%	4,50%	8.649.400.652	5,14%	13.579.644.701	5,50%	16.195.323.396	6,05%	15.875.893.186	6,05%	20.540.137.202	
		PDRB Perkapita ADHB (Rp)	Rp 20.648,74	Rp 20.855,23		Rp 20.924,06		Rp 20.992,89		Rp 21.061,71		Rp 21.061,71		
		PDRB Perkapita ADHK (Rp)	Rp 13.735,44	Rp 13.872,79		Rp 13.918,58		Rp 13.964,36		Rp 14.010,15		Rp 14.010,15		
	Sasaran 13 : Meningkatkan produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	1,64%	2,29%	7.688.722.216	3,69%	12.031.864.841	5,09%	14.271.624.198	6,49%	13.933.057.898	6,49%	17.128.183.298	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	4,62%	5,44%		5,69%		5,94%		6,19%		6,19%		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	2,67%	2,61%		2,71%		2,81%		2,91%		2,91%		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	10,93%	6,60%		6,80%		7,00%		7,20%		7,20%		
		Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	9.644	9.761		9.891		10.021		10.151		10.151		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang dibina	0,67%	0,67%	145.506.500	1%	218.259.750	1,20%	261.911.700	1,20%	261.911.700	1,20%	261.911.700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	70%	70%	1.135.473.826	70%	1.703.210.739	70%	2.043.852.887	70%	1.993.852.887	70%	1.993.852.887	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU	50%	50%	155.999.125	50%	233.998.687	50%	280.798.424	50%	275.798.424	50%	275.798.424	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	37.871.311	100%	56.806.966	100%	68.168.359	100%	68.168.359	100%	68.168.359	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Perdagangan	0%	0%	0	80%	14.418.200	80%	17.301.840	80%	17.301.840	80%	17.301.840	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat	1,05%	1,05%	905.267.000	1,20%	1.257.900.500	1,30%	1.409.480.600	1,40%	1.379.480.600	1,40%	1.379.480.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdata	30%	30%	46.330.000	45%	69.495.000	50%	83.394.000	50%	83.394.000	50%	83.394.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten	100%	100%	97.308.282	100%	145.962.423	100%	175.154.908	100%	170.154.908	100%	170.154.908	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	meningkatkan kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian	46,80%	46,80%	101.933.000	60%	152.899.500	65%	186.479.400	65%	186.479.400	65%	186.479.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi	50%	50%	11.560.000	50%	29.740.000	60%	35.688.000	60%	35.688.000	60%	35.688.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terawasinya kegiatan Perkoperasian di Kab. HSU	52,60%	52,60%	11.560.000	52,60%	17.475.000	52,60%	20.970.000	52,60%	20.970.000	52,60%	20.970.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.319,665 Ton	12326,48 Ton	157.400.000	12329,56 Ton	296.158.000	12332,64 Ton	396.900.000	12335,7 Ton	391.000.000	49324,41 Ton	1.241.458.000	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9.362,397 Ton	9809,78 Ton	301.700.000	9810,7 Ton	556.750.000	9811,74 Ton	592.250.000	9812,72 Ton	587.250.000	39245 Ton	2.037.950.000	Dinas Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Usaha Perikanan yang Diawasi	2 Kecamatan	2 Kecamatan	95.000.000	2 Kecamatan	116.000.000	2 Kecamatan	155.500.000	2 Kecamatan	146.000.000	2 Kecamatan	146.000.000	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	1%	1%	380.035.302	1,20%	611.856.836	1,20%	611.856.836	1,20%	611.856.836	1,20%	611.856.836	Dinas Pertanian

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,05%	0,50%	1.458.378.821	0,70%	1.796.569.058	0,70%	2.400.917.960	0,70%	2.330.251.660	0,70%	2.330.251.660	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,50%	2,50%	1.338.248.347	4%	2.497.723.414	5%	2.835.708.558	6%	2.678.208.558	6%	2.678.208.558	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85%	85%	100.887.585	85%	131.382.970	87%	131.382.970	88%	131.382.970	88%	131.382.970	Dinas Pertanian
		Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,26%	7,30%	177.164.341	8%	285.234.589	9%	345.972.135	10%	345.972.135	10%	345.972.135	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	90%	95%	217.731.795	95%	350.548.190	95%	355.199.842	95%	355.199.842	95%	355.199.842	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	10%	10%	267.718.306	10%	405.687.488	10%	480.094.236	10%	480.094.236	10%	480.094.236	Dinas Pertanian
		Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25%	25%	373.196.615	25%	626.185.538	25%	835.039.550	25%	835.039.550	25%	835.039.550	Dinas Pertanian
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	111.090 kg	117.755 Kg	153.967.400	121287 Kg	325.000.000	124925 Kg	415.000.000	128672 Kg	415.000.000	492639 Kg	1.308.967.400	Dinas Perikanan

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	100%	100%	18.484.660	100%	132.601.993	100%	132.601.993	100%	132.601.993	100%	132.601.993	Dinas Perikanan
	Sasaran 14 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	68,09	70,1	164.530.780	70,6	296.155.404	71,05	348.575.310	71,5	347.711.981	71,5	439.197.352	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	22,30%	22,30%	18.599.799	22,20%	33.479.638	33,30%	39.405.934	22,20%	38.990.302	100%	130.475.673	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersedian	60,35	62,72 Poin	145.930.981	63,72 Poin	262.675.766	64,22 Poin	309.169.376	64,72 Poin	308.721.679	64,72 Poin	308.721.679	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	82,3	83,6 Poin	136.239.496	84,2 Poin	231.590.643	84,7 Poin	272.582.377	85 Poin	270.126.538	85 Poin	270.126.538	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan desa rentan rawan pangan	-	6,45%	172.164.502	6,89%	309.896.104	7,41%	364.747.714	8%	368.030.443	8%	368.030.443	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	72,6	76,20%	25.582.139	77,30%	46.047.850	78,40%	54.198.320	80%	54.686.105	80%	54.686.105	Dinas Ketahanan Pangan
	Sasaran 15 : Meningkatnya sektor pariwisata	Jumlah wisatawan (orang)	79.934 orang	88.934 orang	268.501.581	97.934 orang	442.671.581	106.934 orang	538.585.581	115.934 orang	558.585.000	115.934 orang	558.585.000	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	90000 Orang	90000 Orang	35.268.160	100000 Orang	94.938.160	110000 Orang	130.938.160	125000 Orang	140.935.000	125000 Orang	140.935.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti	0 Even	0 Even	10.000.000	1 Even	25.000.000	2 Even	30.000.000	2 Even	30.000.000	2 Even	30.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya	5 Jenis	5 Jenis	223.233.421	5 Jenis	322.733.421	5 Jenis	377.647.421	5 Jenis	387.650.000	5 Jenis	387.650.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
	Sasaran 16 : Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,80%	4,50%	527.646.075	4,20%	808.952.875	3,90%	1.036.538.307	3,60%	1.036.538.307	3,60%	2.414.171.552	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	86,25	100%	90.000.000	100%	103.850.000,00	100%	134.906.322,00	100%	134.906.322,00	100%	134.906.322,00	Dinas Penanaman Modal, PTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan	100%	100%	64.086.750	100%	64.086.750	100%	68.585.950	100%	68.585.950	100%	68.585.950	Dinas Penanaman Modal, PTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan investasi yang dapat diikuti	100%	100%	27.000.000	100%	32.000.000	100%	64.000.000	100%	64.000.000	100%	64.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	indeks kepuasan masyarakat	77,50 poin	77,50 poin	57.780.000	80 poin	76.634.990	81 poin	95.550.250	82 poin	95.550.250	82 poin	95.550.250	Dinas Penanaman Modal, PTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	investasi yang direalisasikan	20 milyar	20 milyar	62.577.400	20 milyar	86.336.100	20 milyar	116.450.750	20 milyar	116.450.750	80 milyar	381.815.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	2%	2%	147.000.000	2%	320.912.660	2%	392.912.660	2%	392.912.660	8%	1.253.737.980	Dinas Penanaman Modal, PTSP
	Program Penempatan Tenaga Kerja	meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2%	2%	63.860.925	2%	81.791.375	2%	105.791.375	2%	105.791.375	8%	357.235.050	Dinas Penanaman Modal, PTSP

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Hubungan Industrial	meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan	4%	4%	15.341.000	4%	43.341.000	4%	58.341.000	4%	58.341.000	4%	58.341.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
	Tujuan 7 : Menurunnya angka kemiskinan	Persentase kemiskinan	6,83%	6,73%	6.274.095.864	6,63%	8.926.647.792	6,53%	9.425.255.253	6,43%	9.360.490.158	6,43%	9.360.490.158	
	Sasaran 17 : Penurunan Kemiskinan	Persentase kemiskinan (%)	6,83%	6,73%	6.274.095.864	6,63%	8.926.647.792	6,53%	9.425.255.253	6,43%	9.360.490.158	6,43%	9.360.490.158	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	4.250.495.000	100%	6.958.312.750	100%	7.094.517.613	100%	7.079.517.613	100%	7.079.517.613	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Mandiri	6,52%	6,52%	30.070.000	6,70%	31.573.500	6,89%	33.152.175	7,08%	34.775.000	7,08%	34.775.000	Dinas Sosial
		Persentase fakir miskin yang tertangani/teren taskan	9,22%	9,22%	1.587.043.503	9,64%	1.441.008.842	10,11%	1.714.067.565	10,60%	1.667.162.255	10,60%	1.667.162.255	Dinas Sosial
		Persentase peserta PKH yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	164.100.000	100%	238.305.000	100%	313.220.000	100%	303.220.000	100%	303.220.000	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100%	100%	192.412.500	100%	201.805.000	100%	211.872.900	100%	220.605.000	100%	220.605.000	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	100%	49.974.861	100%	55.642.700	100%	58.425.000	100%	55.210.290	100%	55.210.290	Dinas Sosial
	Tujuan 8 : Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	21 - 40 (sedang)	14.070.306.825	21 - 40 (sedang)	65.535.414.094	41 - 60 (cukup)	20.965.689.341	61 - 80 (baik)	20.910.111.681	61 - 80 (baik)	20.910.111.681	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Sasaran 18 : Meningkatkan akses pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	21 - 40 (sedang)	14.070.306.825	21 - 40 (sedang)	65.535.414.094	41 - 60 (cukup)	20.965.689.341	61 - 80 (baik)	20.910.111.681	61 - 80 (baik)	20.910.111.681	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses sistem penyediaan air minum	92,52%	94%	500.000.000	95%	500.000.000	96%	500.000.000	97%	500.000.000	97%	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program Pengembangan Permukiman	persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	68%	71.23 %	750.000.000	73.93 %	700.000.000	76.71 %	700.000.000	79.45 %	700.000.000	79.45 %	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100%	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	30%	30%	289.439.500	35%	289.639.500	40%	360.000.000	45%	360.000.000	45%	360.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase akses air limbah domestik	90,08%	91%	500.000.000	92%	500.000.000	93%	500.000.000	94%	500.000.000	94%	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5%	5%	250.000.000	10%	51.119.430.423	15%	5.922.626.585	20%	5.922.626.585	20%	5.922.626.585	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah unit persampahan yang tersedia	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	0	2 unit	0	2 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	0%	0%	0	0%	0	48%	0	55%	0	55%	0	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	5%	5.38 %	200.000.000	6.02 %	250.000.000	6.66 %	250.000.000	7.30 %	250.000.000	7.30 %	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	96%	96%	79.040.605	97%	204.040.605	99%	204.040.605	100%	204.040.605	100%	204.040.605	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35%	35,29%	1.500.000.000	35,51%	1.905.440.000	35,73%	2.000.000.000	35,95%	1.944.422.340	35,95%	1.944.422.340	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	10%	10%	140.812.500	10%	140.812.500	10%	150.000.000	10%	150.000.000	10%	150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51,242%	51,303%	3.258.804.154	51,395%	4.278.843.000	51,492%	4.622.626.585	51,599%	4.622.626.585	51,599%	4.622.626.585	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Terselenggaranya a Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	93%	93%	6.443.397.566	95%	5.488.395.566	97%	5.588.395.566	100%	5.588.395.566	100%	5.588.395.566	Dinas Perhubungan
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	0%	1%	140.812.500	1%	140.812.500	1%	150.000.000	1%	150.000.000	1%	150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Tujuan 9 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	67,7	6.092.812.660	67,96	6.139.997.805	67,97	7.192.788.623	67,98	7.115.147.198	67,98	7.115.147.198	
	Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,04	67,7	5.592.812.660	67,96	5.639.997.805	67,97	6.692.788.623	67,98	6.615.147.198	67,98	6.615.147.198	
		Indeks Kualitas Air	55 (cemar ringan)	56 (cemar ringan)		57 (cemar ringan)		59 (cemar ringan)		60 (cemar ringan)		60 (cemar ringan)		
		Indeks Kualitas Udara	89,4 (baik)	89,5 (baik)		89,6 (baik)		89,7 (baik)		89,8 (baik)		89,8 (baik)		

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	223.668.250	100%	223.668.250	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	8.350.000	100%	8.350.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	100%	100%	876.374.535	100%	876.374.535	100%	1.112.788.623	100%	1.035.147.198	100%	1.035.147.198	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	8.921.125	100%	8.921.125	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100%	100%	38.640.000	100%	38.640.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	5%	5%	49.853.500	5%	49.853.500	5%	55.000.000	5%	55.000.000	5%	55.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	100%	100%	91.800.000	100%	91.800.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0,10%	0,10%	4.287.705.250	0,10%	4.334.890.395	0,10%	5.040.000.000	0,10%	5.040.000.000	0,10%	5.040.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		Sasaran 20 : Meningkatkan Kesesuaian peruntukan lahan	Tertib Penataan Ruang	NA	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertib Tata Ruang	90%	90%	370.000.000	90%	370.000.000	90%	370.000.000	90%	370.000.000	90%	370.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	70%	70%	92.000.000	75%	92.000.000	80%	92.000.000	85%	92.000.000	85%	92.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Tujuan 10 : Meningkatkan Kapasitas	Indeks Risiko Bencana	128,4 (Sedang)	128,4 (Sedang)	790.614.500	128,3 (Sedang)	1.340.855.286	128,3 (Sedang)	1.404.716.300	128,3 (Sedang)	1.420.332.813	128,3 (Sedang)	1.420.332.813	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Sasaran 21 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,25 (Rendah)	0,30 (Rendah)	790.614.500	0,35 (Rendah)	1.340.855.286	0,38 (Rendah)	1.404.716.300	0,40 (sedang)	1.420.332.813	0,40 (sedang)	1.420.332.813	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100%	100%	633.949.500	100%	1.133.126.686	100%	1.144.616.300	100%	1.151.332.813	100%	1.151.332.813	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	156.665.000	100%	207.728.600	100%	260.100.000	100%	269.000.000	100%	269.000.000	Dinas Sosial

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 atau merupakan pelaksanaan tahapan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kerja pimpinan daerah dimasa transisi pemerintahan daerah tahun 2023 – 2026.

7.1. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program Kabupaten Hulu Sungai Utara berisi program-program perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program yang dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Program perangkat daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Secara lengkap Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		URUSAN RUTIN PEMERINTAH DAERAH					637.452.907.296		653.997.609.381		672.189.138.384		675.278.796.898		675.278.796.898	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	637.377.907.296	100%	653.922.609.381	100%	672.114.138.384	100%	675.203.796.898	100%	Semua SKPD
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					7.782.483.835		11.998.331.488		14.210.031.536		14.083.742.316		14.083.742.316	
		1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	7,75	8,03	7.602.000.085	8,17	11.769.411.488	8,31	13.891.441.286	8,45	13.765.152.066	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Sertifikat Pendidik	74,27%	76,00%	180.483.750	78,00%	228.920.000	80,00%	318.590.250	82,00%	318.590.250	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					51.145.484.634		56.622.349.092		59.041.624.347		58.876.533.357		58.876.533.357	
		1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	48.695.663.652	100%	52.539.821.796	100%	54.255.941.501	100%	54.137.832.086	Dinas Kesehatan
					Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	100%	100%	696.000.000	100%	1.147.309.127	100%	1.351.477.589	100%	1.338.838.067	100%	Dinas Kesehatan
		1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	1.452.723.332	100%	2.448.945.464	100%	2.865.266.192	100%	2.836.613.530	Dinas Kesehatan
		1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100%	100%	74.333.025,00	100%	120.047.835,38	100%	140.455.967	100%	139.051.408	Dinas Kesehatan
		1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	226.764.625,00	100%	366.224.869,38	100%	428.483.097,17	100%	424.198.266	Dinas Kesehatan
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					7.328.804.154		59.623.713.423		14.865.253.170		14.809.675.510		14.809.675.510	
		1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	35%	35,29%	1.500.000.000	35,51%	1.905.440.000	35,73%	2.000.000.000	35,95%	1.944.422.340	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses sistem penyediaan air minum	92,52%	94%	500.000.000	95%	500.000.000	96%	500.000.000	97%	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah unit persampahan yang tersedia	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	0	2 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase akses air limbah domestik	90,08%	91%	500.000.000	92%	500.000.000	93%	500.000.000	94%	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	0%	0%	0	0%	0	48%	0	55%	0	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	persentase jaringan jalan permukiman dalam kondisi baik	68%	71.23 %	750.000.000	73.93 %	700.000.000	76.71 %	700.000.000	79.45 %	700.000.000	79.45 %	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase bangunan berizin yang laik fungsi	5%	5%	250.000.000	10%	51.119.430.423	15%	5.922.626.585	20%	5.922.626.585	20%	5.922.626.585	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	51%	51%	3.258.804.154	51395%	4.278.843.000	51492%	4.622.626.585	51599%	4.622.626.585	51599%	4.622.626.585	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	5%	5.38 %	200.000.000	6.02 %	250.000.000	6.66 %	250.000.000	7.30 %	250.000.000	7.30 %	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertib Tata Ruang	90%	90%	370.000.000	90%	370.000.000	90%	370.000.000	90%	370.000.000	90%	370.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							589.064.500		589.264.500		678.000.000		678.000.000		678.000.000	
		1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100%	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	10%	10%	140.812.500	10%	140.812.500	10%	150.000.000	10%	150.000.000	10%	150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	0%	1%	140.812.500	1%	140.812.500	1%	150.000.000	1%	150.000.000	1%	150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	30%	30%	289.439.500	35%	289.639.500	40%	360.000.000	45%	360.000.000	45%	360.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							1.746.799.500		2.724.831.686		3.031.014.550		3.037.731.063		3.037.731.063	
		1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	100%	927.504.000	100%	1.320.755.200	100%	1.554.805.980	100%	1.554.805.980	100%	1.554.805.980	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	100%	100%	633.949.500	100%	1.133.126.686	100%	1.144.616.300	100%	1.151.332.813	100%	1.151.332.813	Badan Penangulangan Bencana Daerah
		1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota	100%	100%	185.346.000	100%	270.949.800	100%	331.592.270	100%	331.592.270	100%	331.592.270	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							6.430.760.864		9.134.376.392		9.685.355.253		9.629.490.158		9.629.490.158	
		1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten	100%	100%	192.412.500	100%	201.805.000	100%	211.872.900	100%	220.605.000	100%	220.605.000	Dinas Sosial

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab																																																										
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD																																																									
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																																																								
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					17					18					19				
				1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	4.250.495.000	100%	6.958.312.750	100%	7.094.517.613	100%	7.079.517.613	100%	7.079.517.613	Dinas Sosial																																																						
				1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Mandiri	6,52%	6,52%	30.070.000	6,70%	31.573.500	6,89%	33.152.175	7,08%	34.775.000	7,08%	34.775.000	Dinas Sosial																																																						
								Persentase fakir miskin yang tertangani/terentaskan	9,22%	9,22%	1.587.043.503	9,64%	1.441.008.842	10,11%	1.714.067.565	10,60%	1.667.162.255	10,60%	1.667.162.255	Dinas Sosial																																																						
								Persentase peserta PKH yang terpenuhi kebutuhan	100%	100%	164.100.000	100%	238.305.000	100%	313.220.000	100%	303.220.000	100%	303.220.000	Dinas Sosial																																																						
				1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	156.665.000	100%	207.728.600	100%	260.100.000	100%	269.000.000	100%	269.000.000	Dinas Sosial																																																						
				1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	100%	49.974.861	100%	55.642.700	100%	58.425.000	100%	55.210.290	100%	55.210.290	Dinas Sosial																																																						
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							226.201.925		446.045.035		557.045.035		557.045.035		1.669.314.030																																																									
				2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	2%	2%	147.000.000	2%	320.912.660	2%	392.912.660	2%	392.912.660	8%	1.253.737.980	Dinas Penanaman Modal, PTSP																																																						
				2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2%	2%	63.860.925	2%	81.791.375	2%	105.791.375	2%	105.791.375	8%	357.235.050	Dinas Penanaman Modal, PTSP																																																						
				2	07	05	Program Hubungan Industrial	meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan	4%	4%	15.341.000	4%	43.341.000	4%	58.341.000	4%	58.341.000	4%	58.341.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP																																																						
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							735.583.930		1.232.207.662		1.451.459.566		1.437.849.795		1.437.849.795																																																									
				2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19	75 APE %	75 APE %	79.134.635	75 APE %	183.020.887	75 APE %	215.586.565	75 APE %	213.565.094	75 APE %	213.565.094	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak																																																						
				2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani	100%	100%	102.785.331	100%	190.098.529	100%	223.923.562	100%	221.823.918	100%	221.823.918	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan																																																						
				2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19	100%	100%	214.926.995	100%	309.483.803	100%	364.551.560	100%	361.133.302	100%	361.133.302	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak																																																						
				2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak	100%	100%	22.175.526	100%	29.574.324	100%	34.836.608	100%	34.509.958	100%	34.509.958	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan																																																						
				2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	70%	70%	203.219.213	70%	334.967.934	70%	394.570.191	70%	390.870.460	70%	390.870.460	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan																																																						
				2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak	100%	100%	113.342.230	100%	185.062.185	100%	217.991.080	100%	215.947.063	100%	215.947.063	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak																																																						
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							498.516.917		883.690.001		1.040.103.721		1.040.555.067		1.132.040.438																																																									
				2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat		22,30%	18.599.799	22,20%	33.479.638	33,30%	39.405.934	22,20%	38.990.302	100%	130.475.673	Dinas Ketahanan Pangan																																																						

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19				
			03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersedian	60,35	62,72 Poin	145.930.981	63,72 Poin	262.675.766	64,22 Poin	309.169.376	64,72 Poin	308.721.679	64,72 Poin	308.721.679	Dinas Ketahanan Pangan	
					Skor PPH Konsumsi	82,3	83,6 Poin	136.239.496	84,2 Poin	231.590.643	84,7 Poin	272.582.377	85 Poin	270.126.538	85 Poin	270.126.538	Dinas Ketahanan Pangan	
		2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan desa rentan rawan pangan	-	6,45%	172.164.502	6,89%	309.896.104	7,41%	364.747.714	8%	368.030.443	8%	368.030.443	Dinas Ketahanan Pangan
		2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	72,6	76,20%	25.582.139	77,30%	46.047.850	78,40%	54.198.320	80%	54.686.105	80%	54.686.105	Dinas Ketahanan Pangan
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
		2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		2	10	06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	70%	70%	92.000.000	75%	92.000.000	80%	92.000.000	85%	92.000.000	85%	92.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.592.812.660		5.639.997.805		6.692.788.623		6.615.147.198		6.615.147.198		
		2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	8.350.000	100%	8.350.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	223.668.250	100%	223.668.250	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	100%	100%	876.374.535	100%	876.374.535	100%	1.112.788.623	100%	1.035.147.198	100%	1.035.147.198	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	8.921.125	100%	8.921.125	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100%	100%	38.640.000	100%	38.640.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan	5%	5%	49.853.500	5%	49.853.500	5%	55.000.000	5%	55.000.000	5%	55.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH
		2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	100%	100%	91.800.000	100%	91.800.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19				
		2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & LH		
		2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan persentase sampah yang dikelola	0,10%	0,10%	4.287.705.250	0,10%	4.334.890.395	0,10%	5.040.000.000	0,10%	5.040.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & LH		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						666.325.000	740.350.000	872.650.000	868.375.000	868.375.000						
		2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	7.500.000	100%	74.875.000	100%	116.125.000	100%	116.125.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						Persentase Kepemilikan KTP elektronik	99,82%	100%	59.875.000	100%	59.875.000	100%	128.250.000	100%	128.250.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	53,97%	94%	45.000.000	95,50%	45.000.000	97,50%	53.000.000	100%	59.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	550.200.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	100%	100%	3.750.000	100%	50.600.000	100%	65.275.000	100%	55.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2.846.205.008	3.584.000.000	4.000.612.000	3.874.000.000	3.874.000.000						
		2	13	03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase lembaga kerjasama antara desa yang aktif	100%	100%	11.362.500	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	90.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa		
		2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki Bumdes yang aktif	100%	100%	88.071.700	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa		
						Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes,Laporan BPD dan Epdeskel	100%	100%	2.076.950.000	100%	2.100.000.000	100%	2.356.612.000	100%	2.170.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa		
						Persentase desa yang telah mempunyai Perdes kewenangan desa dan Penetapan Batas Desa	100%	100%	13.300.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa		
						Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa	100%	100%	192.025.000	100%	345.000.000	100%	390.000.000	100%	380.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa		
		2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap	100%	100%	332.313.488	100%	614.000.000	100%	744.000.000	100%	734.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa		
						Persentase Desa yang mempunyai Posyantekdes	100%	100%	132.182.320	100%	165.000.000	100%	190.000.000	100%	180.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19			
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			770.484.500		1.291.025.048		1.533.125.456		1.518.137.669		1.518.137.669				
	2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	13 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	49.244.250	22 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	97.180.000	25 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	133.980.902	28 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	138.974.973	28 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) buah	138.974.973	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	37,5%	65%	100.337.000	75%	225.914.766	85%	269.814.000	90%	259.824.000	90%	259.824.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Jumlah Peserta KB Baru / PB Berencana (Kb)	5.036 Akseptor	5086 Akseptor	449.460.000	5137 Akseptor	622.973.516	5188 Akseptor	703.673.652	5240 Akseptor	698.677.723	5240 Akseptor	698.677.723	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	NA Indeks Skala 0-100	65,00 Indeks Skala 0-100	171.443.250	66,00 Indeks Skala 0-100	344.956.766	67,00 Indeks Skala 0-100	425.656.902	68,00 Indeks Skala 0-100	420.660.973	68,00 Indeks Skala 0-100	420.660.973	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			6.522.438.171		5.692.436.171		5.792.436.171		5.792.436.171		5.792.436.171		5.792.436.171		
	2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	90%	93%	6.443.397.566	95%	5.488.395.566	97%	5.588.395.566	100%	5.588.395.566	100%	5.588.395.566	Dinas Perhubungan
	2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik	95%	96%	79.040.605	97%	204.040.605	99%	204.040.605	100%	204.040.605	100%	204.040.605	Dinas Perhubungan
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.890.068.072		3.088.334.241		3.613.349.861		3.580.830.902		3.580.830.902		3.580.830.902		
	2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	80%	85%	1.539.377.250	90%	2.509.694.385	95%	2.936.341.230	100%	2.909.915.349	100%	2.909.915.349	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	60%	85%	350.690.822	90%	578.639.856	95%	677.008.631	100%	670.915.553	100%	670.915.553	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			270.559.500		418.374.250		505.049.100		505.049.100		505.049.100		505.049.100		
	2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terawasinya kegiatan Perkoperasian di Kab. HSU	52,60%	52,60%	11.560.000	52,60%	17.475.000	52,60%	20.970.000	52,60%	20.970.000	52,60%	20.970.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi	50%	50%	11.560.000	50%	29.740.000	60%	35.688.000	60%	35.688.000	60%	35.688.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2	17	05	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	meningkatkan kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian	46,80%	46,80%	101.933.000	60%	152.899.500	65%	186.479.400	65%	186.479.400	65%	186.479.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang dibina	0,67%	0,67%	145.506.500	1%	218.259.750	1,20%	261.911.700	1,20%	261.911.700	1,20%	261.911.700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							301.444.150		362.907.840		479.493.272		479.493.272		744.857.522	
		2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan	100%	100%	64.086.750	100%	64.086.750	100%	68.585.950	100%	68.585.950	100%	68.585.950	Dinas Penanaman Modal, PTSP
		2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan investasi yang dapat diikuti	100%	100%	27.000.000	100%	32.000.000	100%	64.000.000	100%	64.000.000	100%	64.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
		2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	indeks kepuasan masyarakat	77,50 poin	77,50 poin	57.780.000	80 poin	76.634.990	81 poin	95.550.250	82 poin	95.550.250	82 poin	95.550.250	Dinas Penanaman Modal, PTSP
		2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	investasi yang direalisasikan	20 milyar	20 milyar	62.577.400	20 milyar	86.336.100	20 milyar	116.450.750	20 milyar	116.450.750	80 milyar	381.815.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
		2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi	86,25	100%	90.000.000,00	100%	103.850.000,00	100%	134.906.322,00	100%	134.906.322,00	100%	134.906.322,00	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							2.740.525.325		4.665.000.000		5.342.400.000		5.342.400.000		5.342.400.000	
		2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65%	70%	413.028.125	75%	735.000.000	80%	843.500.000	85%	843.500.000	85%	843.500.000	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
		2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi	13 Peringkat	9 Peringkat	2.252.497.200	8 Peringkat	3.780.000.000	7 Peringkat	4.298.900.000	6 Peringkat	4.298.900.000	6 Peringkat	4.298.900.000	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
		2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan	100%	100%	75.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							64.249.950		136.289.918		159.459.204		158.024.071		158.024.071	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral	60%	85%	64.249.950	90%	136.289.918	95%	159.459.204	100%	158.024.071	100%	158.024.071	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							106.413.125		179.709.317		243.192.099		239.283.620		239.283.620	
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85%	85%	106.413.125	90%	179.709.317	95%	243.192.099	100%	239.283.620	100%	239.283.620	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							395.165.260		395.165.260		395.165.260		395.165.260		395.165.260	
		2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	100%	100%	386.165.880	100%	386.165.880	100%	386.165.880	100%	386.165.880	100%	386.165.880	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	100%	8.999.380	100%	8.999.380	100%	8.999.380	100%	8.999.380	100%	8.999.380	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							200.000.000		420.000.000		520.000.000		500.000.000		500.000.000	
		2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00 Nilai	12,00 Nilai	195.000.000	12,50 Nilai	410.000.000	13,00 Nilai	510.000.000	13,50 Nilai	485.000.000	13,50 Nilai	485.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1		2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	1 naskah (358 Judul)	1 naskah (358 Judul)	5.000.000	1 naskah (362 Judul)	10.000.000	1 naskah (367 Judul)	10.000.000	1 naskah (373 Judul)	15.000.000	1 naskah (373 Judul)	15.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							225.000.000		560.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
		2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90,50%	90,50%	225.000.000	91%	430.000.000	91,50%	400.000.000	92%	400.000.000	92%	400.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	25%	25%	0	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	Dinas Perpustakaan	
		2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Arsip yang digunakan/diakses	NA %	NA %	-	35%	30.000.000	35%	50.000.000	35%	50.000.000	35%	50.000.000	Dinas Perpustakaan	
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							708.067.400		1.293.908.000		1.559.650.000		1.539.250.000		4.734.375.400		
		3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.319,665 Ton	12326,48 Ton	157.400.000	12329,56 Ton	296.158.000	12332,64 Ton	396.900.000	12335,7 Ton	391.000.000	49324,41 Ton	1.241.458.000	Dinas Perikanan	
		3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9.362,397 Ton	9809,78 Ton	301.700.000	9810,7 Ton	556.750.000	9811,74 Ton	592.250.000	9812,72 Ton	587.250.000	39245 Ton	2.037.950.000	Dinas Perikanan	
		3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Usaha Perikanan yang Diawasi	2 Kecamatan	2 Kecamatan	95.000.000	2 Kecamatan	116.000.000	2 Kecamatan	155.500.000	2 Kecamatan	146.000.000	2 Kecamatan	146.000.000	Dinas Perikanan	
		3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	111.090 kg	117.755 Kg	153.967.400	121287 Kg	325.000.000	124925 Kg	415.000.000	128672 Kg	415.000.000	492639 Kg	1.308.967.400	Dinas Perikanan	
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							268.501.581		442.671.581		538.585.581		558.585.000		558.585.000		
		3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah		90000 Orang	35.268.160	100000 Orang	94.938.160	110000 Orang	130.938.160	125000 Orang	140.935.000	125000 Orang	140.935.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	
		3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya	5 Jenis	5 Jenis	223.233.421	5 Jenis	322.733.421	5 Jenis	377.647.421	5 Jenis	387.650.000	5 Jenis	387.650.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	
		3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti	0 Even	0 Even	10.000.000	1 Even	25.000.000	2 Even	30.000.000	2 Even	30.000.000	2 Even	30.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4.331.845.772		6.837.790.076		8.128.774.080		7.900.607.780		7.900.607.780		
		3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	1%	1%	380.035.302	1,20%	611.856.836	1,20%	611.856.836	1,20%	611.856.836	1,20%	611.856.836	Dinas Pertanian	
						Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,05%	0,50%	1.458.378.821	0,70%	1.796.569.058	0,70%	2.400.917.960	0,70%	2.330.251.660	0,70%	2.330.251.660	Dinas Pertanian	
		3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	2,50%	2,50%	1.338.248.347	4%	2.497.723.414	5%	2.835.708.558	6%	2.678.208.558	6%	2.678.208.558	Dinas Pertanian	
		3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	85%	85%	100.887.585	85%	131.382.970	87%	131.382.970	88%	131.382.970	88%	131.382.970	Dinas Pertanian	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19		
							Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	7,26%	7,30%	177.164.341	8%	285.234.589	9%	345.972.135	10%	345.972.135	10%	345.972.135	Dinas Pertanian		
		3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	90%	95%	217.731.795	95%	350.548.190	95%	355.199.842	95%	355.199.842	95%	355.199.842	95%	355.199.842	Dinas Pertanian	
		3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	100%	100%	18.484.660	100%	132.601.993	100%	132.601.993	100%	132.601.993	100%	132.601.993	100%	132.601.993	Dinas Perikanan	
		3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	10%	10%	267.718.306	10%	405.687.488	10%	480.094.236	10%	480.094.236	10%	480.094.236	10%	480.094.236	Dinas Pertanian	
						Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	25%	25%	373.196.615	25%	626.185.538	25%	835.039.550	25%	835.039.550	25%	835.039.550	25%	835.039.550	Dinas Pertanian	
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1.426.652.544		2.154.397.015		2.585.276.418		2.525.276.418		2.525.276.418			
		3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Perdagangan	0%	0%	0	80%	14.418.200	80%	17.301.840	80%	17.301.840	80%	17.301.840	80%	17.301.840	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kenyamanan penjual dan pembeli	70%	70%	1.135.473.826	70%	1.703.210.739	70%	2.043.852.887	70%	1.993.852.887	70%	1.993.852.887	70%	1.993.852.887	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		3	30	04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	37.871.311	100%	56.806.966	100%	68.168.359	100%	68.168.359	100%	68.168.359	100%	68.168.359	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU	50%	50%	155.999.125	50%	233.998.687	50%	280.798.424	50%	275.798.424	50%	275.798.424	50%	275.798.424	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten Negeri	100%	100%	97.308.282	100%	145.962.423	100%	175.154.908	100%	170.154.908	100%	170.154.908	100%	170.154.908	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								951.597.000		1.327.395.500		1.492.874.600		1.462.874.600		1.462.874.600			
		3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat	1,05%	1,05%	905.267.000	1,20%	1.257.900.500	1,30%	1.409.480.600	1,40%	1.379.480.600	1,40%	1.379.480.600	1,40%	1.379.480.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdata	30%	30%	46.330.000	45%	69.495.000	50%	83.394.000	50%	83.394.000	50%	83.394.000	50%	83.394.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19						
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						11.646.780.000		13.071.949.500		14.497.423.237		14.762.358.818		14.762.358.818				
		4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah	100%	100%	10.086.780.000	100%	10.338.949.500	100%	10.597.423.237	100%	10.862.358.818	100%	10.862.358.818	Sekretariat Daerah		
		4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	1.560.000.000	100%	2.733.000.000	100%	3.900.000.000	100%	3.900.000.000	100%	3.900.000.000	Sekretariat Daerah		
4	02	SEKRETARIAT DPRD						6.180.562.500		10.012.111.250		11.804.874.375		11.681.263.125		11.681.263.125				
		4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	6.180.562.500	100%	10.012.111.250	100%	11.804.874.375	100%	11.681.263.125	100%	11.681.263.125	Sekretariat Dewan		
5	01	PERENCANAAN						1.733.550.000		2.475.807.800		2.293.610.928		2.307.115.924		2.307.115.924				
		5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase SKPD dengan capaian kinerja tinggi	100%	100%	858.000.000	100%	1.491.500.000	100%	1.260.000.000	100%	1.226.000.000	100%	1.226.000.000	Bappedalitbang		
		5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPIPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100%	100%	875.550.000	100%	984.307.800	100%	1.033.610.928	100%	1.081.115.924	100%	1.081.115.924	Bappedalitbang		
5	02	KEUANGAN						249.678.837.792		250.586.872.090		251.005.291.774		251.005.291.774		251.005.291.774				
		5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel	90%	90%	248.622.939.313	90%	249.003.735.601	90%	249.317.342.076	90%	249.317.342.076	90%	249.317.342.076	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
		5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	85%	85%	547.521.979	85%	643.188.979	85%	722.999.688	85%	722.999.688	85%	722.999.688	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
		5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi/Jumlah PAD		12.051.239.751	508.376.500	123.882.008.347,270	939.947.510	125.740.238.472,470	964.950.010	127.626.342.049,560	964.950.010	127.626.342.049,560	964.950.010	Bapenda		
5	03	KEPEGAWAIAN						1.547.945.861		2.161.673.839		2.696.071.124		2.620.038.475		2.620.038.475				
		5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN	85%	85%	1.547.945.861	87%	2.161.673.839	90%	2.696.071.124	95%	2.620.038.475	95%	2.620.038.475	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						414.270.000		760.000.000		825.000.000		790.000.000		790.000.000				
		5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	85%	85%	414.270.000	87%	760.000.000	90%	825.000.000	95%	790.000.000	95%	790.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						903.680.625		1.190.000.000		1.200.000.000		1.225.000.000		1.225.000.000				
		5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian	100%	100%	903.680.625	100%	1.190.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.225.000.000	100%	1.225.000.000	Bappedalitbang		
6	01	INSPEKTORAT DAERAH						5.560.260.000		6.612.206.726		6.851.715.103		6.986.391.476		6.986.391.476				
		6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Progres tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)	80%	80%	4.666.750.000	85%	5.357.652.000	85%	5.464.805.040	90%	5.574.101.141	90%	5.574.101.141	Inspektorat		
		6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase cakupan pengendalian intern pemerintah	100%	100%	893.510.000	100%	1.254.554.726	100%	1.386.910.063	100%	1.412.290.335	100%	1.412.290.335	Inspektorat		
7	01	KECAMATAN						1.629.834.293		1.946.110.680		1.865.194.451		1.878.930.805		1.878.930.805				

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	100%	100%	392.692.500	100%	446.912.500	100%	445.956.500	100%	455.912.500	100%	455.912.500	Semua Kecamatan
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	1.077.524.937	100%	1.065.214.938	100%	1.089.214.938	100%	1.083.714.938	100%	1.083.714.938	Semua Kecamatan
		7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Banjang)	100%	100%	5.000.000	100%	213.512.798	100%	48.075.000	100%	48.075.000	100%	48.075.000	Semua Kecamatan
		7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Pandan)	0%	0%	0	100%	7.250.000	100%	18.250.000	100%	18.250.000	100%	18.250.000	Kec. Sungai Pandan, Kec. Paminggir, Kec. Sungai Tabukan
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	154.616.856	100%	213.220.444	100%	263.698.013	100%	272.978.367	100%	272.978.367	Semua Kecamatan
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							1.265.630.000		1.555.845.000		1.707.760.000		1.701.460.000		1.701.460.000	
		8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	70%	70%	132.750.000	70%	176.415.000	100%	213.460.000	100%	213.460.000	100%	213.460.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	70%	70%	1.017.435.000	70%	1.217.665.000	100%	1.242.780.000	100%	1.242.780.000	100%	1.242.780.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	80%	80%	10.475.000	80%	5.475.000	100%	20.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Indeks Ketahanan Nasional	100%	100%	37.615.000	100%	37.615.000	100%	75.230.000	100%	74.710.000	100%	74.710.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional	100%	100%	67.355.000	100%	118.675.000	100%	156.290.000	100%	155.510.000	100%	155.510.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH									1.024.906.313.644		1.126.984.747.567		1.116.630.848.279		1.118.922.205.657		1.123.586.449.673	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pimpinan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah juga merupakan tolok ukur untuk melihat capaian pembangunan yang dilaksanakan selama tahun perencanaan sesuai dengan masa bhakti pimpinan daerah bersama-sama dengan segenap pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama yang diambil dari indikator sasaran strategis RPD 2023 – 2026 :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH (IKU)	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				TARGET KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,23	4,05	5,05	6,05	6,05	6,05
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,83	6,73	6,63	6,53	6,43	6,43
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,60
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,12	66,88	67,26	67,64	68,02	68,02
5	Indeks Reformasi Birokrasi	54,04 (CC)*	55 (CC)	60 (B)	65 (B)	70 (B)	70 (B)
6	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	20.648,74	20.751,98	20.855,23	20.958,47	21.061,71	21.061,71

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH (IKU)	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				TARGET KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
7	Pengeluaran Perkapita (Rp)	9.644,00	9.761,00	9.891,00	10.021,00	10.151,00	10.151,00
8	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	NA	21 - 40 (sedang)	21 - 40 (sedang)	41 - 60 (cukup)	61 - 80 (baik)	61 - 80 (baik)
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	65,46	65,87	66,67	67,08	67,08

Kinerja pemerintah daerah selain indikator kinerja utama di atas, juga meliputi berbagai indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi indikator-indikator berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Indikator-indikator yang didasarkan atas ketiga aspek ini dapat dilihat pada bagian berikut ini :

Tabel. 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A	Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB	-0,67	4,05	5,05	6,05	6,05	6,05
2	PDRB per kapita-ADHB (ribu rupiah)	20.648,74	20.648,74	20.648,74	20.648,74	20.648,74	21.061,71
3	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	93,17	93,27	93,37	93,47	93,57	93,57
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,12	66,88	67,26	67,64	68,02	68,02
B	Kesejahteraan Sosial						
1	Harapan Lama Sekolah	12,92	13,36	13,58	13,80	14,02	14,02
2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,75	8,03	8,17	8,31	8,45	8,45
3	Angka usia harapan hidup	64,10	64,68	64,97	65,26	65,55	65,55
4	Persentase balita gizi buruk (wasting)	11,06	11	10,70	10,4	10,1	9,8
5	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting)	19,63	19,3	19	18,7	18,4	18,1
6	Tingkat pengangguran terbuka	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,60

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,94	79	80	81	82	82
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	104.881.802.914.604	112.747.938.133.199	121.204.033.493.189	130.294.336.005.178	140.066.411.205.567	140.066.411.205.567
9	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Skor Pola Pangan Harapan						
	a.Tingkat Ketersediaan	60,35	62,72	63,72	64,22	64,72	64,72
	b.Tingkat Konsumsi	83,0	83,6	84,2	84,7	85,0	85,0
11	Persentase cadangan pangan	4,05	10	10	10	10	40
	Penanganan daerah rawan pangan	-	10	10	10	10	40
12	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	(0,0)	2,29	3,69	5,09	6,49	6,49
13	Produksi sub sektor tanaman pangan						
	-Padi (ton)	105066	110076,006	110495	111034	113601,6	113601,6
	-Kacang Tanah	209	494,214	508,326	520,429	532,532	533
	- Jagung	1862	526,225	558,72	576,18	593,64	594
14	Produksi sub sektor peternakan						
	- Daging Ternak Besar	338.534	371.758	386.644	401.751	416.639	416.639
	- Daging Ternak Unggas	2184551	2.558.380	2.791.681	3.024.982	3.258.282	3.258.282
	- Telur Unggas	6719807	7.032.737	7.149.794	7.267.227	7.385.034	7.385.034
15	Produksi sub sektor perikanan	21.682,06	22.132,20	22.136,26	22.140,26	22.144,38	22.148,45

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
16	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	(4,8)	5,44	5,69	5,94	6,19	6,19
17	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	(2,8)	2,61	2,71	2,81	2,91	2,91
18	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	8,90	1,02	1,02	1,02	1,02	5,10
II	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	<u>PELAYANAN URUSAN WAJIB</u>						
A	Terkait Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58,96	60	62	64	66	66
	Angka partisipasi kasar						
	a. SD/MI	105,4	100	100	100	100	100
	b. SMP/MTs	82,10	84,10	85,10	86,10	87,10	87,10
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan						
	a. SD/MI	32,51	39,01	39,76	40,51	41,26	41,26
	b. SMP/MTs	12,92	15,63	16,38	17,13	17,88	17,88
1.3	Angka Partisipasi Murni						
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,86	100	100	100	100	100
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75,47	76,05	76,34	76,63	76,92	76,92

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.4	Angka partisipasi sekolah						
	a. 7-12 tahun	99,20	100	100	100	100	100
	b. 13-15 tahun	93,29	94,57	95,21	95,85	96,49	96,49
1.5	Angka Putus Sekolah						
	a. SD/MI	0,13	0,120	0,115	0,110	0,105	0,105
	b. SMP/MTs	0,46	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30
	Angka Melanjutkan (AM)						
	a. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,10	97,50	97,70	97,90	98,10	98,10
	b. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,26	98,66	98,86	99,06	99,26	99,26
1.6	Fasilitas Pendidikan						
	a. Ruang Kelas SD kondisi baik	40,25	41,00	42,00	43,00	44,00	44,00
	b. Ruang Kelas SMP kondisi baik	29,79	30,00	31,00	32,00	33,00	33,00
1.7	Rasio guru/murid SD/MI	13,32	14,07	14,82	15,57	16,32	16,32
1.8	Rasio guru/murid SMP/MTs	12,08	12,83	13,58	14,33	15,08	15,08
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	16	15	14	13	12	11
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rp19	Rp18	Rp17	Rp16	Rp15	Rp14

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	12	11	10	9	8	7
2.5	jumlah Kematian Ibu (orang)	12	9	8	6	5	4
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	45	45	45	45	45	45
2.7	Rasio puskesmas	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2.8	Rasio Pustu	0,08	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.10	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	0,07	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	1527/185,14%	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF)	3655/92,86 %	95	96	97	98	100
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	151/68,9%	95	96	97	98	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
2.15	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap	3514/76,5%	95	96	97	98	100
2.16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33,98%	40%	45%	50%	55%	55%
2.17	Angka Konversi TB	88,41%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
2.18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
2.19	Angka Kesembuhan Pengobatan TB	91,70%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%
2.20	Persentase kasus HIV yang ditemukan dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22	Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23	Tingkat kematian akibat malaria	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
2.25	Cakupan kunjungan bayi	2267/64,5%	66	68	70	71	72
2.26	Cakupan puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.27	Cakupan pembantu puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	3420/82,93 %	85	86	87	88	90
2.29	Cakupan pelayanan nifas	3454/87,75 %	89	90	92	94	95
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	364/64,7%	65	66	67	68	70
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	8891/57,22%	59	60	61	62	63
2.32	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Pekerjaan Umum:						
3.1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	51.242	51.303	51.395	51.492	51.599	51.599
3.2	Penduduk yang memiliki sanitasi layak (%)	90,08	91	92	93	94	94
3.3	Rasio Jaringan Irigasi	35,07	35,29	35,51	35,73	35,96	35,96
3.4	Persentase penduduk berakses air bersih	92,52	94	95	96	97	97
	Penataan Ruang :						
3.1	Persentase peruntukan lahan yang sesuai RTRW	76,93	77,00	78,00	85,00	90,00	90,00
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Pengurangan kawasan Kumuh Perkotaan (%)	60,2 Ha	10	10	10	10	10
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,010	0,009	0,009	0,008	0,007	0,007
4.3	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	7,219	5,340	5,641	5,979	6,359	6,359

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
4.4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	5,072	4,647	4,221	3,371	2,520	2,520
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	100	100	100	100	100	100
5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100	100
5.3	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	77,78	90	92	95	97	97
5.4	Persentase Penegakan PERDA	80	100	100	100	100	100
6	Sosial						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,54	73,21	71,16	73,72	76,38	76,38
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	74,13	73,6	71,48	74,04	76,73	76,73
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	73,54	73,21	71,16	73,72	76,38	76,38
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak	38,12	20,81	21,26	23,47	23,68	23,68

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	potensial yang telah menerima jaminan Sosial						
6.6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	33,93	36,73	37,67	38,62	39,56	39,56
6.7	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
B	Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53	55	57	59	61	61
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30	30	30	30	30	30
1.3	Rasio KDRT	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
1.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0	0	0	0	0	0
1.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,52	92,02	92,52	93,02	93,52	93,52
1.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,65	72,70	74,75	76,80	78,85	78,85

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.7	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO	16	10	10	10	10	10
1.8	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.9	Status Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak	700	700	800	800	900	900
2	Pangan						
2.1	Ketersediaan pangan utama (Kg/kap)	245,97	267,75	275,46	284,72	294,76	294,76
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita						
	-Total Energi (kkal/kapita/tahun)	3176	3370	3485	3576	3667	3667
	-Total Protein (gram/kapita/tahun)	94,48	95,28	96,48	97,50	98,48	98,48
2.3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (%)	88%	88,70%	89%	90%	91%	91%
3	Pertanahan						
3.1	Persentase luas lahan bersertifikat						
3.2	Penyelesaian izin lokasi (%)						
4	Lingkungan Hidup						
4.1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	0	0	0	1	0	1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
4.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55	60	60	60	60	60
4.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	89,4	89,61	89,62	89,63	89,64	89,64
4.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	37,23	40,39	41,58	41,59	41,62	41,62
4.5	Timbulan sampah yang ditangani (%)	72,28	71,78	71,28	70,78	70,28	70,28
4.6	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	2,5	3	3,5	4	4,5	4,5
4.7	Persentase cakupan area pelayanan	68,49	71,49	74,49	77,49	80,49	80,49
4.8	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72,28	71,78	71,28	70,78	70,28	70,28
4.9	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	NA	75,85	75,95	78,05	76,15	76,15
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,82	100	100	100	100	100
5.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun (%)	94,28	94,00	95,50	97,50	100	100
5.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (%)	100	100	100	100	100	100
5.4	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (%)	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
5.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	52,81	59,62	60,00	61,00	62,00	62,00
5.6	Jumlah kepemilikan akta kematian (orang)	1791	2400	3000	3300	3600	3600
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase LPM aktif	54,34	71,69	89,04	100	100	100
6.3	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,78% *	0,78% *	0,78% *	0,78% *	0,78% *	0,78% *
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,46 *	2,16	2,12	2,11	2,1	2,1
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	52,5%	65%	75%	80%	85%	85%
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	37,5%	65%	75%	85%	90%	90%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	4	5	6	6	6	6
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	15	25	30	35	40	40
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	13	19	22	25	28	28
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,54	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7.9	Ratio Akseptor KB	92,1% *	75%	80%	85%	90%	90%
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	81,57% *	68%	69%	70%	71%	71%
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR15–19)	NA	32	29	27	25	25
7.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2,38% *	7,75%	7,57%	7,3%	7%	7%
7.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,15%	10%	11%	12%	13%	13%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
7.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	91,3% *	80%	84%	88%	90%	90%
7.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	86,5% *	78%	80%	83%	85%	85%
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	86,7% *	80%	82%	86%	88%	88%
7.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	40%	50%	60%	70%	80%	80%
7.18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.19	Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan Perangkat Daerah Kb untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan	17,8%	30%	32%	34%	35%	35%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan						
7.23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.25	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	72,4%	72%	73%	74%	75%	75%
7.26	Rata-rata usia kawin pertama wanita	NA	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun
7.27	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBD es	0,62%	1%	1%	1%	1%	1%
7.28	I Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	NA	62,44	64,55	66,5	68,5	68,5
8	Perhubungan						
8.1	Pemasangan rambu-rambu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Komunikasi dan Informatika						
9.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	69%	69%	72%	73%	75%	75%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
10.1	Persentase Koperasi aktif	44,53	46,46	47,24	48,03	48,82	48,82
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	16,91	38,91	49,91	50,00	50,00	50,00
11	Penanaman Modal						
11.1	Jumlah Perizinan yang diterbitkan :						
	a. SIUP	534	714	804	894	984	984
	b.TDP	259	347	391	435	479	479
12	Kepemudaan dan Olah Raga						
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	65,0	70	72	75	80	80
12.2	Cakupan pembinaan olahraga	34	34	35	35	36	36
12.3	Perolehan medali/atlet berprestasi di tingkat Provinsi	52	52	53	54	55	55
12.4	Prestasi atlet Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional	Peringkat 13	Peringkat 9	Peringkat 8	Peringkat 7	Peringkat 5	Peringkat 5
12.5	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi di Tingkat Provinsi/Nasional	50 Atlet	55 Atlet	60 Atlet	65 Atlet	70 Atlet	70 Atlet
13	Statistik						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
13.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.2	Buku "PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Persandian						
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	13 (SKPD) / 27%	41%	52%	62%	80%	80%
15	Kebudayaan						
15.1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	6	6	6	6	6
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	6	6	6	6	6	6
16	Perpustakaan						
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	29.966	15.000	17.000	19.000	21.000	21.000
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37.903	38.000	40.000	41.000	43.000	43.000
16.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	3.176	2.134	2.137	2.140	2.143	2.143
16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.131	1.250	1.416	1.583	1.750	1.750
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	19.547	20.000	20.350	20.700	21.050	21.050

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	25	25	26	27	28	28
17	Kearsipan						
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	47,1%	23,20%	23,20%	23,20%	30,20%	30,20%
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	47,1%	120	120	120	111	111
	<u>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</u>						
1	Pariwisata						
1.1	destinasi wisata (buah)	6	8	9	10	11	11
1.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Daerah/Nasional	79.934	90.000	100.000	110.000	125.000	125.000
2	Pertanian						
2.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	(0,0)	2,29	3,69	5,09	6,49	6,49
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100	100
4	Perdagangan						
4.1	Persentase pasar desa yang dikembangkan (%)	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00	83,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
4.2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal/PKL (jumlah pedagang)	3.100	3.250	3.325	3.400	3.475	3.475
5	Perindustrian						
5.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	8,90	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
6	Kelautan dan Perikanan						
6.1	Produksi Perikanan Tangkap	12.319,665	12.326,480	12.329,560	12.332,640	12.335,730	12.335,730
6.2	Produksi Perikanan Budidaya	9.362,397	9.809,780	9.810,760	9.811,740	9.812,720	9.812,720
	<u>PENUNJANG URUSAN</u>						
1	Perencanaan Pembangunan						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Keuangan						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
3.1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	85	85	87	90	95	95
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	80	80	83	87	90	90
3.3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	146	146	146	146	146	146
3.4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	250	250	300	340	350	350
4	Penelitian dan Pengembangan						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	30%	35%	39%	43%	45%	45%
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
5	Pengawasan						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	67	70	72	75	78	78
5.2	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,002	0,0018	0,0018	0,0016	0,0015	0,0015
5.3	Jumlah temuan BPK	14	14	13	13	12	12
6	sekretariat Dewan						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	90	100	100	100	100	100
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	90	100	100	100	100	100
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	90	100	100	100	100	100
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
A	Kemampuan Ekonomi						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	3065,937	3195,937	3260,937	3325,937	3390,937	3390,937
B	Fasilitas Wilayah /Infrastruktur						
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang)	1637	1718	1799	1880	1961	1961
3	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	90	92	93	94	95	95
4	Luas Wilayah Produktif (ha)	86,753	86,753	86,775	86,775	86,775	86,775

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang “Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022”. Penyusunan dokumen ini dilakukan sejak awal tahun 2022 dengan tahapan penyusunan rancangan RPD, pelaksanaan forum konsultasi publik, reviu oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara, fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, dan penyusunan Rancangan Akhir RPD Tahun 2023-2026.

Dalam prosesnya, sebagaimana telah disebutkan pada alinea di atas bahwa dokumen ini disusun dimulai dengan penyusunan Rancangan RPD yang diikuti dengan penyusunan Rancangan Renstra SKPD pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; forum konsultasi publik dengan menghadirkan para stake holder di daerah termasuk komisi-komisi DPRD, unsur pemerintahan/SKPD, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha di daerah, Perguruan Tinggi di daerah, dan para pihak lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Forum Konsultasi Publik maka dokumen ini disempurnakan untuk selanjutnya di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pada tahapan akhir dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah berbagai tahapan di atas, terakhir dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian maka dokumen ini resmi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah

dalam masa transisi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2023 sampai tahun 2026.

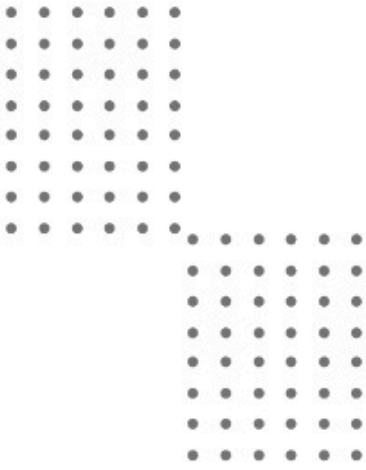
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan di daerah, penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tidak terlepas dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia Tahun 2019-2024; dan dokumen terkait lainnya.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 ini, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan pada dokumen ini yang selanjutnya akan disempurnakan melalui tahapan evaluasi pada tahun berjalan. Diharapkan partisipasi dan masukan dari segenap stakeholder untuk penyempurnaan selanjutnya. Demikian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 ini disusun dan disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan guna bahan selanjutnya.

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Husairi Abdi', is written over a horizontal line.

H. HUSAIRI ABDI, Lc



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN